

**PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**



**PROFIL
KEPENDUDUKAN
KABUPATEN BULUNGAN**

2023

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Bulungan tahun 2023.

Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Bulungan tahun 2023 diharapkan dapat memberikan gambaran keadaan kependudukan Kabupaten Bulungan dalam kurun waktu tahun 2022, dan diharapkan pula agar dapat menjadi sumber data bagi yang membutuhkan dalam rangka penyusunan Perencanaan Pembangunan dan Pengambilan Kebijakan secara umum untuk Kabupaten Bulungan khususnya mengenai gambaran tentang kondidi kependudukan di Kabupaten Bulungan yang meliputi kuantitas, kualitas, mobilitas dan persebaran penduduk melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Kami menyadari bahwa dalam Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Bulungan tahun 2023 masih terdapat kekurangan dan kelemahan baik dalam data maupun Bahasa, maka kami sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran yang positif untuk kesempurnaan penyusunan pada waktu yang akan datang.

Tanjung Selor, Februari 2023
Plt. Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Bulungan



Adi Irwansyah Moh. Saan, S.H., M.Si

NIP. 197003241995031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	I - 1
B. Peraturan Perundangan	I - 3
C. Tujuan, Sasaran, dan Manfaat	I - 4
D. Ruang Lingkup	I - 5
E. Pengertian Umum / Daftar Istilah Kependudukan	I - 6

BAB II KONDISI UMUM KABUPATEN BULUNGAN

A. Letak Geografis	II - 1
B. Kondisi Topografi	II - 2
C. Kondisi Iklim	II - 5
D. Profil Kecamatan	II - 6

BAB III KUANTITAS PENDUDUK

A. Persebaran (Distribusi) Penduduk	III - 1
B. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Demografi	III - 9
C. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial	III - 20

BAB IV KUALITAS PENDUDUK

A. Kesehatan	IV - 2
B. Perekonomian	IV - 5
C. Sosial	IV - 14

BAB V KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

A. Kepemilikan Kartu Keluarga	V - 1
B. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik(KTP-EI)	V - 2
C. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	V - 5

D. Kepemilikan Akta V - 6

BAB VI PENUTUP

Penutup VI - 1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Topografi Wilayah	II - 3
Tabel 2.2.	Klarifikasi Lereng	II - 3
Tabel 3.1.	Jumlah Penduduk per Kecamatan	III - 2
Tabel 3.2.	Jumlah Penduduk Kecamatan Tanjung Palas	III - 4
Tabel 3.3.	Jumlah Penduduk Kecamatan Tanjung Palas Barat	III - 4
Tabel 3.4.	Jumlah Penduduk Kecamatan Tanjung Palas Utara	III - 4
Tabel 3.5.	Jumlah Penduduk Kecamatan Tanjung Palas Timur	III - 4
Tabel 3.6.	Jumlah Penduduk Kecamatan Tanjung Selor	III - 5
Tabel 3.7.	Jumlah Penduduk Kecamatan Tanjung Palas Tengah	III - 5
Tabel 3.8.	Jumlah Penduduk Kecamatan Peso	III - 5
Tabel 3.9.	Jumlah Penduduk Kecamatan Peso Hilir	III - 6
Tabel 3.10.	Jumlah Penduduk Kecamatan Sekatak	III - 6
Tabel 3.11.	Jumlah Penduduk Kecamatan Bunyu	III - 6
Tabel 3.12.	Pertumbuhan Penduduk Tahun 2018-2022	III - 9
Tabel 3.13.	Jumlah Penduduk Menurut Umur	III - 10
Tabel 3.14.	Jumlah Penduduk berdasarkan rasio jenis kelamin	III - 13
Tabel 3.15.	Rasio Ketergantungan	III - 17
Tabel 3.16.	Rasio Status Perkawinan	III - 18
Tabel 3.17.	Komposisi Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir	III - 21
Tabel 3.18.	Jumlah Pemeluk Agama / Kepercayaan	III - 22
Tabel 3.19.	Jumlah Rata-rata Anggota Keluarga	III - 27
Tabel 3.20.	Jumlah Penduduk Menurut Golongan Darah	III - 29
Tabel 4.1.	Angka Kelahiran Menurut Usia	IV - 3
Tabel 4.2.	Rasio Anak dan Perempuan	IV - 4
Tabel 4.3.	Jenis Pekerjaan Penduduk	IV - 6
Tabel 4.4.	Jumlah Angka Pengangguran	IV - 13
Tabel 4.5.	Angka Penyandang Cacat (Disabilitas)	IV - 15
Tabel 5.1.	Presentase Kepemilikan Kartu Keluarga	V - 2
Table 5.2.	Presentase Kepemilikan KTP-El	V - 3

Table 5.3.	Presentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	V – 5
Table 5.4.	Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran	V – 7
Table 5.5.	Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18) Tahun	V – 9
Tabel 5.6.	Presentase Kepemilikan Akta Perkawinan	V – 11
Table 5.7.	Presentase Kepemilikan Akta Perceraian	V – 13
Table 5.8.	Presentase Kepemilikan Akta Kematian	V – 15



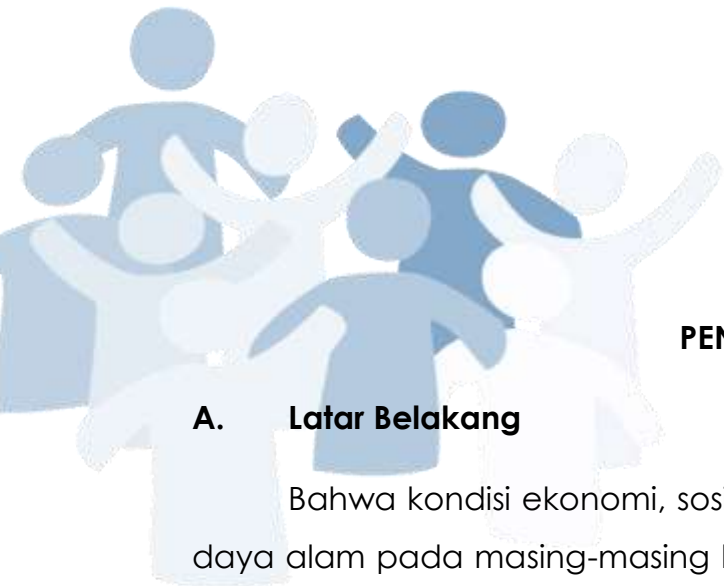
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Kabupaten Bulungan II - 2



DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1.	Jumlah Penduduk	III - 3
Grafik 3.2.	Rasio Kepadatan Penduduk	III - 8
Grafik 3.3.	Rasio Jenis Kelamin	III - 14
Grafik 3.4.	Piramida Penduduk Menurut Umur	III - 15
Grafik 3.5.	Rasio Status Perkawinan	III - 19
Grafik 3.6.	Jumlah Pemeluk Agama / Kepercayaan	III - 23
Grafik 3.7.	Jumlah Rata-rata Anggota Keluarga	III - 28
Grafik 4.1.	Angka Kelahiran Menurut Usia	IV - 4
Grafik 4.2.	Rasio Anak dan Perempuan	IV - 5
Grafik 4.3.	Angka Penyandang Cacat / Disabilitas	IV - 16
Grafik 5.1.	Presentase Kepemilikan KTP-El	V - 4
Grafik 5.2.	Presentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	V - 6
Grafik 5.3.	Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran	V - 8
Grafik 5.4.	Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18) Tahun	V - 10
Grafik 5.5.	Presentase Kepemilikan Akta Perkawinan	V - 12
Grafik 5.6.	Presentase Kepemilikan Akta Perceraian	V - 14
Grafik 5.7.	Presentase Kepemilikan Akta Kematian	V - 16



BAB I

PENDAHULUAN

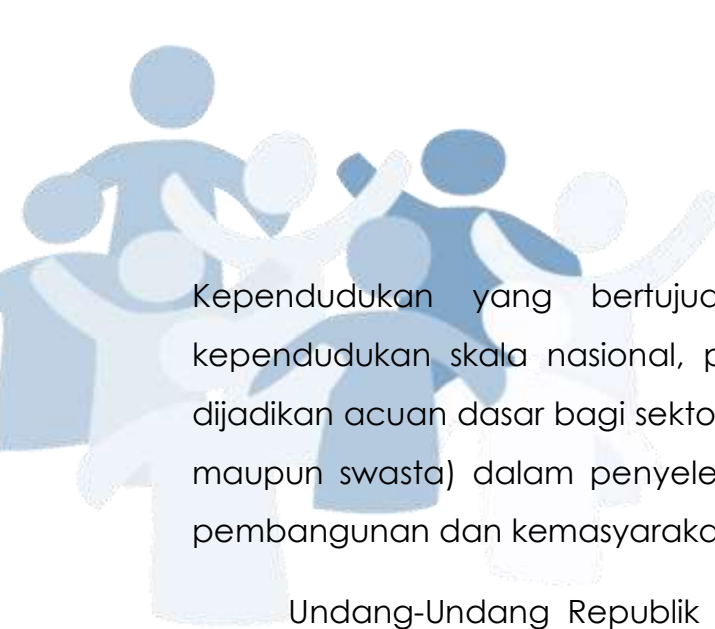
A. Latar Belakang

Bahwa kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup/sumber daya alam pada masing-masing kabupaten/kota terbentuk dari hasil proses pembangunan yang telah dilaksanakan selama tiga dekade yang lalu secara sistematis dan berkelanjutan dalam sistem sentralistik. Dalam rangka menunjang peningkatan kemampuan aparat pemerintah daerah dalam hal perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan

di tingkat kabupaten/kota belum secara tuntas mengatasi permasalahan kependudukan dan tindakan yang dilakukan masih bersifat reaktif dan cenderung normatif.

Demikian halnya dalam era otonomi daerah diharapkan terjadi pergeseran paradigma dimana pola-pola pembangunan yang bersifat mobilisasi kehendak pemerintah kearah pola pembangunan partisipatif dengan perencanaan yang bersifat “bottom up”. Pola pembangunan yang demikian dikenal dengan istilah pembangunan berwawasan kependudukan. Penyusunan analisis kependudukan dimaksud sebagai salah satu upaya dalam mengantisipasi dan mengendalikan kependudukan sejak dini yang ditimbulkan oleh adanya perubahan sistem penduduk yang akan terjadi dikemudian hari. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun perencanaan dan menetapkan kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengamanatkan agar pembangunan di bidang kependudukan juga dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi



Kependudukan yang bertujuan menyediakan data dan informasi kependudukan skala nasional, provinsi dan kota/kabupaten, dan dapat dijadikan acuan dasar bagi sektor atau lembaga-lembaga lain (pemerintah maupun swasta) dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan serta untuk memenuhi kebutuhan informasi maka Pemerintah Kabupaten Bulungan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Bulungan Tahun 2023.

Penyusunan Buku Profil Perkembangan Penduduk Kabupaten Bulungan Tahun 2023 ini adalah usaha untuk menyediakan data kependudukan yang valid, yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan tersimpan didalam basis data kependudukan, serta dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan pembangunan di Kabupaten Bulungan maupun pemerintah pusat.

Variabel data yang disajikan disini adalah hasil registrasi kependudukan di tiap-tiap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota. Variabel-variabel tersebut meliputi kuantitas penduduk, kualitas penduduk, mobilitas penduduk, dan kepemilikan dokumen-dokumen kependudukan.



B. Peraturan Perundangan

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 112 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 695).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/837/SJ Tahun 2018 tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan

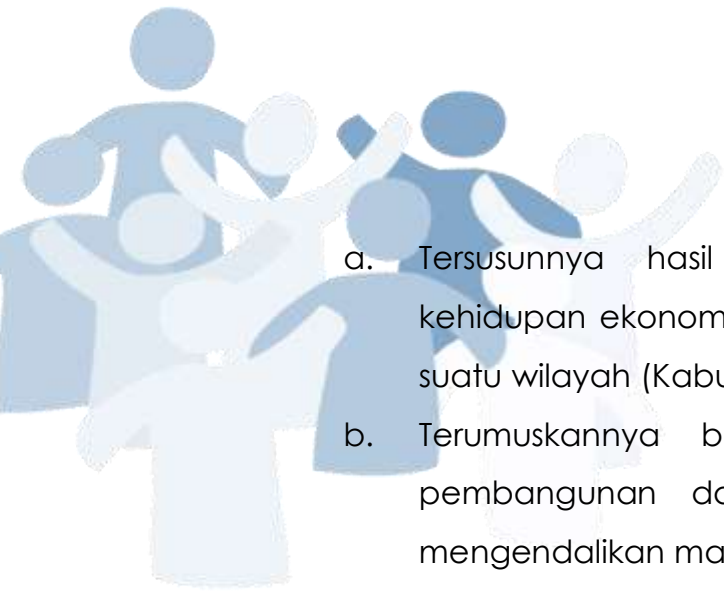
C. Tujuan, Sasaran dan Manfaat

I. Tujuan

Analisis kependudukan ini ditujukan untuk memberi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang hasilnya akan dijadikan masukan dalam Perencanaan Pelaksanaan dan Evaluasi Pemerintah Daerah.

II. Sasaran

Sasaran dari penyusunan analisis kependudukan adalah:



- a. Tersusunnya hasil perkembangan penduduk terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup di suatu wilayah (Kabupaten/Kota).
- b. Terumuskannya bahan masukan untuk perencanaan pembangunan daerah dalam rangka mencegah dan mengendalikan masalah kependudukan.

III. Manfaat

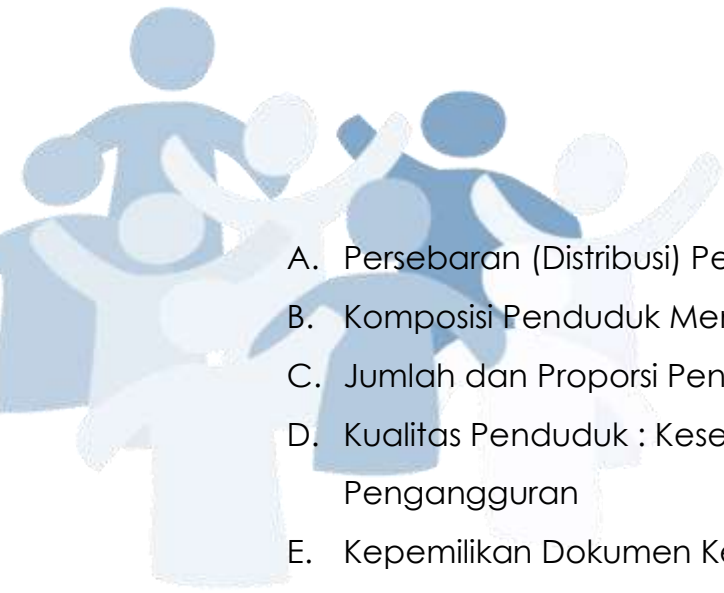
Manfaat disusunnya analisis kependudukan adalah untuk mengantisipasi sejak dini masalah kependudukan yang akan datang.

D. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup penyusunan profil perkembangan kependudukan ini mencakup lima hal pokok yaitu antara lain:

- 1) Menyajikan perkembangan kependudukan secara kuantitatif sehingga tampak jelas apa yang sudah berlangsung;
- 2) Mengidentifikasi kelompok atau segmen kependudukan yang membutuhkan perhatian khusus dan upaya-upaya yang diperlukan sehingga mendapat pelayanan tepat sasaran;
- 3) Dari point 1) dan 2) teridentifikasi potensi penduduk yang dapat dijadikan aset pembangunan daerah dan nasional;
- 4) Mengkoordinasikan, melakukan evaluasi dengan instansi terkait untuk memperoleh kesepakatan dan kesepahaman dalam penyusunan dan pemanfaatannya;
- 5) Mendorong percepatan terwujudnya satu data kependudukan untuk analisa pembangunan daerah.

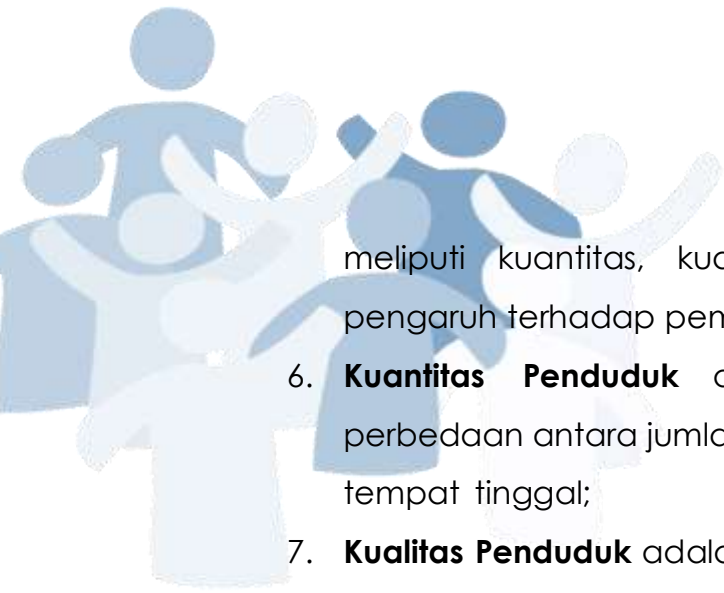
Buku Profil Perkembangan Penduduk Kabupaten Bulungan Tahun 2019 ini secara garis besar menyajikan data sebagai berikut:



- A. Persebaran (Distribusi) Penduduk
- B. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Demografi
- C. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
- D. Kualitas Penduduk : Kesehatan, Pendidikan, Perekonomian, Angka Pengangguran
- E. Kepemilikan Dokumen Kependudukan
 1. Kepemilikan Kartu Keluarga
 2. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk
 3. Kepemilikan Akta : Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, dan Akta Perceraian

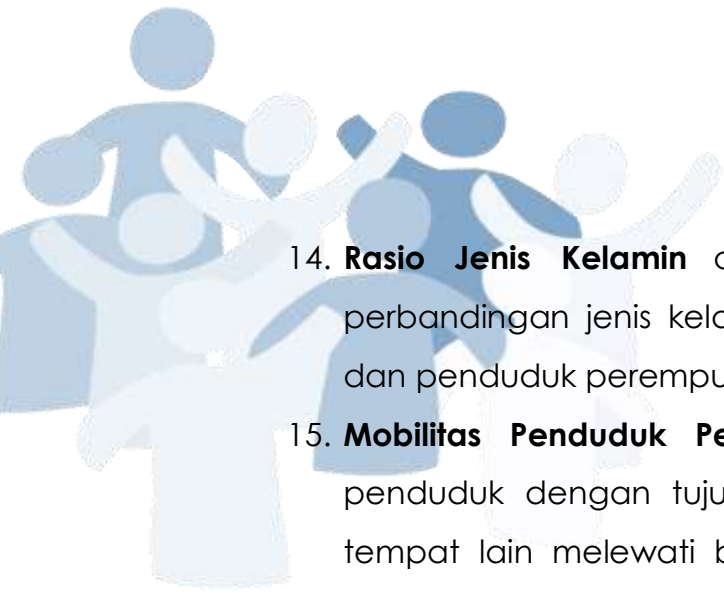
E. Pengertian Umum / Daftar Istilah Kependudukan

1. **Penduduk** adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia;
2. **Kependudukan** adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat;
3. **Administrasi Kependudukan** adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hal lainnya untuk pelayanan publik dan pembangunan di berbagai sektor;
4. **Data Kependudukan** adalah data perorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
5. **Perkembangan Kependudukan** adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan perubahan keadaan penduduk yang



meliputi kuantitas, kualitas dan mobilitas yang mempunyai pengaruh terhadap pembangunan dan lingkungan hidup;

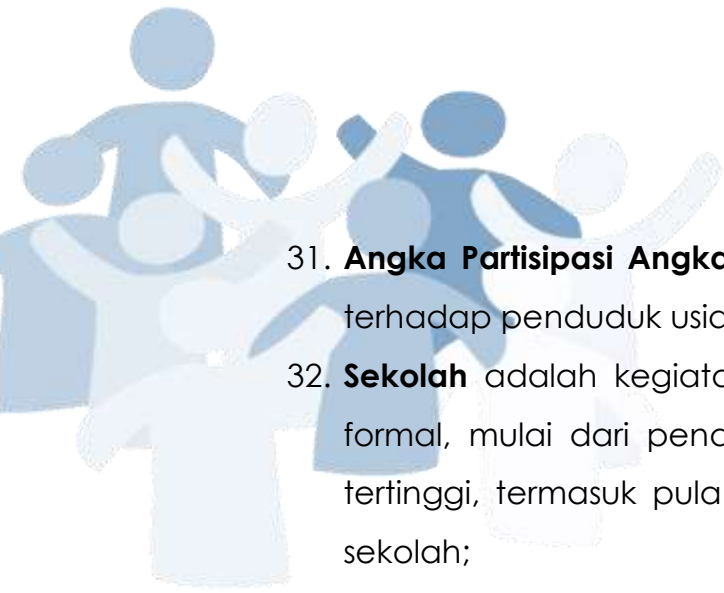
6. **Kuantitas Penduduk** adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati dan pindah tempat tinggal;
7. **Kualitas Penduduk** adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik serta ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian dan bermartabat;
8. **Mobilitas Penduduk** adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas administrasi;
9. **Profil Perkembangan Kependudukan** adalah kumpulan data dan informasi tentang perkembangan kependudukan dalam bentuk tertulis, yang mencakup segala kegiatan yang berhubungan dengan perubahan keadaan penduduk yang meliputi kuantitas, kualitas dan mobilitas yang mempunyai pengaruh terhadap pembangunan dan lingkungan hidup;
10. **Persebaran Penduduk** adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan;
11. **Peristiwa Kependudukan** adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan;
12. **Peristiwa Penting** adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;
13. **Kematian atau Mortalitas** menurut WHO adalah suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup;



14. **Rasio Jenis Kelamin** adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan jenis kelamin antara banyaknya penduduk laki-laki dan penduduk perempuan disuatu daerah pada waktu tertentu;
15. **Mobilitas Penduduk Permanen (migrasi)** adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional);
16. **Penduduk Musiman** merupakan salah satu jenis mobilitas penduduk non permanen yang bekerja tidak pada daerah domisilinya dan menetap dalam kurun waktu lebih dari satu hari tetapi kurang dari satu tahun dan dilakukan secara berulang;
17. **Mobilitas Penduduk Pulang-Balik atau Pulang-Pergi (commuting)** adalah gerak penduduk dari daerah asal ke daerah tujuan dalam batas waktu tertentu dan kembali ke daerah asal pada hari yang sama;
18. **Angka Migrasi Masuk** adalah banyaknya migrasi masuk disetiap seribu penduduk dalam satu tahun;
19. **Angka Migrasi Keluar** adalah banyaknya migran keluar di setiap seribu penduduk dalam satu tahun;
20. **Angka Migrasi Netto** adalah selisih banyaknya migran masuk dan keluar disetiap seribu penduduk dalam satu tahun;
21. **Angka Migrasi Bruto** adalah jumlah migrasi masuk (datang) dan jumlah migrasi keluar (pindah) disetiap seribu penduduk dalam satu tahun;
22. **Migrasi Kembali (return migration)** adalah banyaknya penduduk yang pada waktu diadakan pendataan bertempat tinggal di daerah yang sama dengan tempat lahir dan pernah bertempat tinggal di daerah yang berbeda;



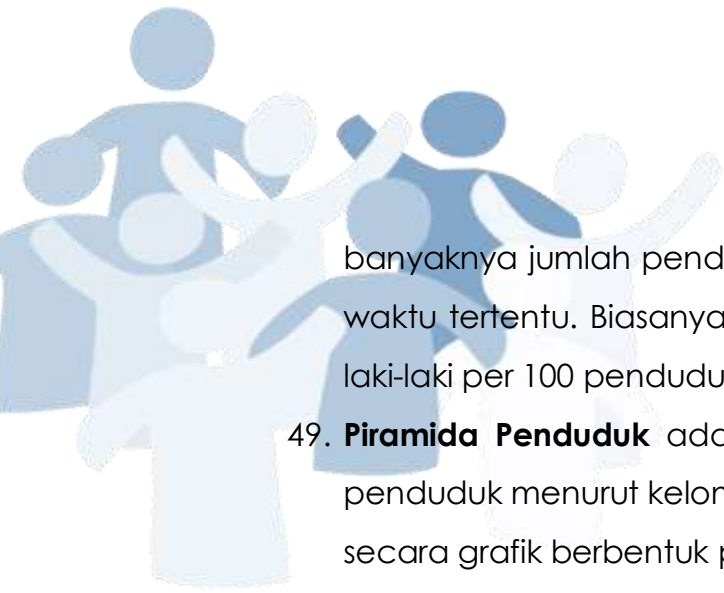
23. **Migrasi Semasa Hidup (life time migration)** adalah bentuk migrasi dimana pada waktu diadakan pendataan tempat tinggal sekarang berbeda dengan tempat kelahirannya;
24. **Migrasi Risen (recent migration)** adalah bentuk migrasi melewati batas wilayah administrasi (desa/kel/kec/kab/kota/provinsi) dimana pada waktu diadakan pendataan bertempat tinggal di daerah yang berbeda dengan tempat tinggal lima tahun yang lalu;
25. **Transmigrasi** adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi;
26. **Urbanisasi** adalah suatu proses bertambahnya konsentrasi penduduk di perkotaan dan atau proses perubahan suatu daerah perdesaan menjadi perkotaan, baik secara fisik maupun ukuran-ukuran spasial dan/atau bertambahnya fasilitas perkotaan, serta lembaga-lembaga sosial, maupun perilaku masyarakatnya;
27. **Penduduk Usia Kerja** adalah penduduk yang berusia 15 tahun sampai dengan 64 tahun;
28. **Penduduk yang Termasuk Angkatan Kerja** adalah penduduk usia kerja (15-64 tahun) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha;
29. **Penduduk yang Termasuk Bukan Angkatan Kerja** adalah penduduk usia kerja (15-64 tahun) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, dan pensiun;
30. **Bekerja** adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh penduduk dan disampaikan penduduk sebagai pekerjaannya pada saat melaporkan biodatanya kepada petugas registrasi penduduk di kelurahan/desa/dinas kependudukan dan pencatatan sipil;



31. **Angka Partisipasi Angkatan Kerja** adalah proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja;
32. **Sekolah** adalah kegiatan seseorang untuk bersekolah di sekolah formal, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tertinggi, termasuk pula kegiatan dari mereka yang sedang libur sekolah;
33. **Mengurus Rumah Tangga** adalah kegiatan seseorang yang mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah, misalnya : ibu-ibu rumah tangga dan anaknya yang membantu rumah tangga; sebaliknya pembantu rumah tangga yang mendapat upah walaupun pekerjaannya mengurus rumah tangga dianggap bekerja;
34. **Kegiatan lainnya** adalah mereka yang melakukan suatu pekerjaan diluar jenis pekerjaannya yang telah ditetapkan;
35. **Pendidikan tertinggi yang Ditamatkan** adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah dengan mendapatkan tanda tamat (ijazah);
36. **Jenis Pekerjaan** adalah macam pekerjaan yang sedang dilakukan oleh penduduk;
37. **Status Pekerjaan** adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan;
38. **Pengangguran** adalah orang yang termasuk angkatan kerja, namun pada saat pendataan/survey atau sensus tidak bekerja dan sedang mencari kerja;
39. **Angka Pengangguran** adalah proporsi jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja;
40. **Bukan Angkatan Kerja** adalah penduduk usia 15 tahun kebawah dan penduduk berusia 64 tahun keatas;



41. **Lahir Hidup** adalah
- suatu kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya didalam kandungan, dimana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan, misalnya ada nafas, ada denyut jantung atau denyut tali pusar atau gerakan otot;
 - banyaknya kelahiran hidup dari sekelompok atau beberapa kelompok wanita selama masa reproduksinya;
42. **Lahir mati** adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda -tanda kehidupan pada saat dilahirkan;
43. **Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)** adalah rata -rata banyaknya anak yang akan dimiliki seseorang wanita pada masa reproduksinya jika ia mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung;
44. **Kematian atau Mortalitas** menurut WHO adalah suatu peristiwa hilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup;
45. **Angka Partisipasi Total** adalah proporsi penduduk bersekolah menurut golongan umur sekolah yaitu umur 7-12,13-15,16-18, dan 19-24 tahun;
46. **Angka Pertumbuhan Penduduk** adalah besaran persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya;
47. **Proporsi Penduduk** adalah jumlah dan informasi penduduk menurut pengelompokan tertentu, seperti umur dan jenis kelamin;
48. **Rasio Jenis Kelamin** adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan



banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan;

49. **Piramida Penduduk** adalah gambar yang menunjukkan komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin yang disajikan secara grafik berbentuk piramida;
50. **Rasio Kepadatan Penduduk** adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah atau beberapa banyaknya penduduk per kilometer persegi pada periode tahun tertentu;



BAB II

KONDISI UMUM KABUPATEN BULUNGAN

Sebelum membahas berbagai hal terkait profil kependudukan perlu dipahami secara umum tentang Kabupaten Bulungan. Tidak hanya uraian letak geografis daerah tetapi juga menyangkut kondisi demografis daerah, gambaran ekonomi dan potensi daerah. Uraian itu diharapkan dapat memberikan gambaran latar belakang Kabupaten bulungan sebelum membahas ihwal kependudukan.

A. Letak Geografis

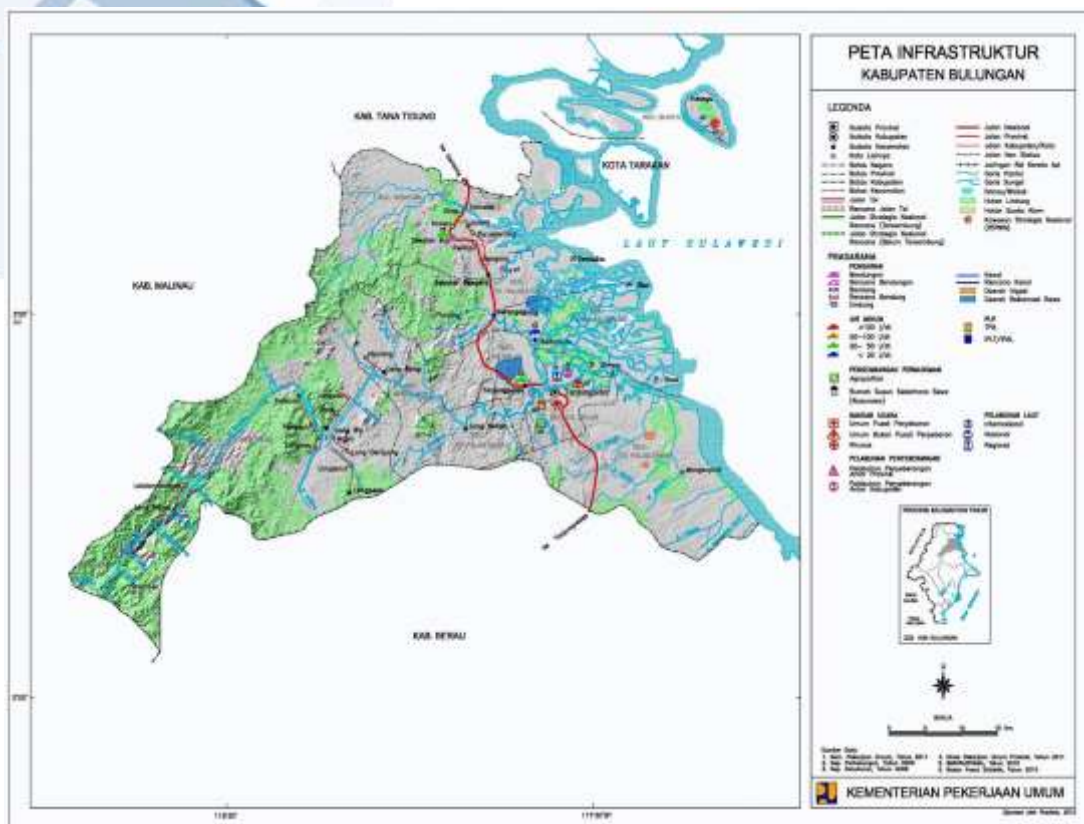
Kabupaten Bulungan sebagai salah satu kabupaten di bagian utara pulau Kalimantan, mempunyai luas 18.010,50 Km² terletak antara 116⁰04'41" sampai dengan 117⁰57'56" Bujur Timur dan 2⁰09'19" sampai dengan 3⁰34'49" Lintang utara. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2007

Tentang pembentukan kabupaten tanah Tidung di Propinsi Kalimantan Utara maka luas Kabupaten Bulungan berkurang menjadi 13.181,92 km². Adapun batas-batas kabupaten Bulungan; Sebelah utara dengan Kabupaten tana Tidung dan kabupaten Nunukan, sebelah Timur dengan Laut sulawesi dan kota tarakan , sebelah Selatan dengan Kabupaten Berau sebelah Barat dengan kabupaten malinau.

Kondisi Kabupaten Bulungan memiliki beberapa pulau, yang dialiri puluhan sungai besar dan kecil, serta secara topografi memiliki daratan yang berbukit-bukit, bergunung-gunung dengan tebing terjal dan kemiringan yang tajam.

Bentuk wilayah datar hanya dijumpai disebagian besar wilayah sepanjang garis pantai atau sepanjang daerah aliran sungai atau pada daerah

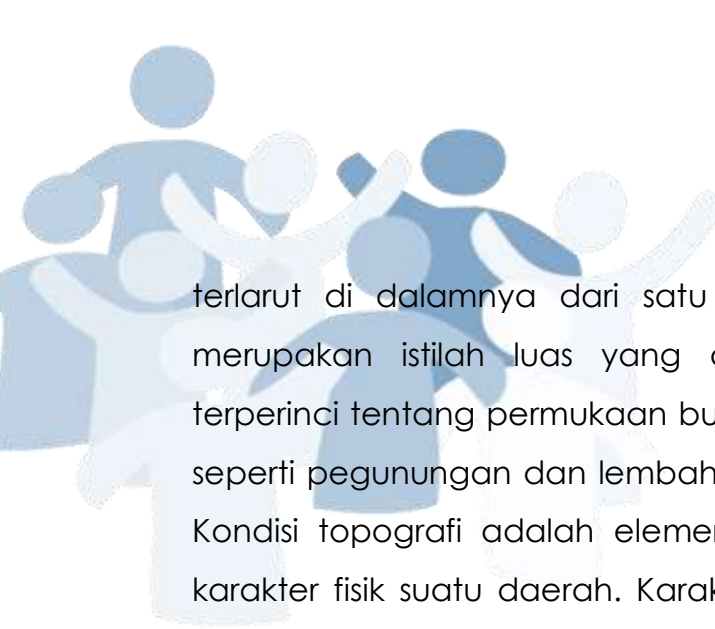
Gambar 2.1. Peta Kabupaten Bulungan



dengan fisiografi dataran alluvial sungai berupa tanggul dan rawa dengan kemiringan lahan kurang dari 2 persen. Adapun pulau yang terluas adalah pulau mandul di kecamatan Bunyu (38.737,413 ha) dan sungai yang terpanjang adalah sungai kayan (576 km: termasuk yang berada di wilayah kabupaten Malinau dan kabupaten tanah Tidung) sedangkan gunung yang tertinggi adalah gunung Kundas yang berada di Kecamatan Peso dengan ketinggian 1.670 m.

B. Kondisi Topografi

Topografi adalah perbedaan tinggi atau bentuk wilayah suatu daerah, termasuk didalamnya perbedaan kemiringan lereng, panjang lereng, bentuk lereng, dan posisi lereng. Topografi dalam proses pembentukan tanah mempengaruhi : 1) jumlah air hujan yang meresap atau ditahan oleh tanah; 2) dalamnya air tanah; 3) besarnya erosi; 4) arah gerakan air berikut bahan



terlarut di dalamnya dari satu tempat ke tempat lain. Topografi juga merupakan istilah luas yang digunakan untuk menggambarkan studi terperinci tentang permukaan bumi, termasuk perubahan pada permukaan seperti pegunungan dan lembah serta fitur lainnya seperti sungai dan jalan. Kondisi topografi adalah elemen dasar suatu wilayah untuk mengetahui karakter fisik suatu daerah. Karakteristik fisik akan mempengaruhi pola dan jenis pembangunan yang akan diterapkan di wilayah tersebut. Kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan air laut merupakan indikator untuk mengetahui kondisi topografi di suatu daerah

Tabel 2.1: Topografi Wilayah

No	Kabupaten	Kelas Ketinggian					
		0-7 m	7-25 m	25-100 m	100-500 m	500-1000 m	>1000m
1	Bulungan	213.561	249.257	220.119	531.364	193.172	273.749

(Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2020)

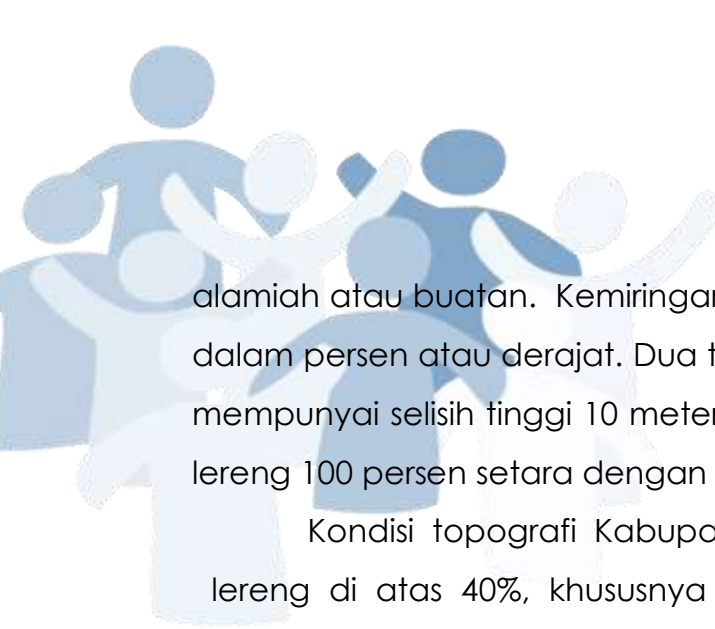
Tabel di atas menunjukkan bahwa hamper sepertiga total luas wilayah Kabupaten Bulungan memiliki ketinggian antara 100-500 mdpl (31,21%), hanya sekitar 5,92% yang memiliki kelas ketinggian 500-1000 mdpl. Perkembangan pembangunan diperkirakan akan mengelompok di wilayah yang memiliki ketinggian relatif lebih landai, sedangkan wilayah pegunungan di Kabupaten Bulungan dapat dijadikan kawasan lindung dan recharge area (daerah resapan air).

Table 2.2: Klasifikasi Lereng

No	Kabupaten	Kelas Lereng/Kemiringan				Jumlah (Ha)
		0-2% (Datar)	2-15% (Sangat Landai/ Bergelombang)	15-40% (Agak Curam)	>40% (Sangat Curam)	
1	Bulungan	319.440	185.018	216.359	590.017	1.310.834

(Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2020)

Suatu permukaan tanah yang miring dengan sudut tertentu terhadap bidang horizontal disebut sebagai lereng. Lereng ini dapat terjadi secara

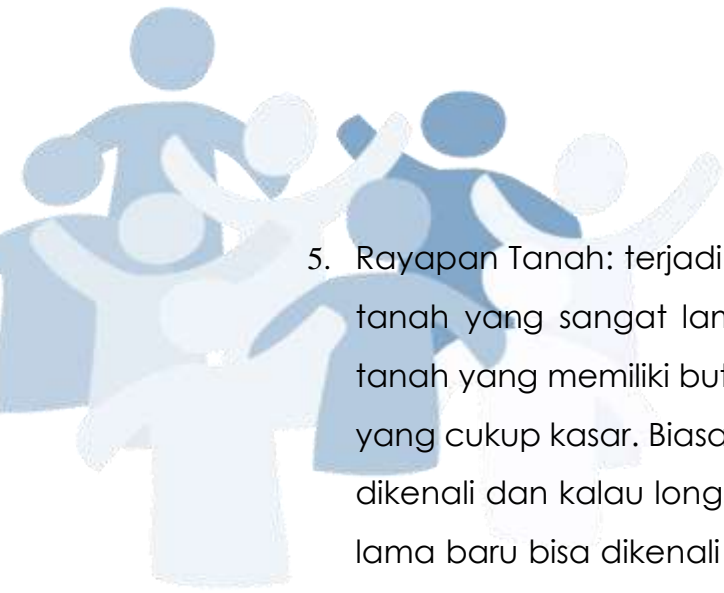


alamiah atau buatan. Kemiringan lereng menunjukkan besarnya sudut lereng dalam persen atau derajat. Dua titik yang berjarak horizontal 100 meter yang mempunyai selisih tinggi 10 meter membentuk lereng 10 persen. Kecuraman lereng 100 persen setara dengan kecuraman 45 derajat.

Kondisi topografi Kabupaten Bulungan didominasi oleh kemiringan lereng di atas 40%, khususnya wilayah bagian tengah dan barat yang sebagian besar merupakan hulu sungai. Pegunungan atau perbukitan yang tersebar di Kabupaten Bulungan yaitu sebagai berikut :Gunung/Bukit Brun, Ubut Lebung, Sombang, Bekayan, Sondong, Gunung Putih, Mara, Sekatak, Kelu, Kundas, Setarat, Takin, Silid, Rian, Aung, Jatu;

Pembangunan di atas tanah lereng memiliki resiko tinggi terhadap bahaya longsor. Faktor yang harus diperhatikan dalam menghindari kelongsoran adalah kemiringan lereng itu sendiri. Selain itu, pemilihan bentuk dan dimensi pondasi juga merupakan faktor yang perlu diperhatikan guna memperoleh daya dukung yang diinginkan. Secara umum, ada beberapa jenis longsor yang sering terjadi di Indonesia, yaitu:

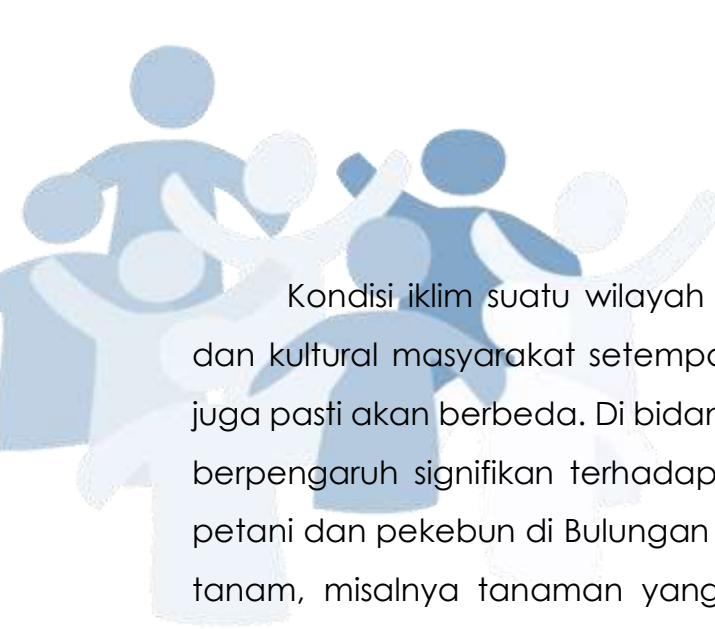
1. Longsoran Translasi: Bergeraknya material tanah pada kondisi tanah yang bertopografi rata atau menggelombang landai.
2. Longsoran Rotasi: merupakan pergerakan material tanah yang terjadi di dalam bidang yang berbentuk cekung sehingga seringkali terjadi perputaran atau rotasi di dalam bidang cekung tersebut.
3. Pergerakan Blok: merupakan pergerakan batuan yang ada di dalam tanah pada bidang yang datar atau landai. Kondisi ini juga seringkali dinamakan dengan longsoran blok batu dengan jumlah batu yang biasanya masif.
4. Runtuhan Batu: merupakan kondisi dimana terjadi runtuh batu secara langsung dan terjun bebas dari atas ke bawah. Hal ini biasanya terjadi pada bukit yang terjal dengan lereng yang cukup curam dan ini sering ditemukan di tebing pantai.



5. **Rayapan Tanah:** terjadi karena adanya rayapan atau pergerakan tanah yang sangat lambat dan halus. Ini biasanya terjadi pada tanah yang memiliki butiran kecil halus dan namun memiliki struktur yang cukup kasar. Biasanya jenis tanah longsor ini hampir tidak bisa dikenali dan kalau longsor sudah terjadi dalam waktu yang cukup lama baru bisa dikenali dengan miringnya tiang-tiang listrik, rumah dan lainnya yang berada di atasnya.
6. **Aliran Bahan Rombakan:** terjadi karena adanya pergerakan tanah dan materialnya yang disebabkan oleh dorongan air yang sangat kuat. Kecepatan dari aliran air sendiri akan sangat tergantung pada kemiringan lereng, volume air, tekanan air, kecepatan air serta jenis material tanahnya itu sendiri apakah mudah terangkut oleh air atau tidak. Gerakan dari tanah longsor ini lumayan cepat dan bisa mencapai seluruh lembah dengan jarak ratusan meter jauhnya.

C. Kondisi Iklim

Iklim adalah keadaan cuaca suatu wilayah dalam jangka waktu yang panjang, biasanya 11-30 tahun. Indonesia secara keseluruhan dikelilingi oleh Samudra dan Lautan, sehingga memiliki iklim tropis basah. Secara umum, kondisi iklim Kabupaten Bulungan hampir sama dengan wilayah lain di Indonesia yaitu beriklim tropis, dengan ciri-ciri: (1) Setiap tahunnya suhu udara akan cukup tinggi, karena memperoleh sinar matahari yang cenderung vertikal; (2) Suhu udara rata-rata tidak kurang dari 18 derajat celcius bahkan sampai 27 derajat celcius. Saat mengalami musim hujan dan musim kemarau pun tidak memiliki perbedaan berarti. (3) Dalam setiap pergantian hari adalah 24 jam dimana siang dan malam hari masing-masing memiliki waktu selama 12 jam; (4) Wilayah iklim tropis basah membuat suatu wilayah ditumbuhi banyak tanaman hijau yang lebat. Wilayah ini mampu mempengaruhi perubahan iklim yang sangat signifikan.



Kondisi iklim suatu wilayah berpengaruh pada aspek sosial, ekonomi, dan kultural masyarakat setempat, sehingga corak kehidupan tiap wilayah juga pasti akan berbeda. Di bidang agraris (pertanian dan perkebunan), iklim berpengaruh signifikan terhadap pola pekerjaan pada bidang ini. Banyak petani dan pekebun di Bulungan yang mengandalkan iklim dalam bercocok tanam, misalnya tanaman yang cocok ditanam oleh petani/pekebun di musim hujan adalah padi, sawi, kubis, caisim, bayam, kangkung, terong, kacang panjang, timun, semangka, melon. Mereka biasanya juga memperhitungkan bulan jatuhnya panen agar tepat waktu. Tanaman yang cocok ditanam saat musim kemarau adalah jagung, ubi, ketela, tomat, kentang, kacang tanah, kacang hijau, labu. Jenis tanaman umbi-umbian justru menghasilkan kualitas umbi yang baik apabila dipanen saat musim kemarau. Sedangkan tanaman yang cocok ditanam di musim pancaroba (peralihan) diantaranya adalah padi, cabai, tomat, terong, timun, semangka, melon, umbi-umbian, dan sayur-sayuran.

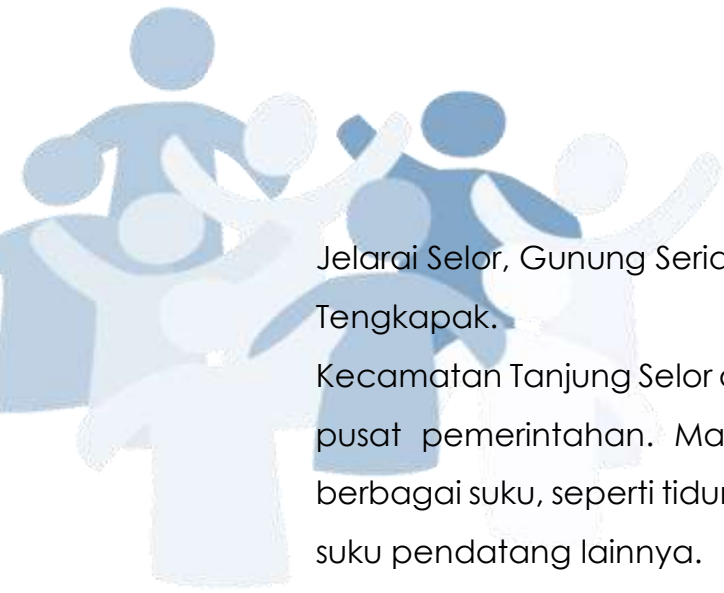
D. Profil Kecamatan

1. Tanjung Selor

Kecamatan Tanjung Memiliki Luas Wilayah : ± 1.277,81 km² Jarak dan merupakan letak Ibukota Kabupaten. Adapun batas wilayah Kecamatan Tanjung Selor adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanjung Palas Timur;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Berau;
- Sebelah Utara : Kecamatan Tanjung Palas;
- Sebelah Barat : Kecamatan Tanjung Palas;

Kondisi geografis Kecamatan Tanjung Selor sebagian besar merupakan tanah datar dan sungai-sungai. Wilayah administratif pemerintahan Kecamatan Tanjung Selor membawahi 3 (tiga) wilayah pemerintahan Kelurahan yaitu : Tanjung Selor Hulu, Tanjung Selor Hilir dan Tanjung Selor Timur. Membawahi pula 6 (enam) desa, meliputi :



Jelarai Selor, Gunung Seriang, Bumi Rahayu, Gunung Sari, Apung dan Tengkapak.

Kecamatan Tanjung Selor adalah ibukota kabupaten dan merupakan pusat pemerintahan. Masyarakatnya sangat beragam terdiri dari berbagai suku, seperti tidung, bulungan, dayak, bugis, jawa, dan suku-suku pendatang lainnya.

Dengan keragaman suku masyarakat membuat budayanya pun juga cukup beragam, sesuai dengan keradaan suku masyarakatnya. Namun dengan keragaman itulah membuat dinamika budaya pun mengalami proses akulturasi dan saling menghormati antar budaya dan masyarakatnya.

Sarana ibadah yang ada di wilayah ini terdiri dari mesjid 29 buah, langgar/mushalla 19 buah dan gereja 21 buah, Pura 1 buah, Vihara 1 Buah, Ta Pek Kong 1 buah.

Sarana Pendidikan : 8 TK, 31 SD/MI, 1 SDLB, 11 SLTP/MTs, 7 SLTA/MA dan 3 Perguruan Tinggi.

Potensi yang berada di wilayah Kecamatan Tanjung Selor, adalah sebagai berikut:

- a. Kehutanan, yang masih menyimpan potensi kayu-kayu log;
- b. Sangat cocok untuk perkebunan, karena hamparan tanah datarnya cukup luas.
- c. Pertambangan minyak di daerah Apung.
- d. Sector wisata yang berada di Km-18

2. Tanjung Palas

Kecamatan Tanjung Palas memiliki Luas Wilayah : $\pm 1.755,74 \text{ km}^2$ dengan Jarak ke ibukota Kabupaten : $\pm 2 \text{ km}$, Adapun batas wilayah Kecamatan Tanjung Palas adalah sebagai berikut:

- e. Sebelah Timur : Kecamatan Tanjung Selor;



- f. Sebelah Selatan : Kabupaten Berau;
- g. Sebelah Utara : Kecamatan Tanjung Palas Utara dan Tanjung Palas Tengah;
- h. Sebelah Barat : Kecamatan Tanjung Palas Barat;

Kondisi geografis Kecamatan Tanjung Palas sebagian besar merupakan tanah datar, bukit dan sungai-sungai. Wilayah administratif pemerintahan Kecamatan Tanjung Palas membawahi 4 (empat) Kelurahan yaitu Tanjung Palas Hulu, Tanjung Palas Tengah, Tanjung Palas Hilir dan Karang Anyar serta 5 (lima) pemerintahan desa meliputi : Gunung Putih, Antutan, Pejalin, Teras Nawang dan Teras Baru. Masyarakatnya sangat beragam terdiri dari berbagai suku, seperti tidung, bulungan, dayak, bugis, jawa, dan suku-suku pendatang lainnya.

Potensi wisata maupun alam yang berada di wilayah Kecamatan Tanjung Palas, adalah sebagai berikut:

- Wisata Alam Gunung Putih
- Musium Kesultanan Bulungan
- Wisata Budaya Adat Dayak Kenyah.
- Kehutanan, yang masih menyimpan potensi kayu-kayu log;
- Sangat cocok untuk perkebunan, karena hamparan tanah datarnya cukup luas.

3. Tanjung Palas Tengah

Kecamatan Tanjung Palas Tengah memiliki Luas Wilayah : $\pm 624,95 \text{ km}^2$ dengan Jarak ke ibukota Kabupaten : $\pm 50 \text{ km}$, Adapun batas wilayah Kecamatan Tanjung Palas Tengah adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Tarakan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Tg. Palas Timur;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Selor dan Tanjung Palas;



- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Palas Utara dan Sekatak;

Sementara keadaan topografis wilayah sebagian besar datar berombak mencapai 90 % dan sebagian kecilnya berbukit mencapai 10 %.

Akses dari ibukota kecamatan ke Desa-desa yang ada sebagian bisa dicapai melalui darat seperti desa Salimbatu dengan waktu tempuh 15 menit dan Silva Rahayu (1 jam), sedangkan Desa Tanjung Buka hanya bisa ditempuh melalui jalur sungai yang waktu tempuhnya sekitar 1 jam menggunakan perahu long boat, ketinting dan speedboat.

Sebagai salah satu Kecamatan yang baru dimekarkan dari Kecamatan induk Tanjung Palas, jumlah desanya sebanyak 3 (tiga) Desa, yaitu: Desa Salimbatu, Desa Tanjung Buka, dan Desa Silva Rahayu.

Kecamatan Tanjung Palas Tengah merupakan salah satu daerah yang menjadi pemukiman transmigrasi. Sebagai tempat pemukiman transmigrasi membuat masyarakatnya pun cukup beragam terdiri dari berbagai suku, seperti tidung, bulungan, dayak, bugis, jawa dan timor. Sesuai dengan keadaan topografi dan potensi wilayahnya, sebagian besar masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai petani dan nelayan tradisional.

Dengan keragaman suku masyarakat membuat budayanya pun juga cukup beragam, sesuai dengan keradaan suku masyarakatnya. Namun dengan keragaman itulah membuat dinamika budaya pun mengalami proses akulturasi dan saling menghormati antar budaya dan masyarakatnya.

Komoditi Khas dari Kecamatan Tanjung Palas Tengah:



- Perikanan, meliputi : ikan dan udang ekspor, ikan kering dan ebi (Desa Tanjung Buka)
- Pertanian : padi sawah (Desa salimbatu dan Desa Silva Rahayu)

Potensi wisata maupun alam yang berada di wilayah Kecamatan Tanjung Palas Tengah, adalah sebagai berikut:

- Wisata Agama : Kuburan Keramat Bilfaqih dan Al Jufri
- Wisata Sejarah : Kuburan Datu Adil
- Perkebunan kelapa sawit,
- Pertambangan Batu bara
- Pertambakan

4. Tanjung Palas Timur

Kecamatan Tanjung Palas Timur memiliki Luas Wilayah : 677,77 km² dengan Jarak ke ibukota Kabupaten : ± 86 km², Adapun batas wilayah Kecamatan Tanjung Palas Timur adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Selor/ Tanjung Palas;
- Sebelah Selatan berbatasan Kabupaten Berau;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sulawesi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Selor

Secara geografis Kecamatan Tanjung Palas Timur berada pada wilayah titik koordinat 117°30" - 118°02" bujur timur dan 02°15" - 02°50" lintang utara. Sedangkan topografinya cukup beragam, sebagian besar berbukit-bukit dan bergunung-gunung dengan tebing cukup terjal serta memiliki kemiringan sebagiannya cukup tajam.

Jumlah Desa seluruhnya terdiri 8 Desa, yaitu: Desa Tanah Kuning, Desa Mangkupadi, Desa Sajau Pungit, Desa Wonomulyo, Desa Tanjung Agung, Desa Binai, Desa Pura Sajau, Desa Sajau Hilir.

Adapun Kecamatan Tanjung Palas Timur Merupakan salah satu daerah penghasil ikan (kering/basah), ikan teri, udang dan kelapa



Potensi SDA dan Wisata dari Kecamatan Tanjung Palas Timur meliputi:

- Wisata Alam, meliputi Pemancingan di Danau (Desa Tanjung Agung), sumber air panas (Desa Sajau), dan air terjun (Desa Pura Sajau);
- Wisata Pantai dan Bahari, antara lain : Pantai Tanah Kuning dan Pantai Mangkupadi yang sangat ideal sebagai salah satu lokasi untuk pemancingan ikan laut dan sekitar Karang Tigau untuk diving.
- hutan dengan kayunya, batu bara dan minyak bumi.

5. Tanjung Palas Utara

Kecamatan Tanjung Palas Timur memiliki Luas Wilayah : 806,4 km² dengan Jarak ke ibukota Kabupaten : ± 82 km², Adapun batas wilayah Kecamatan Tanjung Palas Utara adalah sebagai berikut:

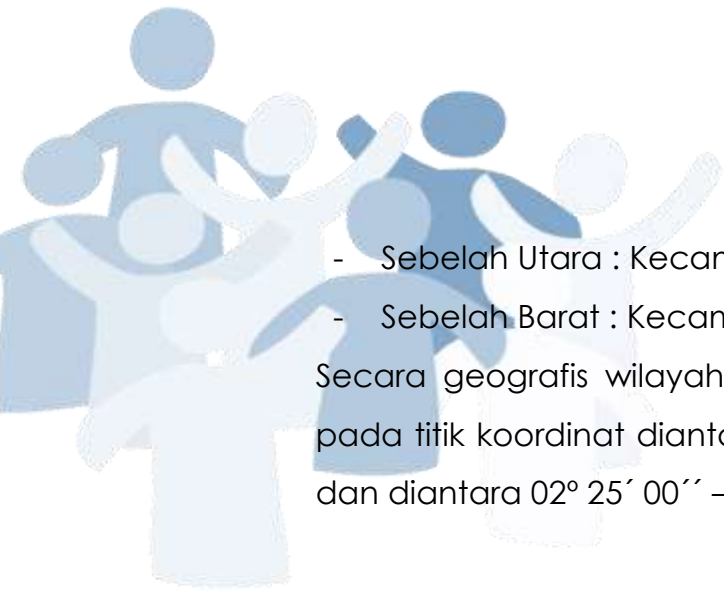
- Sebelah Timur : Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
- Sebelah Selatan : Kecamatan Tanjung Palas dan Tanjung Palas Barat;
- Sebelah Utara : Kecamatan Sekatak;
- Sebelah Barat : Kecamatan Peso Hilir.

Wilayah administratif pemerintahan Kecamatan Tanjung Palas Utara membawahi 6 (enam) wilayah pemerintahan desa. Masing-masing mempunyai ciri dan memiliki keanekaragaman struktur budaya masyarakatnya, meliputi : Karang Agung, Pimping, Panca Agung, Ruhui Rahayu, Ardi Mulyo dan Kelubir.

6. Tanjung Palas Barat

Kecamatan Tanjung Palas Barat memiliki Luas Wilayah : 2.779 km² dengan Jarak ke ibukota Kabupaten : ± 82 km², Adapun batas wilayah Kecamatan Tanjung Palas Barat adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Kecamatan Tanjung Palas;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Berau;



- Sebelah Utara : Kecamatan Tanjung Palas Utara;
- Sebelah Barat : Kecamatan Peso Hilir.

Secara geografis wilayah Kecamatan Tanjung Palas Barat terletak pada titik koordinat diantara $117^{\circ} 04' 00''$ – $117^{\circ} 15' 00''$ Bujur Timur dan diantara $02^{\circ} 25' 00''$ – $03^{\circ} 10' 00''$ Lintang Utara.

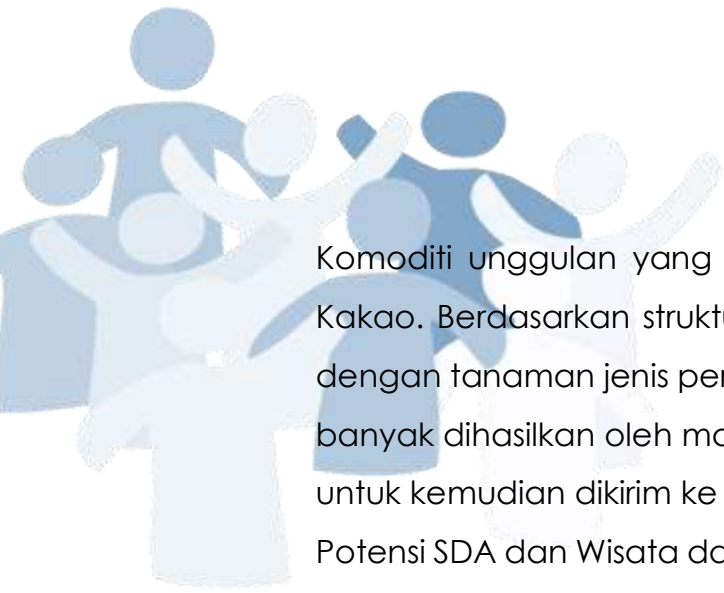
Sementara topografi wilayahnya terdiri dari wilayah datar sampai berombak mencapai 57,28 %, berombak sampai berbukit 14,71 % dan berbukit hingga bergunung-gunung mencapai 28,01 %.

Wilayah administratif pemerintahan Kecamatan Tanjung Palas Barat membawahi 5 (lima) wilayah pemerintahan desa. Masing-masing mempunyai ciri dan memiliki keanekaragaman struktur budaya masyarakatnya, meliputi : Long Beluah, Long Sam, Lang Pari, Mara Satu dan Mara Hilir.

Masyarakat Kecamatan ini cukup heterogen, terdiri dari berbagai suku. Suku asli masyarakatnya adalah dayak. Heterogenitas masyarakat ini disebabkan Bhayangkara pernah menjadi pusat kegiatan perusahaan besar. Sehingga berbagai warga berdatangan untuk bekerja dan sekaligus menetap di wilayah ini. Termasuk diantaranya berasimilasi dengan penduduk setempat. Berbagai suku yang ada diantaranya dayak dengan berbagai anak sukunya, banjar, jawa, bugis, tator, minang, batak, timur dan lain-lain.

Heterogenitas ini juga mempengaruhi kehidupan beragama masyarakatnya, yang juga cukup beraneka ragam, seperti Islam, Kristen (protestan dan Katolik), Hindu, dan Budha.

Pendidikan masyarakatnya pun juga cukup berkembang, walaupun yang berasal dari penduduk asli setempat. Meskipun tidak ada sekolahnya, tetapi pada umumnya mereka mengirimkan untuk belajar ke luar daerah.



Komoditi unggulan yang menjadi kekhasan Kecamatan ini adalah Kakao. Berdasarkan struktur tanahnya sangat cocok untuk ditanami dengan tanaman jenis perkebunan ini. Dalam setiap bulannya cukup banyak dihasilkan oleh masyarakat, sebagiannya dijual ke pengumpul untuk kemudian dikirim ke Tawau.

Potensi SDA dan Wisata dari Kecamatan Tanjung Palas Barat meliputi:

- Wisata Alam Air terjun Km 17 dan perburuan
- Wisata Budaya Adat Daya Kenyah.
- Kehutanan, yang masih menyimpan potensi kayu-kayu log;
- Sangat cocok untuk perkebunan, karena hamparan tanah datarnya cukup luas.
- Pertambangan emas yang masih belum tergali.

7. Sekatak

Kecamatan Sekatak memiliki Luas Wilayah : 1.993,98 km² dengan Jarak ke ibukota Kabupaten : ± 93 km², Adapun batas wilayah Kecamatan Sekatak adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Kota Tarakan dan Laut Sulawesi;
- Sebelah Selatan : Kecamatan Tanjung Palas Utara, Peso Hilir dan Peso;
- Sebelah Utara : Kecamatan Sesayap Hilir dan Sesayap;
- Sebelah Barat : Kabupaten Malinau.

Wilayah administratif pemerintahan Kecamatan Sekatak membawahi 22 (dua puluh dua) wilayah pemerintahan desa. Masing-masing mempunyai ciri dan memiliki keanekaragaman struktur budaya masyarakatnya, meliputi : Pentian, Pungit, Sekatak bengara, Terindak, Anjar Arip, Kelingawan, Kriting, Ambalat, Kendari, Bunau, Sekatak Buji, Liagu, Kelising, Ujang, Tenggiling, Kelembunan, Bekiliu, Paru Abang, Bambang, Turung, Maritam dan Punan Dulau.



8. Bunyu

Kecamatan Bunyu memiliki Luas Wilayah : 198,32 km² dengan Jarak ke ibukota Kabupaten : ± 60 km², Adapun batas wilayah Kecamatan Bunyu adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pulau Tarakan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sulawesi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pulau Baru;

Secara umum wilayah Bunyu terdiri dari daerah datar dan sebagaiannya dataran tinggi dengan tingkat kemiringan sedang. Desa definitif berjumlah 3 Desa, yaitu: Desa Pulau Bunyu Selatan, Desa Pulau Bunyu Barat, dan Desa Pulau Bunyu Timur.


Masyarakat di Bunyu cukup beranekaragam, bagian terbesarnya adalah pendatang yang berasal dari Jawa maupun Sulawesi. Sedangkan suku aslinya adalah masyarakat suku Tidung, dengan klasifikasinya suku Jawa 26,85 %, Bugis 25,11 %, Tidung 11,29 %, Banjar 9,97 % dan suku lainnya 26,78 %.

Dengan keanekaragaman tersebut, maka secara budaya dan adat istiadat pun juga beragam. Masing-masing suku yang ada secara khas menampilkan budayanya masing-masing, seperti Jawa, Bugis, Banjar, Tidung maupun lainnya.

Sebagian masyarakatnya bekerja sebagai tenaga kerja/karyawan di PT Pertamina EP Bunyu dan PT Medco Methanol Bunyu, PNS, petani kebun dan bagian terbesarnya menjadi nelayan.

Potensi SDA dan Wisata dari Kecamatan Bunyu meliputi:

- Salak, ikan (basah dan kering)
- Komoditi olahan hasil pertanian dan perikanan lainnya
- Batu Bara
- Minyak dan gas

- 
- Perikanan dan kelautan
 - Pantai Nibung
 - Pantai Sei Kura
 - Pantai Tanjung Arang

9. Peso Hilir

Kecamatan Peso Hilir memiliki Luas Wilayah : 1.639,71 km² dengan Jarak ke ibukota Kabupaten : ± 225 km², Adapun batas wilayah Kecamatan Peso Hilir adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Kecamatan Tanjung Palas Barat dan Tanjung Palas Utara;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Berau;
- Sebelah Utara : Kecamatan Sekatak;
- Sebelah Barat : Kecamatan Peso;

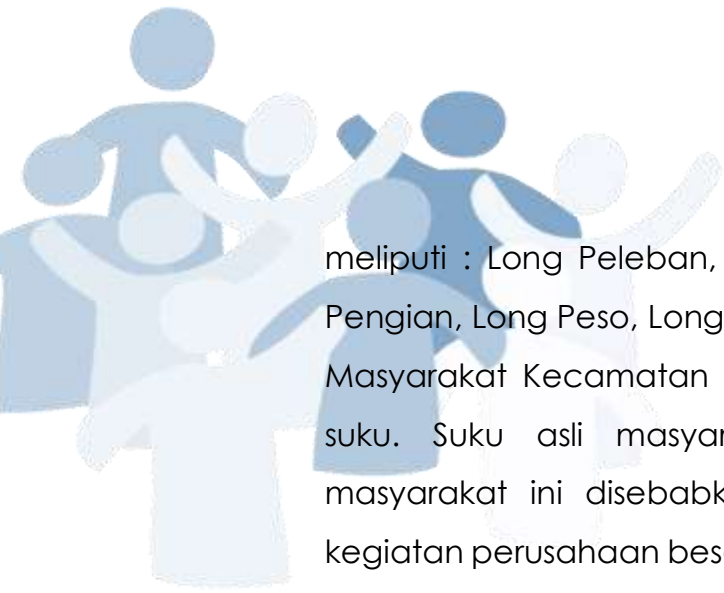
Wilayah administratif pemerintahan Kecamatan Peso Hilir membawahi 6 (enam) wilayah pemerintahan desa. Masing-masing mempunyai ciri dan memiliki keanekaragaman struktur budaya masyarakatnya, meliputi : Long Telenjau, Naha Aya, Long Bang, Long Bang Hulu, Long Tunggu dan Long Lembu.

10. Peso

Kecamatan Peso memiliki Luas Wilayah : 3.142,79 km² dengan Jarak ke ibukota Kabupaten : ± 250 km², Adapun batas wilayah Kecamatan Peso adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Kecamatan Peso Hilir;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Berau;
- Sebelah Utara : Kabupaten Malinau
- Sebelah Barat : Kabupaten Malinau

Wilayah administratif pemerintahan Kecamatan Peso membawahi 10 (sepuluh) wilayah pemerintahan desa. Masing-masing mempunyai ciri dan memiliki keanekaragaman struktur budaya masyarakatnya,



meliputi : Long Peleban, Long Yiin, Long Buang, Long Lian, Muara Pengian, Long Peso, Long Leju, Lepak Aru, Long Lasan dan Long Bia. Masyarakat Kecamatan ini cukup heterogen, terdiri dari berbagai suku. Suku asli masyarakatnya adalah dayak. Heterogenitas masyarakat ini disebabkan Bhayangkara pernah menjadi pusat kegiatan perusahaan besar. Sehingga berbagai warga berdatangan untuk bekerja dan sekaligus menetap di wilayah ini. Termasuk diantaranya berasimilasi dengan penduduk setempat. Berbagai suku yang ada diantaranya dayak dengan berbagai anak sukunya, banjar, jawa, bugis, tator, minang, batak, timur dan lain-lain.

Komoditi unggulan yang menjadi kekhasan Kecamatan ini adalah Kakao. Berdasarkan struktur tanahnya sangat cocok untuk ditanami dengan tanaman jenis perkebunan ini. Dalam setiap bulannya cukup banyak dihasilkan oleh masyarakat, sebagiannya dijual ke pengumpul untuk kemudian dikirim ke Tawau.

Potensi SDA dan Wisata dari Kecamatan Peso meliputi:

- Wisata Alam Air terjun Km 17 dan perburuan
- Wisata Budaya Adat Daya Kenyah.
- Kehutanan, yang masih menyimpan potensi kayu-kayu log;
- Sangat cocok untuk perkebunan, karena hamparan tanah datarnya cukup luas.
- Pertambangan emas yang masih belum tergali.



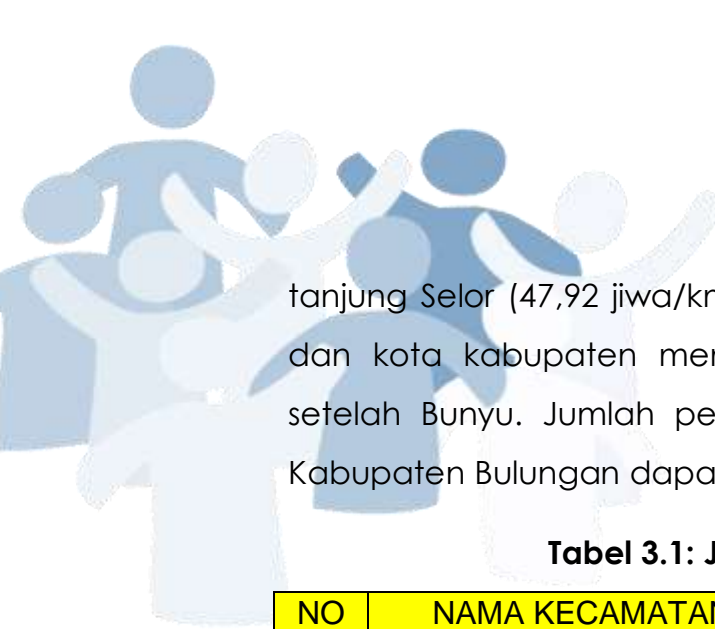
BAB III KUANTITAS PENDUDUK

A. Persebaran (Distribusi) Penduduk

Kuantitas Penduduk diartikan sebagai jumlah penduduk yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu, yang dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi (perpindahan penduduk). Bab ini juga akan membahas komposisi penduduk berdasarkan jumlah dan persebaran penduduk serta penduduk menurut karakteristik demografi.

1. Jumlah dan Persebaran Penduduk

Pada akhir semester II 2022 jumlah penduduk Kabupaten Bulungan tercatat 161.573 jiwa. Dari jumlah tersebut terbesar (37,87%) bertempat tinggal di kecamatan/kota Tanjung selor, 11,88% bertempat tinggal di Tanjung Palas Timur dan sisanya bermukim di Tanjung Palas Barat, Tanjung Palas Utara, Tanjung Palas, Tanjung Palas Tengah, Peso, Peso Hilir, Sekatak dan Kecamatan Bunyu. Jumlah penduduk tercatat terendah (2,6%) bertempat tinggal di Kecamatan Peso Hilir (Lihat Tabel 3.1). Dengan luas 1.639,71 km² kepadatan penduduk Peso Hilir mencapai (2,57 jiwa/km²) terendah kedua setelah kepadatan penduduk Kecamatan Peso (2,7 jiwa/km²) merupakan kepadatan penduduk paling rendah di kabupaten Bulungan. Kepadatan penduduk tertinggi (59,7 jiwa/km²) di kecamatan Bunyu dengan luas wilayah terkecil diantara ke-10 kecamatan-kecamatan di kabupaten Bulungan, Bunyu merupakan wilayah terpisah berbentuk pulau tersendiri yang kaya akan sumber energy terutama minyak bumi dan batubara sehingga banyak penduduk mendiami wilayah yang potensial secara ekonomi tersebut, ini yang menyebabkan kepadatan penduduk tinggi. Dibandingkan dengan kepadatan Kecamatan

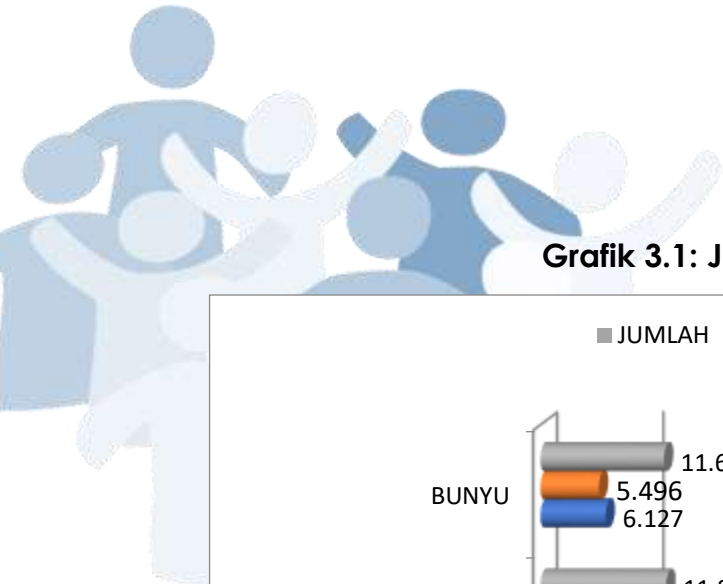


tanjung Selor (47,92 jiwa/km²) yang merupakan pusat pemerintahan dan kota kabupaten memiliki kepadatan penduduk tertinggi ke-2 setelah Bunyu. Jumlah penduduk perkabupaten/kota yang ada di Kabupaten Bulungan dapat dilihat pada di bawah ini:

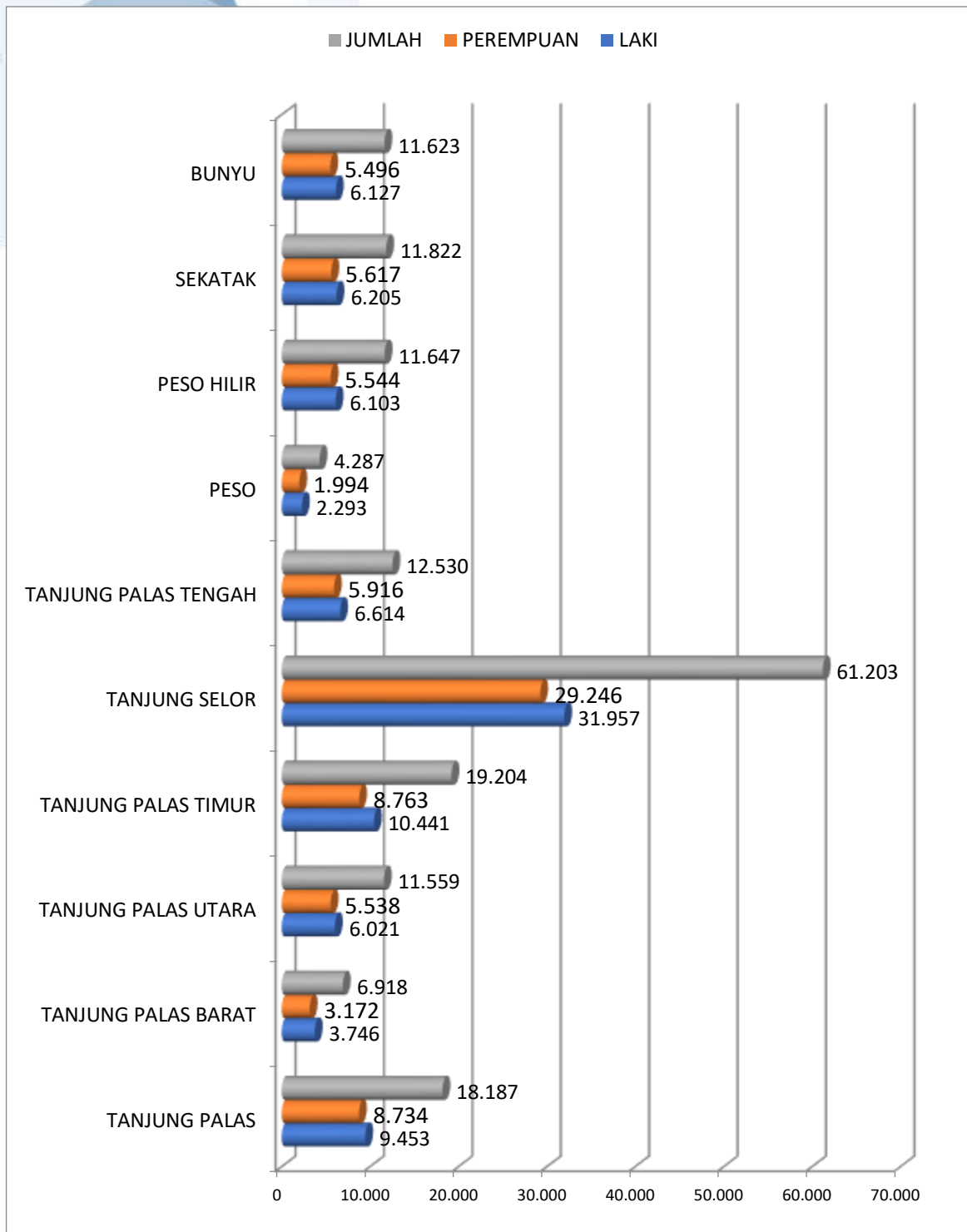
Tabel 3.1: Jumlah Penduduk Per Kecamatan

NO	NAMA KECAMATAN	LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	TANJUNG PALAS	9.453	8.734	18.187
2	TANJUNG PALAS BARAT	3.746	3.172	6.918
3	TANJUNG PALAS UTARA	6.021	5.538	11.559
4	TANJUNG PALAS TIMUR	10.441	8.763	19.204
5	TANJUNG SELOR	31.957	29.246	61.203
6	TANJUNG PALAS TENGAH	6.614	5.916	12.530
7	PESO	2.293	1.994	4.287
8	PESO HILIR	6.103	5.544	11.647
9	SEKATAK	6.205	5.617	11.822
10	BUNYU	9.453	8.734	18.187
	JUMLAH	85.113	76.460	161.573

Apabila data di atas dituangkan dalam bentuk grafik persebaran penduduk maka dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Grafik 3.1: Jumlah Penduduk per Kecamatan



Adapun jumlah penduduk berdasarkan kelurahan/desa yang ada di Kabupaten Bulungan dan jenis kelamin tahun 2023 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.2: Jumlah Penduduk Kecamatan Tanjung Palas

KECAMATAN TANJUNG PALAS				
NO	KELURAHAN / DESA	LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	TANJUNG PALAS HULU	816	772	1.588
2	TANJUNG PALAS TENGAH	1.250	1.247	2.497
3	TANJUNG PALAS HILIR	2.168	1.899	4.067
4	KARANG ANYAR	635	612	1.247
5	GUNUNG PUTIH	1.681	1.659	3.340
6	PEJALIN	623	554	1.177
7	ANTUTAN	1.265	1.127	2.392
8	TERAS BARU	462	404	866
9	TERAS NAWANG	553	460	1.013

Tabel 3.3: Jumlah Penduduk Kecamatan Tanjung Palas Barat


KECAMATAN TANJUNG PALAS BARAT				
NO	KELURAHAN / DESA	LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	LONG BELUAH	1.655	1.401	3.056
2	LONG SAM	539	442	981
3	MARA I	856	725	1.581
4	MARA HILIR	413	358	771
5	LONG PARI	283	246	529

Tabel 3.4: Jumlah Penduduk Kecamatan Tanjung Palas Utara

KECAMATAN TANJUNG PALAS UTARA				
NO	KELURAHAN / DESA	LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	KARANG AGUNG	1.315	1.262	2.577
2	PIMPING	1.214	1.042	2.256
3	PANCA AGUNG	1.270	1.200	2.470
4	RUHUI RAHAYU	1.050	950	2.000
5	ARDI MULYO	378	321	699
6	KELUBIR	794	763	1.557

Tabel 3.5: Jumlah Penduduk Kecamatan Tanjung Palas Timur

KECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR				
NO	KELURAHAN / DESA	LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	TANAH KUNING	2.168	1.877	4.045
2	MANGKUPADI	1.937	1.578	3.515
3	SAJAU	850	708	1.558



4	WONOMULYO	899	806	1.705
5	TANJUNG AGUNG	728	638	1.366
6	BINAI	2.127	1.663	3.790
7	SAJAU HILIR	1.250	1.077	2.327
8	PURA SAJAU	482	416	898

Tabel 3.6: Jumlah Penduduk Kecamatan Tanjung Selor

KECAMATAN TANJUNG SELOR				
NO	KELURAHAN / DESA	LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	TANJUNG SELOR HULU	3.026	2.863	5.889
2	TANJUNG SELOR HILIR	16.897	15.740	32.637
3	TANJUNG SELOR TIMUR	3.388	3.092	6.480
4	JELARAI SELOR	3.713	3.380	7.093
5	GUNUNG SERIANG	555	461	1.016
6	BUMI RAHAYU	862	734	1.596
7	GUNUNG SARI	1.159	911	2.070
8	APUNG	1.738	1.515	3.253
9	TENGGAPAK	619	550	1.169

Tabel 3.7: Jumlah Penduduk Kecamatan Tanjung Palas Tengah

KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH				
NO	KELURAHAN / DESA	LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	SALIMBATU	3.189	2.876	6.065
2	SILVA RAHAYU	629	612	1.241
3	TANJUNG BUKA	2.796	2.428	5.224

Tabel 3.8: Jumlah Penduduk Kecamatan Peso

KECAMATAN PESO				
NO	KELURAHAN / DESA	LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	LEPAK ARU	342	294	636
2	LONG LASAN	252	243	495
3	LONG PESO	379	358	737
4	LONG BIA	271	212	483
5	MUARA PANGEAN	256	223	479
6	LONG LIAN	176	144	320
7	LONG PELAAH	79	65	144
8	LONG LEJUJH	215	173	388
9	LONG PELBAN	120	108	228
10	LONG BUANG	203	174	377

**Tabel 3.9: Jumlah Penduduk Kecamatan Pesohilir**

KECAMATAN PESOHILIR				
NO	KELURAHAN / DESA	LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	LONG TUNGU	554	470	1.024
2	LONG BANG	417	358	775
3	LONG TELENJAU	323	261	584
4	NAHA AYA	461	410	871
5	LONG LEMBU	227	185	412
6	LONG BANG HULU	298	252	550

Tabel 3.10: Jumlah Penduduk Kecamatan Sekatak

KECAMATAN SEKATAK				
NO	KELURAHAN / DESA	LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	SEKATAK BUJI	1.706	1.523	3.229
2	PARU ABANG	203	183	386
3	BUNAU	228	215	443
4	UJANG	242	237	479
5	TENGGILING	182	188	370
6	KELEMBUNAN	225	221	446
7	TURUNG	146	130	276
8	TERINDAK	248	208	456
9	KELISING	187	168	355
10	AMBALAT	148	138	286
11	KERITING	68	64	132
12	KENDARI	91	96	187
13	BAMBANG	97	86	183
14	MARITAM	149	150	299
15	PENTIAN	200	178	378
16	PUNAN DULAU	170	142	312
17	KELINCAUAN	237	223	460
18	BEKILIU	166	156	322
19	SEKATAK BENGARA	583	517	1.100
20	PUNGIT	370	325	695
21	ANJAR ARIP	80	73	153
22	LIAGU	377	323	700

Tabel 3.11: Jumlah Penduduk Kecamatan Bunyu

KECAMATAN BUNYU				
NO	KELURAHAN / DESA	LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	BUNYU BARAT	3.154	2.802	5.956
2	BUNYU SELATAN	1.624	1.527	3.151
3	BUNYU TIMUR	1.427	1.288	2.715



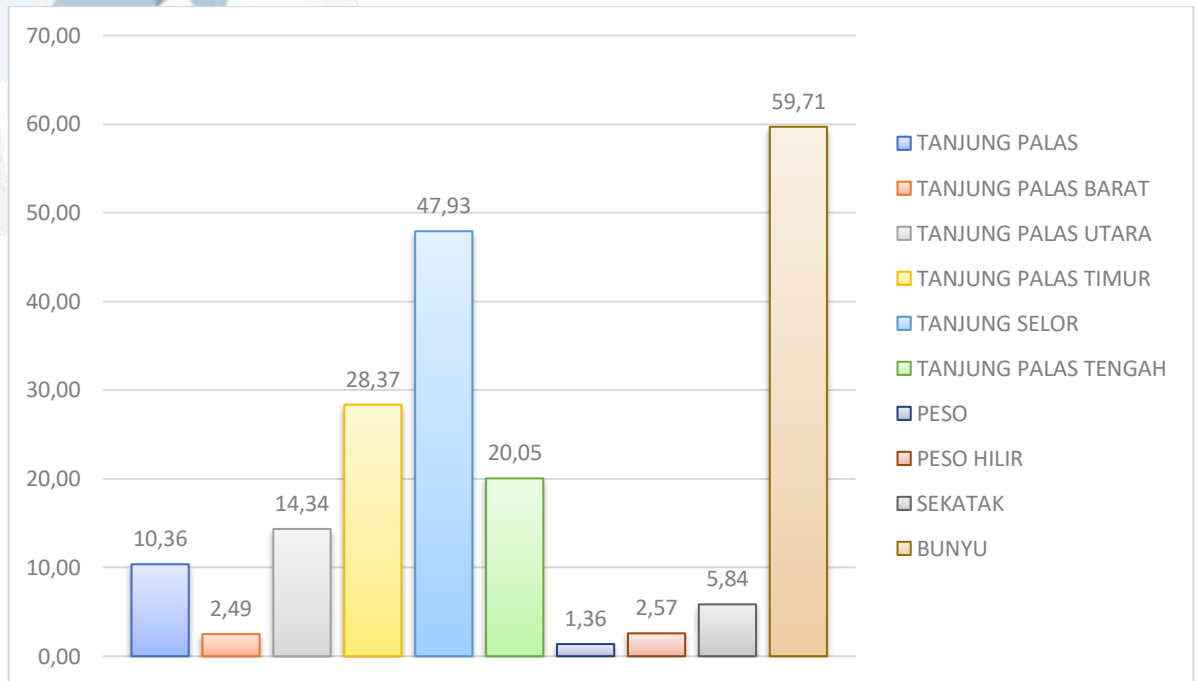
2. **Kepadatan Penduduk (Population Density Ratio)**

Kepadatan Penduduk adalah perbandingan banyaknya penduduk terhadap luas wilayah suatu daerah. Sedangkan masalah kepadatan penduduk seringkali ikut hadir pada suatu wilayah / daerah yang sedang mengurban (urbanisasi). Urbanisasi disini tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan penduduk dari desa ke kota, namun juga proses perubahan suatu wilayah yang sebelumnya sepi menjadi ramai dari segi jumlah penduduk dan bertambahnya infrastruktur fisik maupun fasilitas publik. Dengan mengetahui kepadatan penduduk maka dapat diketahui konsentrasi penduduk di suatu wilayah serta dapat digunakan sebagai acuan untuk mewujudkan pemerataan dan persebaran penduduk (Program Transmigrasi).

Secara umum, permasalahan-permasalahan akibat kepadatan penduduk di Indonesia berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi, politik, pertahanan, keamanan. Dari segi kuantitas, jumlah penduduk yang besar berarti permasalahan dalam kemampuan menyediakan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Sedangkan dari segi kualitas terlihat dari kemampuan dan daya saing Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Luas wilayah Kabupaten Bulungan tercatat seluas 18.010 Km². Sebaran penduduk umumnya terkonsentrasi di pusat-pusat perkotaan. Kawasan permukiman yang cukup padat berada di Kecamatan Tanjung Selor, diikuti Kecamatan Tanjung Palas, dan Kecamatan yang lain. Data kepadatan penduduk Kabupaten Bulungan dapat dilihat pada rasio kepadatan penduduk dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Grafik 3.2: Rasio Kepadatan Penduduk per Kecamatan (perjiwa/kilometer persegi)



3. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah rata-rata laju pertumbuhan penduduk di suatu daerah selama periode waktu tertentu, sehingga dapat diketahui perubahan jumlah penduduk antar dua periode waktu. Laju pertumbuhan penduduk adalah salah satu indikator yang paling sering digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi kependudukan suatu daerah di masa kini maupun di masa depan. Secara umum pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh faktor alami yaitu kelahiran dan kematian, dan faktor non alami yaitu migrasi (perpindahan penduduk). Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Bulungan adalah 148.452 jiwa dan jumlah penduduk di tahun 2021 adalah 153.558 jiwa. Dengan demikian perubahan jumlah penduduk yang berasal dari kelahiran, kematian, dan mobilitas penduduk adalah 5.106 jiwa dan

pertumbuhan penduduk sebesar **3,32%**. Berikut pertumbuhan penduduk Kabupaten Bulungan tahun 2017-2021 sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:


**Tabel 3.12: Pertumbuhan Penduduk
Kabupatæn Bulungan Tahun 2017-2021**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK					PERTUMBUHAN PENDUDUK K RATA- RATA
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	TANJUNG PALAS	16.543	16.829	17.509	17.802	18.187	2,16
2	TANJUNG PALAS BARAT	6.379	6.440	6.549	6.788	6.918	1,92
3	TANJUNG PALAS UTARA	10.320	10.405	10.997	11.326	11.559	2,06
4	TANJUNG PALAS TIMUR	13.465	14.527	15.874	17.253	19.204	11,31
5	TANJUNG SELOR	50.624	52.432	55.645	57.861	61.203	5,78
6	TANJUNG PALAS TENGAH	10.519	10.812	12.032	12.192	12.530	2,77
7	PESO	4.053	4.033	4.155	4.204	4.287	1,97
8	PESO HILIR	3.833	3.832	3.940	4.143	4.216	1,76
9	SEKATAK	8.859	8.928	10.040	10.366	11.647	12,36
10	BUNYU	11.609	11.495	11.711	11.623	11.822	1,71
	JUMLAH	136.204	139.733	148.452	153.558	161.573	5,22

Dari tabel diatas terlihat bahwa laju pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bulungan tahun 2022 adalah 5,52%. Laju pertumbuhan paling tinggi di peroleh dari Kecamatan Tanjung Palas Timur sebesar 11,31%, sedangkan laju pertumbuhan paling kecil terdapat pada 3 (tiga) kecamatan yaitu Tanjung Palas Barat, Peso Hilir, dan Bunyu.

B. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Demografi

Demografi adalah ilmu kependudukan yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis demografi merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnis tertentu. Indikator penduduk menurut karakter demografi dapat dilihat dari usia dan jenis kelamin,



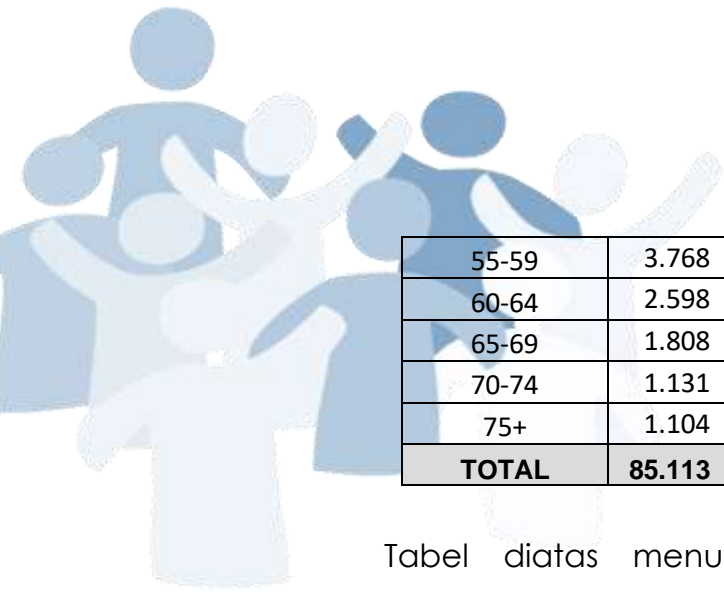
status perkawinan, keluarga, pendidikan, agama, kecacatan, kelahiran dan kematian.

1. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis kelamin

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih, dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Penduduk menurut kelompok umur merupakan penduduk yang dikelompokkan menurut kelompok umur 5 tahunan. Karakteristik penduduk menurut umur dan jenis kelamin berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan pekerjaan dan lain-lain. Setiap kelompok umur memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, misalnya kelompok bayi dan balita, mereka lebih membutuhkan asupan gizi yang baik dan perawatan kesehatan. Data penduduk ini juga sangat vital jika dikaitkan dengan program-program yang digalakkan pemerintah. Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin tergambar dalam table halaman selanjutnya:

Tabel 3.13: Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

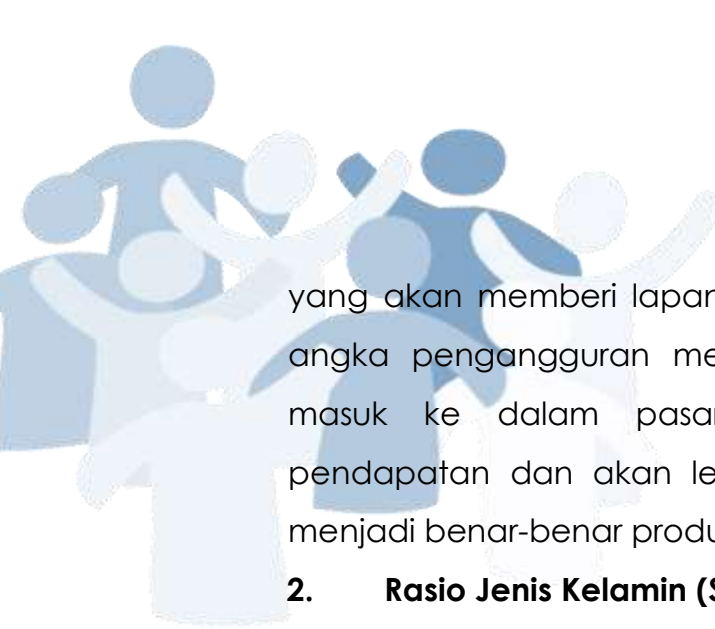
KELOMPOK UMUR	JENIS KELAMIN				JUMLAH	
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		PENDUDUK	
	n	%	n	%	n	%
0-4	5.625	6,61	5.204	6,81	10.829	6,70
5-9	8.223	9,66	7.532	9,85	15.755	9,75
10-14	8.149	9,57	7.618	9,96	15.767	9,76
15-19	7.207	8,47	6.548	8,56	13.755	8,51
20-24	7.657	9,00	6.860	8,97	14.517	8,98
25-29	7.048	8,28	6.326	8,27	13.374	8,28
30-34	6.550	7,70	6.173	8,07	12.723	7,87
35-39	6.477	7,61	6.090	7,96	12.567	7,78
40-44	6.909	8,12	6.112	7,99	13.021	8,06
45-49	5.818	6,84	5.006	6,55	10.824	6,70
50-54	5.041	5,92	4.251	5,56	9.292	5,75



55-59	3.768	4,43	3.081	4,03	6.849	4,24
60-64	2.598	3,05	2.187	2,86	4.785	2,96
65-69	1.808	2,12	1.505	1,97	3.313	2,05
70-74	1.131	1,33	877	1,15	2.008	1,24
75+	1.104	1,30	1.090	1,43	2.194	1,36
TOTAL	85.113	100,00	76.460	100,00	161.573	100,00

Tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Bulungan pada kelompok umur 10-14 tahun merupakan jumlah terbanyak dengan persentase sebesar 9,76% dan ini ada pada kelompok jenis kelamin laki-laki (9,57%) maupun perempuan (9,96%). Penduduk terbanyak kedua pada kelompok umur 5-9 tahun sebesar 9,75% dari jumlah penduduk Kabupaten Bulungan. Kedua persentase terbesar ini merupakan usia sekolah dasar dan sekolah lanjutan pertama. Kondisi ini menuntut perhatian pemerintah Kabupaten Bulungan dalam penanganan kelompok penduduk usia ini karena menurut prediksi saat ini Indonesia sedang berada pada fase awal bonus demografi dimana puncaknya berada pada tahun 2028-2030. Bonus Demografi merupakan kondisi dimana suatu wilayah atau negara memiliki jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) lebih banyak dibandingkan dengan usia non-produktif.

Prasyarat yang harus dipenuhi oleh suatu negara apabila ingin memperoleh manfaat besar bonus demografi yaitu sumber daya manusia yang berkualitas. Karena dengan adanya masyarakat yang berkualitas dapat meningkatkan pendapatan perkapita suatu negara apabila ada kesempatan kerja yang produktif. Kedua, terserapnya tenaga kerja menjadi faktor penting dalam memanfaatkan bonus demografi karena dengan banyak dibutuhkannya tenaga kerja, maka pengangguran akan berkurang dan kesejahteraan akan meningkat pesat. Ketiga, meningkatkan tabungan di tingkat rumah tangga. Setiap rumah tangga memiliki potensi untuk membuka suatu usaha



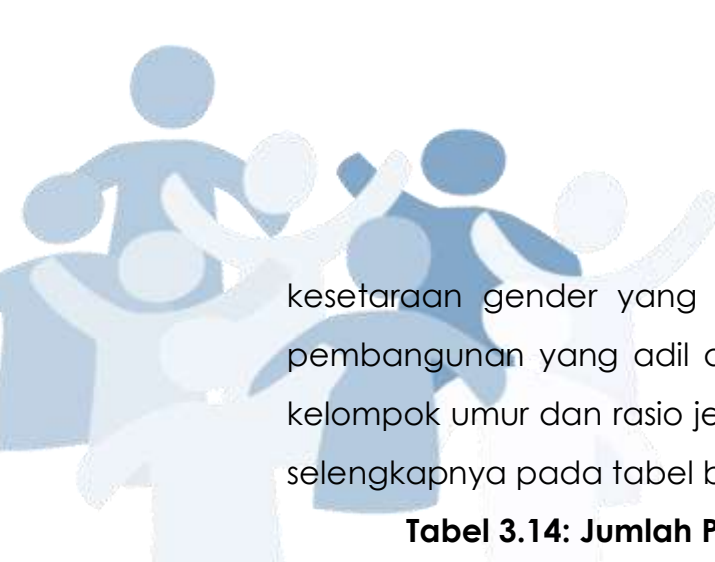
yang akan memberi lapangan pekerjaan untuk orang lain sehingga angka pengangguran menurun. Terakhir, peran perempuan yang masuk ke dalam pasar kerja akan membantu peningkatan pendapatan dan akan lebih banyak lagi penduduk usia produktif menjadi benar-benar produktif.

2. Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk pria dan jumlah penduduk wanita pada suatu daerah pada suatu waktu tertentu, yang dinyatakan dalam berapa banyaknya penduduk pria berbanding 100 orang wanita. Jika sex ratio diatas 100 menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, sedangkan bila sex rasionya kurang dari 100 berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki.

Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan sumber daya manusia laki-laki dan perempuan secara adil. Informasi tentang rasio jenis kelamin juga penting diketahui oleh masyarakat termasuk institusi partai politik, terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen/legislatif.

Komposisi jumlah penduduk yang berimbang dan partisipasi aktif laki-laki dan perempuan dalam setiap proses pembangunan akan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan. Dari rasio jenis kelamin ini, diharapkan penentu kebijakan di level pusat dan daerah dapat membuat legislasi secara adil dan tidak bias gender. Dengan jumlah penduduk yang hampir berimbang antara laki-laki dan perempuan, maka sangat dibutuhkan peran aktif kedua belah pihak di berbagai bidang pembangunan, sehingga dapat dirasakan



kesetaraan gender yang pada akhirnya akan mewujudkan tujuan pembangunan yang adil dan makmur. Data penduduk berdasarkan kelompok umur dan rasio jenis kelamin (sex ratio) Kabupaten Bulungan selengkapnya pada tabel berikut :

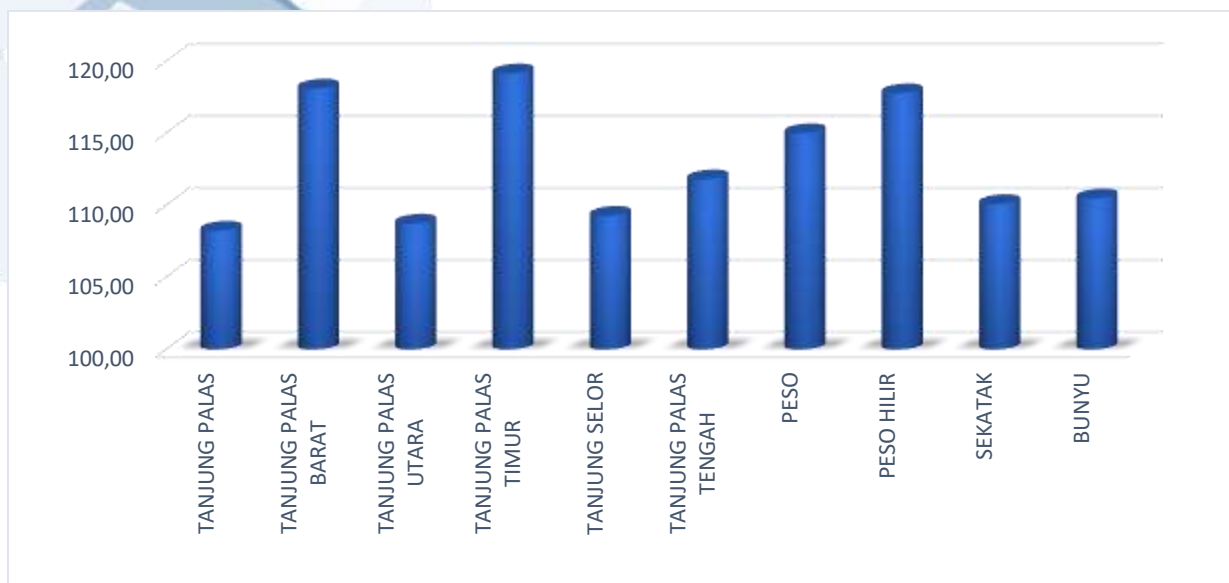
Tabel 3.14: Jumlah Penduduk berdasarkan rasio jenis kelamin

NO	KECAMATAN	LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	RASIO (%)
1	TANJUNG PALAS	9.453	8.734	18.187	108,23
2	TANJUNG PALAS BARAT	3.746	3.172	6.918	118,10
3	TANJUNG PALAS UTARA	6.021	5.538	11.559	108,72
4	TANJUNG PALAS TIMUR	10.441	8.763	19.204	119,15
5	TANJUNG SELOR	31.957	29.246	61.203	109,27
6	TANJUNG PALAS TENGAH	6.614	5.916	12.530	111,80
7	PESO	2.293	1.994	4.287	114,99
8	PESO HILIR	2.280	1.936	4.216	117,77
9	SEKATAK	6.103	5.544	11.647	110,08
10	BUNYU	6.205	5.617	11.822	110,47
	JUMLAH	85.113	76.460	161.573	111,32

Dari tabel di atas nampak bahwa Rasio Jenis Kelamin (RJK) atau Sex Ratio di Kabupaten Bulungan adalah 111,32 yang berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 111 orang penduduk laki-laki. Jika dilihat per kabupaten/kota pada tabel, terlihat bahwa rasio jenis kelamin (sex ratio) di setiap Kabupaten/Kota di atas 100, hal ini berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki di setiap Kecamatan lebih banyak daripada perempuan. Jika diamati masing-masing wilayah Kecamatan, maka terlihat bahwa Kecamatan Tanjung Palas Timur memiliki rasio jenis kelamin tertinggi yaitu 119,15 diikuti Kecamatan Peso Hilir sebesar 117,77; Kecamatan Peso sebesar 114,99; Kecamatan Tanjung Palas Tengah sebesar 111,8; sedangkan rasio jenis kelamin terendah adalah Kecamatan Tanjung Palas sebesar 108,23. Apabila data rasio jenis kelamin ini disajikan dalam bentuk grafik, maka akan terlihat seperti di halaman berikut:



Grafik 3.3: rasio kenis kelamin



3. Piramida Penduduk

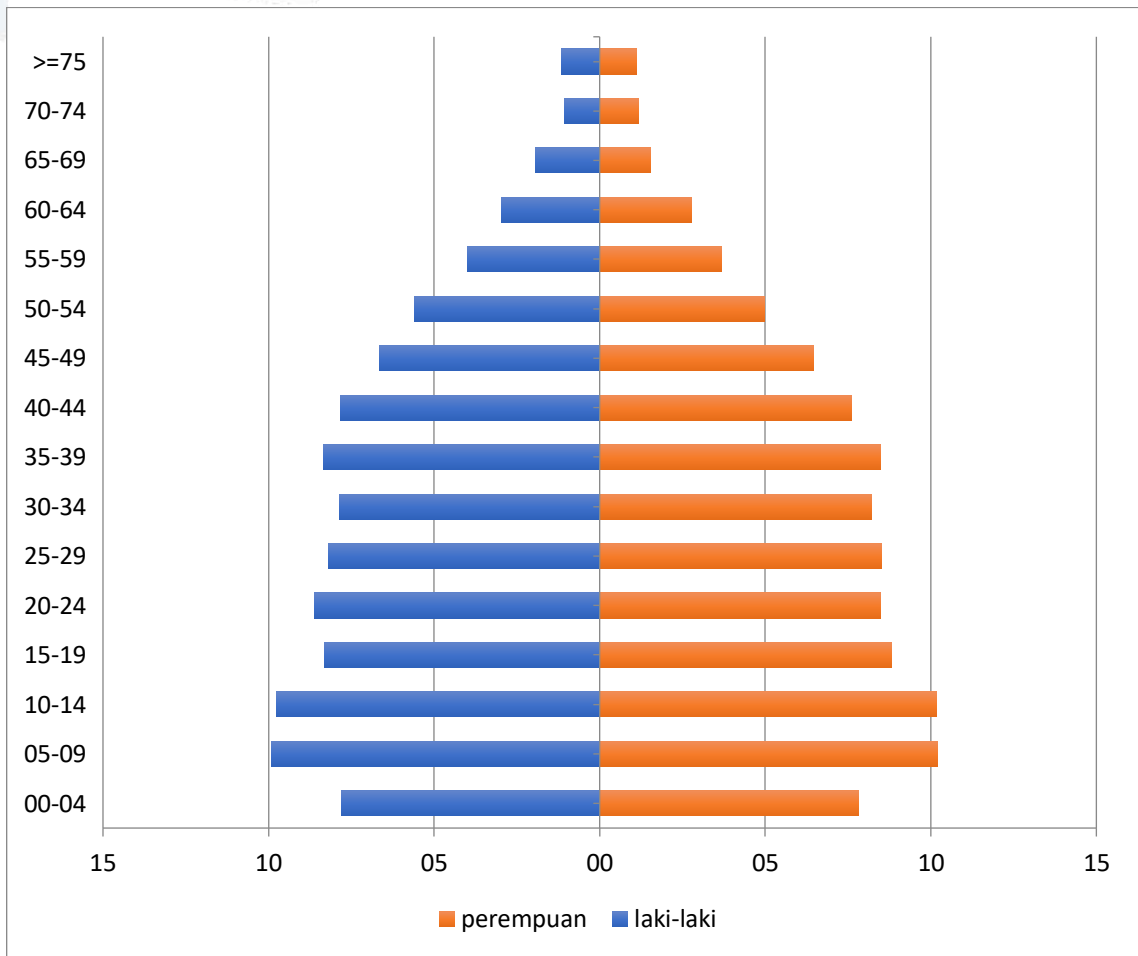
Piramida Penduduk adalah grafik mendatar atau diagram batang yang menyajikan data penduduk berdasarkan umur, jenis kelamin dan daerah suatu penduduk. Piramida penduduk disajikan dalam dua buah grafik batang, pada satu sisi menunjukkan jumlah penduduk laki-laki dan pada sisi lainnya menunjukkan jumlah penduduk perempuan dalam kelompok interval usia penduduk lima tahunan. Untuk laki-laki digambarkan di sisi kanan dan untuk perempuan di sisi kiri. Piramida penduduk ini mengandung beberapa informasi, yaitu:

- 1) Jumlah angka kelahiran semakin bertumbuh sehingga jumlah penduduk juga bertambah;
- 2) Rasio perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan;
- 3) Penggolongan penduduk berdasarkan usia secara berkala;
- 4) Jumlah usia produktif dan non-produktif;
- 5) Jumlah lapangan kerja yang dibutuhkan;
- 6) Kebutuhan infrastruktur pendidikan untuk penduduk;

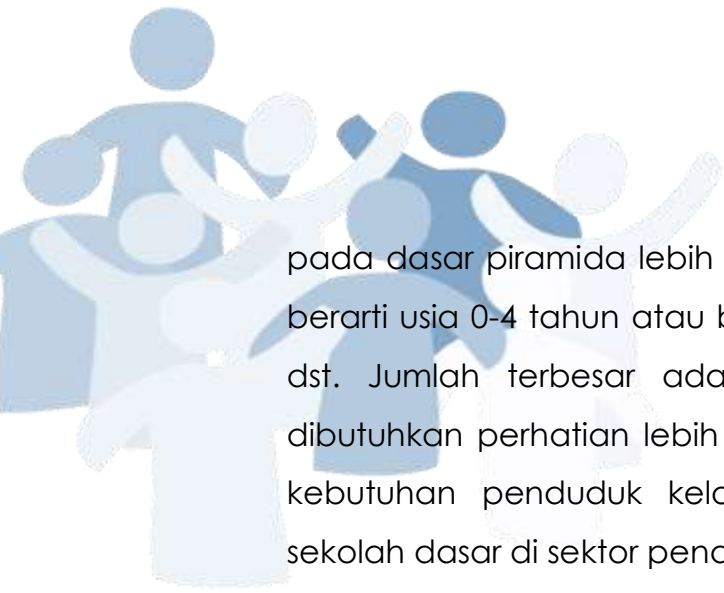
- 7) Perkiraan jumlah kelahiran di masa depan;
- 8) Perkiraan jumlah kematian yang akan terjadi, dsb.

Berikut gambaran piramida penduduk Kabupaten Bulungan berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin :

Tabel 3.4: Grafik Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur



Piramida penduduk Kabupaten Bulungan utara tahun 2020 berdasarkan komposisi penduduk umur dan jenis kelamin menunjukkan ciri Expansive yang artinya sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda dan umur produktif dibandingkan kelompok umur di atasnya dan Rapid Growth yang artinya persentase penduduk umur muda yang besar. Pada piramida penduduk di atas, terlihat bahwa jumlah penduduk kelompok umur 0-4 tahun yang terletak

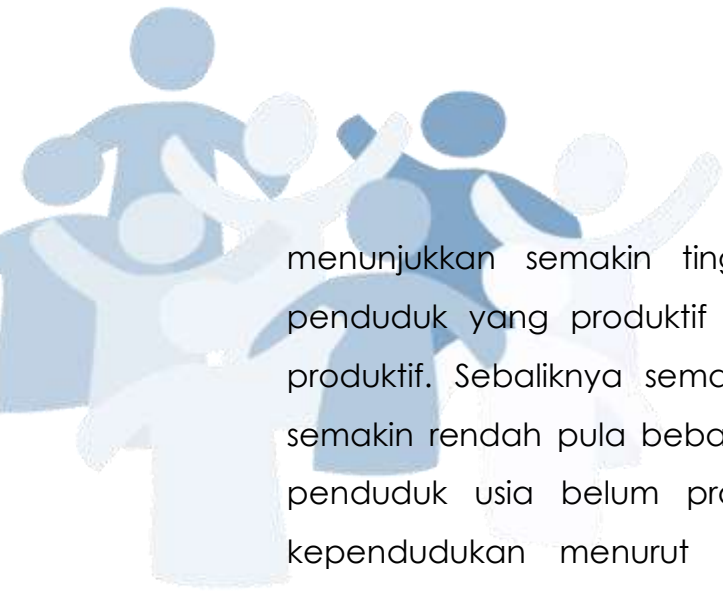


pada dasar piramida lebih kecil dari kelompok umur di atasnya yang berarti usia 0-4 tahun atau balita lebih sedikit daripada usia 5-9 tahun, dst. Jumlah terbesar adalah penduduk 5-9 tahun, yang berarti dibutuhkan perhatian lebih untuk mengakomodir pemenuhan segala kebutuhan penduduk kelompok umur ini contohnya penyediaan sekolah dasar di sektor pendidikan.

Selanjutnya ukuran untuk menyatakan "tua-muda" suatu penduduk dapat dilihat dari umur median penduduk tersebut. Umur median adalah umur yang membagi jumlah penduduk tepat menjadi dua bagian yang sama jumlahnya, bagian yang pertama lebih muda dan bagian yang kedua lebih tua daripada umur median. Umur median digunakan untuk mengukur tingkat pemusatan penduduk pada kelompok-kelompok umur tertentu. Penduduk Kabupaten Bulungan termasuk dalam kategori penduduk Intermediate. Setelah dihitung umur median penduduk Kabupaten Bulungan tahun 2020 adalah 29,45 tahun, yang berarti setengah penduduk Kabupaten Bulungan pada tahun 2022 berusia di bawah 29 tahun dan setengahnya lagi berusia lebih tua dari 29. Dengan kata lain, penduduk Kabupaten Bulungan dikategorikan sebagai penduduk dewasa.

4. Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio)

Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator kasar yang menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif (umur 15-64 tahun) dan usia non-produktif (umur 0-14 tahun ditambah umur 65 tahun ke atas). Rasio ini digunakan untuk melihat seberapa besar beban tanggungan yang harus ditanggung oleh penduduk produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan



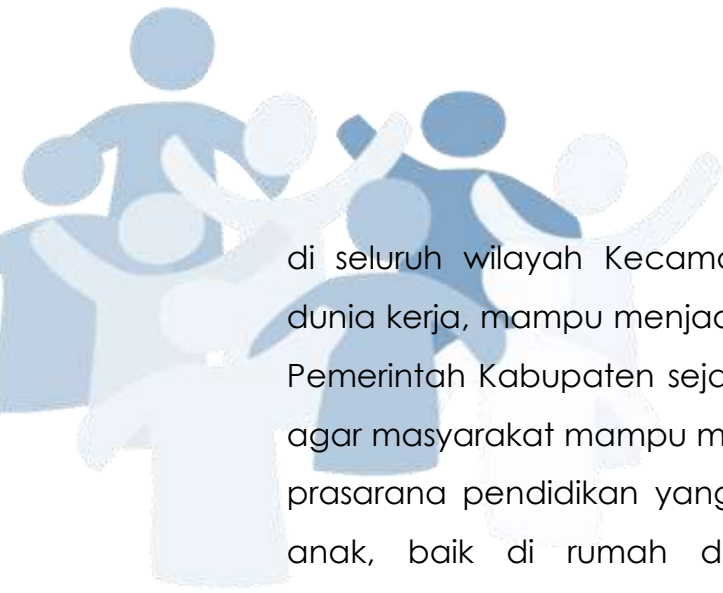
menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk non-produktif. Sebaliknya semakin rendah rasio ketergantungan, maka semakin rendah pula beban kelompok produktif untuk menanggung penduduk usia belum produktif dan atau tidak produktif. Data kependudukan menurut kelompok produktif dan jenis kelamin Kabupaten Bulungan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15: Tabel Rasio Ketergantungan

Kelompok Umur	laki-laki		perempuan		Total	
	jumlah	%	jumlah	%	jumlah	%
<14	23.647	27,54	20.354	26,90	42.543	27,23
15-64	58.596	68,24	52.098	68,90	104.580	68,53
>65	3.625	4,22	3.217	4,25	6.435	4,23
Jumlah	85.868	100,00	75.669	100,00	161.573	100,00

Jika melihat tabel di atas dapat dianalisa bahwa hampir tiga perempatnya merupakan penduduk usia produktif yaitu pada kelompok umur 15-64 tahun yang berjumlah 104.580 jiwa (68,53 %). Demikian pula dengan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, nampak bahwa penduduk laki-laki dan perempuan yang terbesar berada pada kelompok umur 15-64 tahun. Kondisi ini sangat menguntungkan karena sebagian besar penduduk merupakan penduduk usia kerja (usia produktif) yang berpotensi sebagai modal pembangunan dan sisanya sebanyak 42.543 jiwa (27,23 %) merupakan penduduk usia muda (berusia dibawah 15 tahun) serta 6.435 jiwa (4,23%) merupakan penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas).

Penduduk usia kurang dari 15 tahun harus mendapat perhatian karena 5 tahun mendatang kelompok ini akan menjadi tenaga kerja baru yang memerlukan skill dan kualitas SDM yang memadai. Karena itu diperlukan dukungan sektor pendidikan atau pelatihan dengan fasilitas yang baik serta lingkungan yang mendukung serta menyebar



di seluruh wilayah Kecamatan. Sehingga ketika mereka memasuki dunia kerja, mampu menjadi tenaga kerja yang profesional. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten sejak dini harus mendorong sebuah kebijakan agar masyarakat mampu mendapatkan asupan gizi yang baik, sarana prasarana pendidikan yang memadai serta lingkungan yang ramah anak, baik di rumah di sekolah maupun di tempat umum, menciptakan lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak dan lebih berkualitas. Jika melihat struktur umur penduduk Kabupaten Bulungan maka rasio ketergantungannya dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$DR = \frac{\text{Jumlah usia nonproduktif}}{\text{Usia produktif}} \times 100$$
$$DR = \frac{38.596 + 6.071}{95.066} \times 100$$
$$= 31,8$$

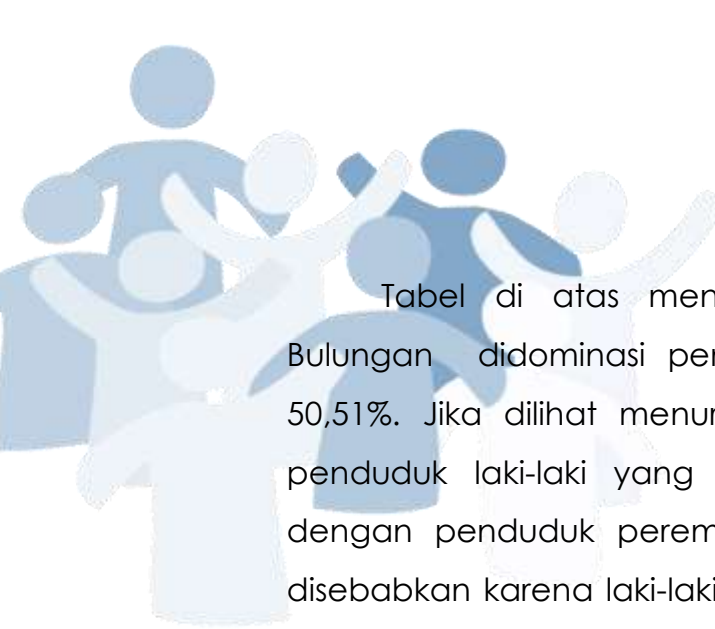
Hitungan diatas menunjukkan rasio ketergantungan Kabupaten Bulungan tahun 2020 sebesar 31,8 Angka ini menunjukkan dari 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Kabupaten Bulungan mempunyai tanggungan sekitar 31 penduduk usia non produktif.

5. Jumlah Penduduk Menurut Status Kawin

Jumlah penduduk jika dilihat menurut status perkawinan dapat dilihat pada tabel di bawah:

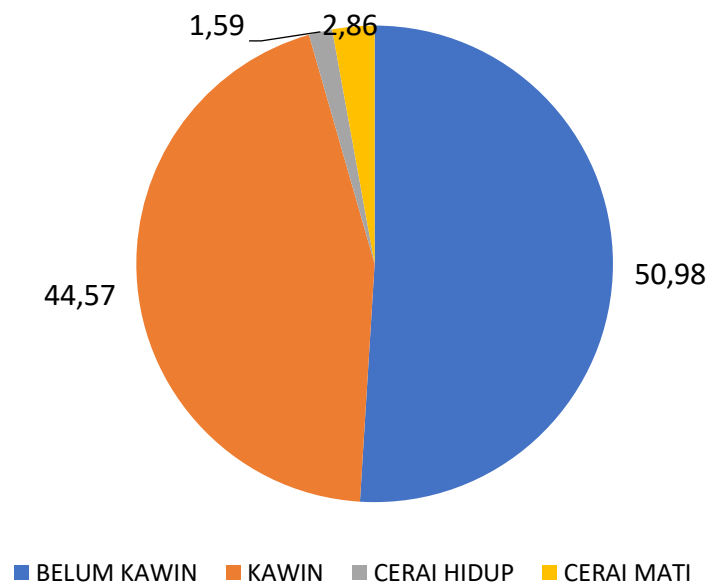
Tabel 3.16: Tabel Rasio Status Perkawinan

STATUS KAWIN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	PRESENTASE
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
BELUM KAWIN	46.731	35.643	82.374	50,98
KAWIN	36.172	35.841	72.013	44,57
CERAI HIDUP	1.209	1.359	2.568	1,59
CERAI MATI	1.001	3.617	4.618	2,86
TOTAL	85.113	76.460	161.573	100,00

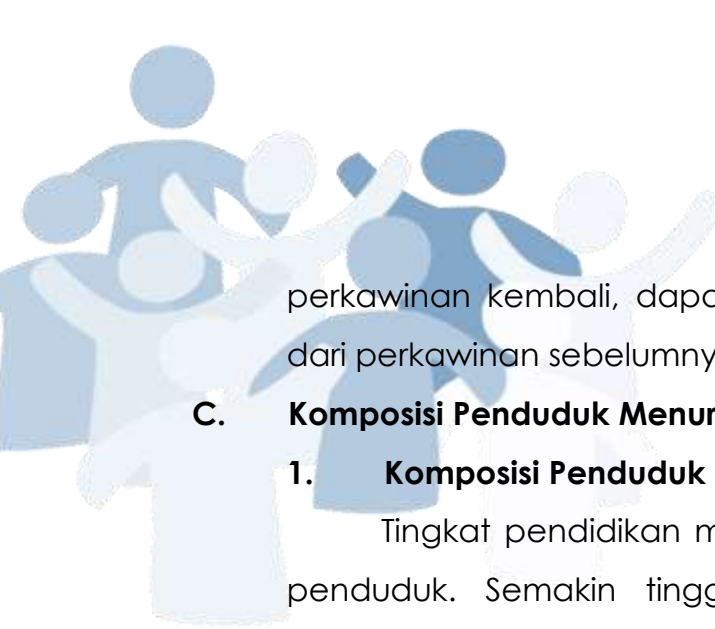


Tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Bulungan didominasi penduduk berstatus Belum Kawin sebanyak 50,51%. Jika dilihat menurut Jenis kelamin terlihat bahwa proporsi penduduk laki-laki yang belum kawin lebih besar dibandingkan dengan penduduk perempuan yang belum kawin. Hal ini dapat disebabkan karena laki-laki cenderung meneruskan pendidikan dan / atau baru mulai bekerja untuk dapat membiayai pernikahannya sehingga menunda perkawinan dan juga dapat disebabkan laki-laki yang nantinya akan menjadi kepala rumah tangga berkeinginan untuk hidup mapan secara ekonomi sebelum memasuki kehidupan berumah tangga demi memenuhi kebutuhan keluarga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram dibawah ini :

Grafik 3.5: Rasio Status Perkawinan



Proporsi penduduk dengan status cerai hidup dan cerai mati lebih tinggi pada perempuan dibandingkan penduduk laki-laki. Pada beberapa kasus hal ini dapat disebabkan karena perempuan memiliki lebih banyak pertimbangan untuk menikah kembali khususnya pada perempuan yang mandiri secara ekonomi sehingga menunda



perkawinan kembali, dapat pula disebabkan masih adanya trauma dari perkawinan sebelumnya.

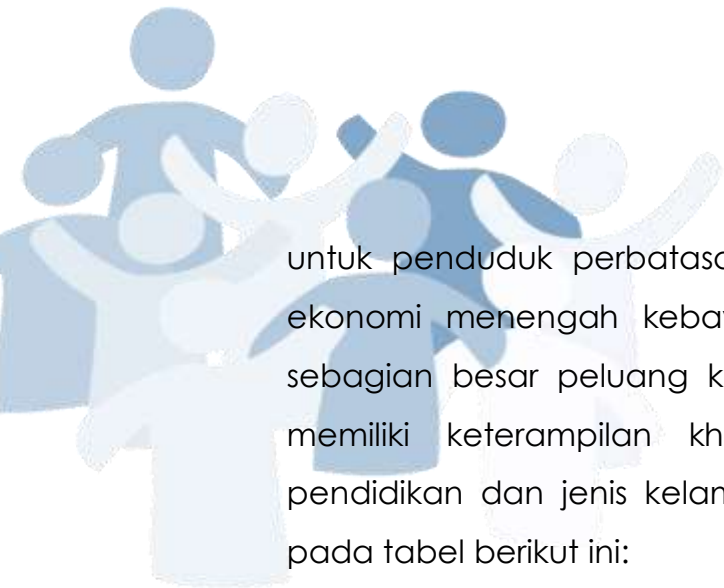
C. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial

1. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir

Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang diselesaikan semakin baik kualitas SDM di wilayah tersebut. Namun ukuran ini masih harus ditambah dengan etos kerja dan keterampilan baik hard skill maupun soft skill. Beberapa pelaku usaha menyatakan bahwa yang dibutuhkan tidak saja keterampilan tetapi juga attitude (sikap perilaku/kepribadian), karena kepribadian dapat mencerminkan etos kerja dan untuk meningkatkan kepribadian membutuhkan waktu yang relatif lama, sedangkan keterampilan dapat ditingkatkan melalui bimbingan dan pelatihan.

Tamat belajar/pendidikan didefinisikan sebagai jenjang pendidikan yang telah berhasil diselesaikan oleh seseorang dengan dibuktikan adanya ijazah atau surat tanda tamat belajar. Jenjang pendidikan tertinggi merupakan jenjang atau kelas pendidikan tertinggi yang pernah diselesaikan oleh seseorang. Pemerintah Kabupaten Bulungan perlu memperhatikan kondisi saat ini mengingat bahwa era revolusi industri 4.0 telah berlangsung dan persaingan yang ketat untuk memperoleh pekerjaan di Indonesia.

Perlunya peningkatan pendidikan misalnya program 1 Sarjana 1 KK untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan eksplorasi terhadap pekerjaan baik menciptakan lapangan pekerjaan maupun sebagai tenaga kerja yang berkualitas, penilaian terhadap kemampuan diri yang dikaitkan dengan masalah pekerjaan, perencanaan pekerjaan, pengambilan keputusan dalam pemilihan pekerjaan. Peningkatan akses kependidikan yang merata terutama

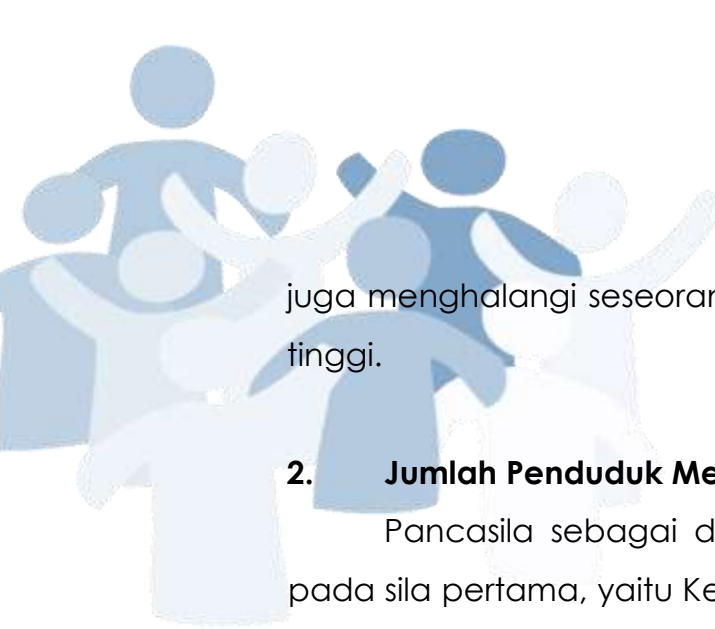


untuk penduduk perbatasan, 3T (tertinggal, terpencil, terluar) serta ekonomi menengah kebawah perlu dilakukan mengingat bahwa sebagian besar peluang kerja membutuhkan tenaga terdidik yang memiliki keterampilan khusus. Untuk data penduduk menurut pendidikan dan jenis kelamin di Kabupaten Bulungan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.17: Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir

PENDIDIKAN	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	n	%	n	%	n	%
BELUM SEKOLAH	28.178	33,11	26.443	34,58	54.621	33,81
TIDAK TAMAT SD	11.136	13,08	9.901	12,95	21.037	13,02
TAMAT SD	13.992	16,44	12.838	16,79	26.830	16,61
SLTP	9.667	11,36	8.882	11,62	18.549	11,48
SLTA	15.990	18,79	11.986	15,68	27.976	17,31
DIPLOMA 2	331	0,39	387	0,51	718	0,44
DIPLOMA 3	830	0,98	1.427	1,87	2.257	1,40
STRATA 1	4.586	5,39	4.450	5,82	9.036	5,59
STRATA 2	391	0,46	145	0,19	536	0,33
STRATA 3	12	0,01	1	0,00	13	0,01
JUMLAH	85.113	100,00	76.460	100,00	161.573	100,00

Dengan melihat jumlah komposisi penduduk yang memiliki pendidikan SLTA / Sederajat keatas tentunya akan berpengaruh terhadap tingkat perekonomian dan kesejahteraan karena pendidikan formal yang ditamatkan cukup berpengaruh terhadap penghasilan yang diperoleh. Artinya, penduduk yang tingkat pendidikannya rendah tidak akan terserap oleh pasar tenaga kerja, akan menjadi pengangguran, sehingga menambah pula jumlah penduduk miskin. Keterkaitan tingkat pendidikan dengan kemiskinan sangat besar, karena pendidikan memberikan kesempatan terhadap individu untuk berkembang melalui ilmu pengetahuan dan keterampilan. Kemiskinan muncul karena sumber daya manusia yang rendah, dan kemiskinan



juga menghalangi seseorang untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi.

2. Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan

Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pada sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, dan dalam Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 dinyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya”, memberikan jaminan kepada seluruh warga negaranya untuk melaksanakan ibadah atau ritual agamanya. Agama di sini meliputi seluruh sistem kepercayaan, baik agama-agama samawi monotheis, polytheis, maupun agama-agama yang bersumber dari adat istiadat atau kepercayaan leluhur.

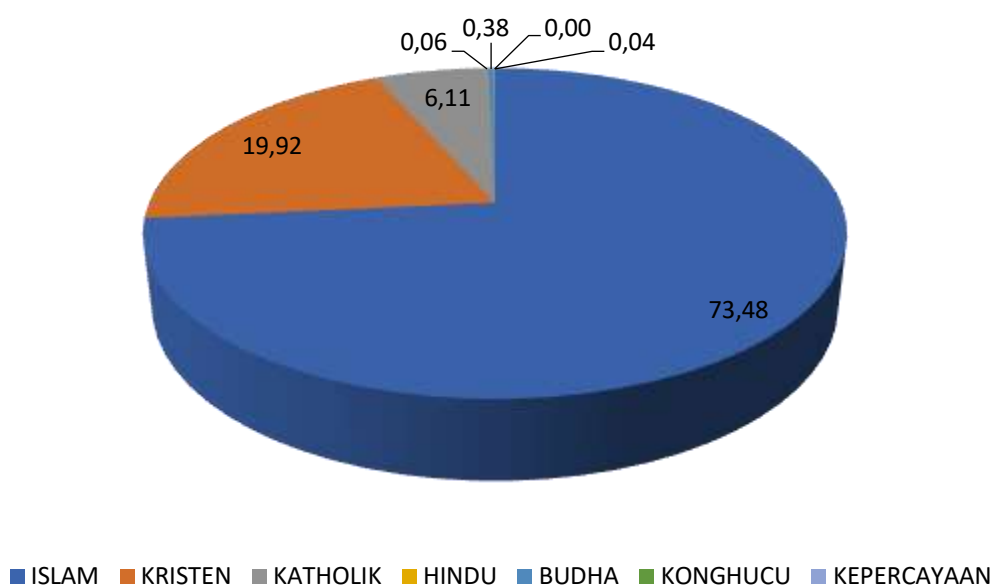
Kemudian dalam hal kebijakan bidang keberagamaan, data penduduk berdasarkan agama yang dianut dapat menjadi acuan pemerintah untuk mengambil kebijakan terkait dengan kebebasan dan toleransi kehidupan beragama, dan perencanaan sarana dan prasarana peribadatan. Data agama penduduk dibagi tiap jenis kelamin dan setiap kabupaten/kota di Kabupaten Bulungan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.18: Jumlah Pemeluk Agama/Kepercayaan

AGAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PRESENTASE (%)
ISLAM	62.217	56.513	118.730	73,48
KRISTEN	17.217	14.970	32.187	19,92
KATHOLIK	5.272	4.601	9.873	6,11
HINDU	60	37	97	0,06
BUDHA	308	302	610	0,38
KONGHUCU	2	4	6	0,00
KEPERCAYAAN	37	33	70	0,04
JUMLAH	85.113	76.460	161.573	100,00

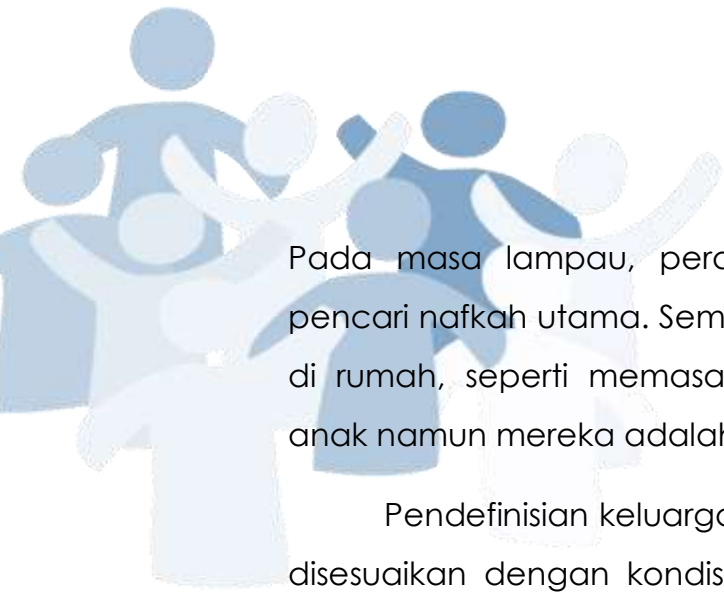
Dilihat dari tabel diatas penduduk Kabupaten Bulungan didominasi pemeluk agama Islam sebesar 153.558 jiwa (73,56%) disusul kemudian pemeluk agama Kristen sebesar 30.906 jiwa (20,12%) dan Katholik 8.986 jiwa (5,85%) sedangkan Hindu, Budha dan Konghucu serta aliran Kepercayaan masih sangat sedikit dibawah 1%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut :

Grafik 3.6: Jumlah Pemeluk Agama / Kepercayaan



3. Jumlah Rata-Rata Anggota Keluarga

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 1988, mendefinisikan keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul, serta tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Definisi ini digunakan pada pengajaran di sekolah-sekolah, seperti yang terdapat pada salah satu modul pengajaran sosiologi yang menjelaskan bahwa keluarga adalah kelompok sosial terkecil dalam masyarakat, yang terdiri dari orang tua (ayah dan ibu) serta anak. Modul tersebut juga menyebutkan bahwa setiap anggota dalam keluarga memiliki peranan yang berbeda.



Pada masa lampau, peran ayah seringkali diasosiasikan sebagai pencari nafkah utama. Sementara itu, ibu mengurus semua kebutuhan di rumah, seperti memasak, membersihkan rumah, dan mengasuh anak namun mereka adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pendefinisian keluarga oleh pemerintah pada masa itu tentunya disesuaikan dengan kondisi riil yang banyak ditemui di masyarakat. Pada akhir tahun 1980-an, keluarga ideal adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, nenek, kakek, paman, bibi, dan anak. Tiap anggota keluarga tersebut memiliki peran yang berbeda-beda namun saling melengkapi. Situasi tersebut menunjukkan bagaimana pemerintah memiliki kontrol yang kuat terhadap masyarakat pada masa itu, baik melalui media maupun pendidikan. Hal ini tidak mengherankan sebab pembatasan jumlah anak menjadi salah satu prioritas pembangunan utama oleh pemerintah masa itu. Sebagai konsekuensinya, definisi keluarga pun mengikuti arah pembangunan tersebut.

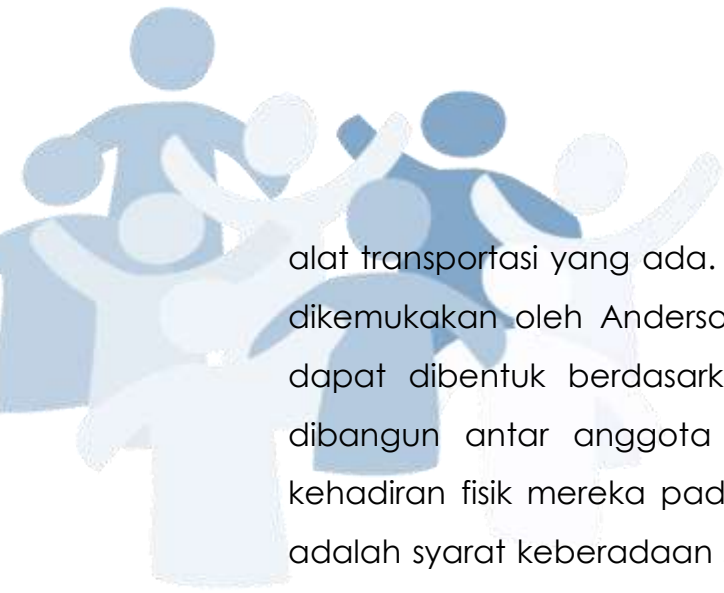
Definisi lain dari keluarga adalah ia merupakan unit terkecil dari masyarakat dalam sistem sosial sebagai tempat untuk belajar bersosialisasi, artinya proses belajar bagi individu menempatkan diri dalam masyarakat dan kelompok sosialnya. Keluarga merupakan embrio atau miniatur berbagai unsur sistem sosial manusia. Oleh karena itu, kondisi keluarga dapat mempengaruhi kualitas sebuah masyarakat. Dalam UU Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga disebutkan bahwa pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Unit keluarga menjadi hal penting untuk berbagai intervensi seperti penanganan kemiskinan, keluarga berencana, kesehatan dan lain sebagainya.



Keluarga terbagi menjadi dua yaitu keluarga inti/batih (nuclear family) dan keluarga luas (extended family). Nuclear family adalah keluarga inti atau keluarga dasar yaitu istilah yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah keluarga, kelompok yang terdiri dari sepasang orang dewasa dan anak-anak mereka. Extended family adalah keluarga diluar keluarga inti, yang terdiri dari kakek-nenek, bibi, paman, dan sepupu semua yang tinggal didekatnya atau di rumah yang sama. Besarnya jumlah anggota keluarga dapat digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan keluarga, dimana semakin kecil jumlah anggota keluarga relatif diasumsikan akan semakin tinggi tingkat kesejahteraannya namun setiap keluarga berbeda-beda.

Jika melihat realitas sosial saat ini, beberapa definisi keluarga di atas, ada yang masih relevan dan ada pula yang sudah tidak relevan lagi. Persyaratan yang masih relevan adalah adanya syarat perkawinan, hubungan darah, atau pun adopsi. Syarat lain yang masih relevan adalah fungsi keluarga sebagai penerus kebudayaan. Hal ini tercermin dalam pengalaman sehari-hari ketika generasi muda lebih banyak belajar dari keluarga mengenai masakan, bahasa, silsilah keluarga, ataupun cara berinteraksi dibandingkan dari pihak lain selain keluarga. Ikatan kekeluargaan yang masih sangat kuat di Indonesia menjadi dasar argumen relevansi syarat ini.

Namun, terdapat pula beberapa syarat yang sudah tidak relevan lagi. Pertama, adanya syarat seluruh anggota keluarga tinggal di bawah satu atap yang sama. Sekarang ini, banyak pasangan yang harus hidup terpisah ataupun banyak orang tua yang tinggal berjauhan dengan anak mereka karena alasan pekerjaan, studi maupun alasan lainnya. Jarak tidak lagi menjadi alasan terbentuknya keluarga yang utuh karena semakin variatifnya media komunikasi dan



alat transportasi yang ada. Seperti konsep *imagined community* yang dikemukakan oleh Anderson (1991), konsep keluarga masa kini pun dapat dibentuk berdasarkan imajinasi dan ikatan perasaan yang dibangun antar anggota dalam keluarga itu tanpa mewajibkan kehadiran fisik mereka pada tempat dan waktu yang sama. Kedua, adalah syarat keberadaan suami sebagai kepala keluarga dan peran anggota keluarga yang sangat deterministik. Sekarang ini, peran masing-masing anggota dalam keluarga tidak lagi bersifat patron-klien seperti masa sebelumnya. Ibu dapat menjadi kepala keluarga, anak perempuan dapat berfungsi sebagai pencari nafkah utama, dan ayah sebagai pengurus rumah tangga di rumah. Meskipun masih banyak masyarakat yang menyangkal, tetapi keberadaan situasi keluarga seperti ini tidak dapat dipungkiri dapat dijumpai di Indonesia.

Dengan kondisi seperti diuraikan di atas, kepemilikan Kartu Keluarga (KK) menjadi sangat penting. KK merupakan kartu identitas bagi sebuah keluarga yang memuat berbagai data penting, seperti nama, susunan anggota keluarga, hubungan, pekerjaan setiap anggota keluarga, dan berbagai informasi penting lainnya. Dalam penggunaannya, kartu keluarga akan sering dipakai sebagai salah satu persyaratan utama dalam pengurusan administrasi dan juga berbagai dokumen penting. Misalnya, pembuatan akta kelahiran bagi anak, pendaftaran anak masuk sekolah, penggantian KTP, dan berbagai urusan perbankan juga akan membutuhkan kartu keluarga sebagai persyaratannya.

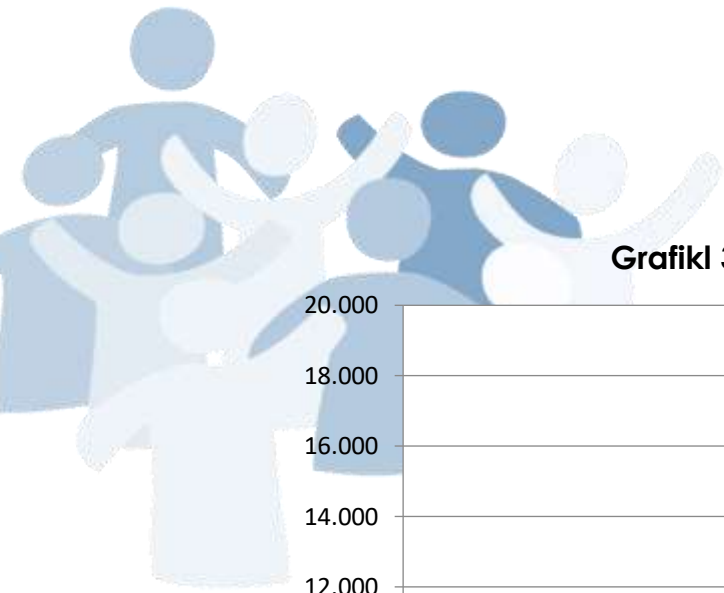


Tabel 3.19: Jumlah Rata-rata Keluarga

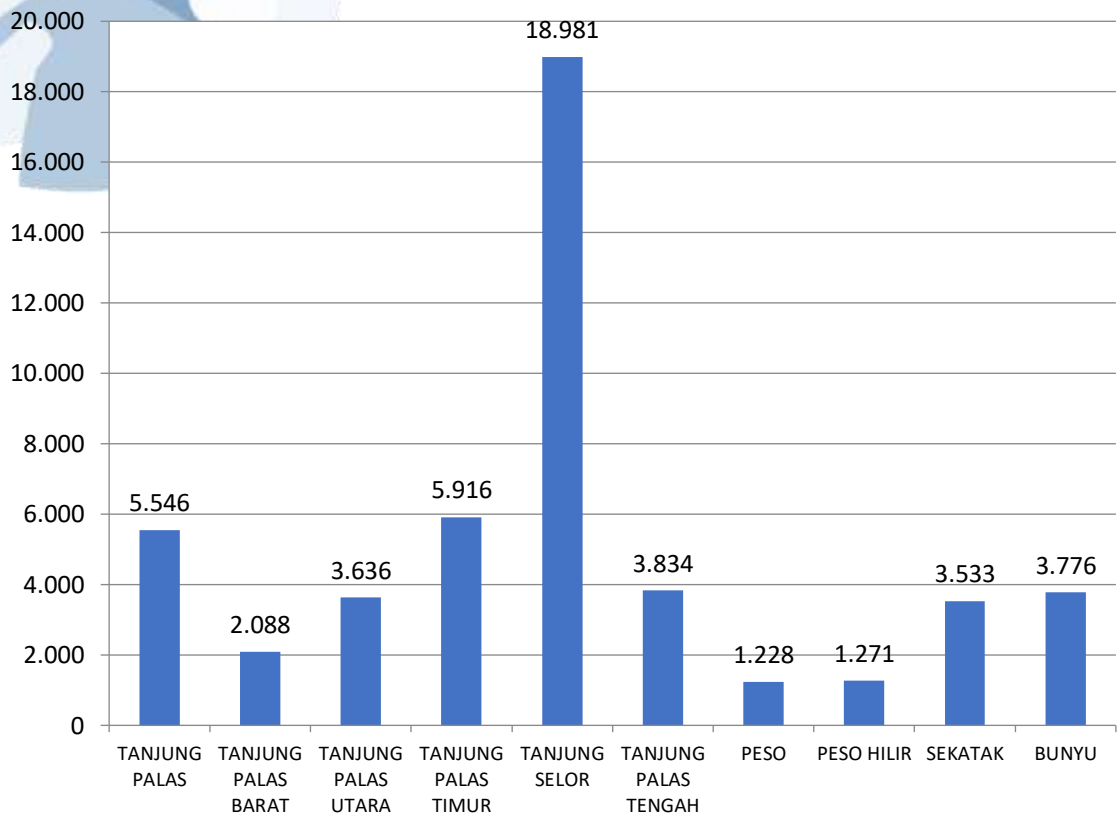
NO	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA	PENDUDUK	RATA – RATA JUMLAH ANGGOTA KELUARGA
1	TANJUNG PALAS	5.546	18.187	3,05
2	TANJUNG PALAS BARAT	2.088	6.918	3,02
3	TANJUNG PALAS UTARA	3.636	11.559	3,15
4	TANJUNG PALAS TIMUR	5.916	19.204	3,08
5	TANJUNG SELOR	18.981	61.203	3,10
6	TANJUNG PALAS TENGAH	3.834	12.530	3,06
7	PESO	1.228	4.287	2,86
8	PESO HILIR	1.271	4.216	3,01
9	SEKATAK	3.533	11.647	3,03
10	BUNYU	3.776	11.822	3,19
	JUMLAH	49.809	161.573	3,08

Dilihat dari tabel di atas jumlah keluarga di Kabupaten Bulungan sebanyak 46.550 keluarga yang tersebar di 10 Kecamatan. Kecamatan Tanjung Selor sebesar 17.802 keluarga, selanjutnya Kecamatan Tanjung Palas memiliki 5.375 keluarga, dan selanjutnya Kecamatan Tanjung Palas Timur sebanyak 5.198 keluarga dan jumlah keluarga terkecil berada di Kecamatan Peso Hilir yaitu 1.230 keluarga.

Sedangkan rata-rata jumlah anggota keluarga di Kabupaten Bulungan sebesar 3,3%. Kecamatan Peso memiliki rata-rata jumlah anggota keluarga tertinggi sebesar 3,57% disusul Kecamatan Sekatak sebesar 3,44%, Kecamatan Tanjung Palas Barat 3,34% dan terkecil Kecamatan Bumyu sebesar 3,19%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :



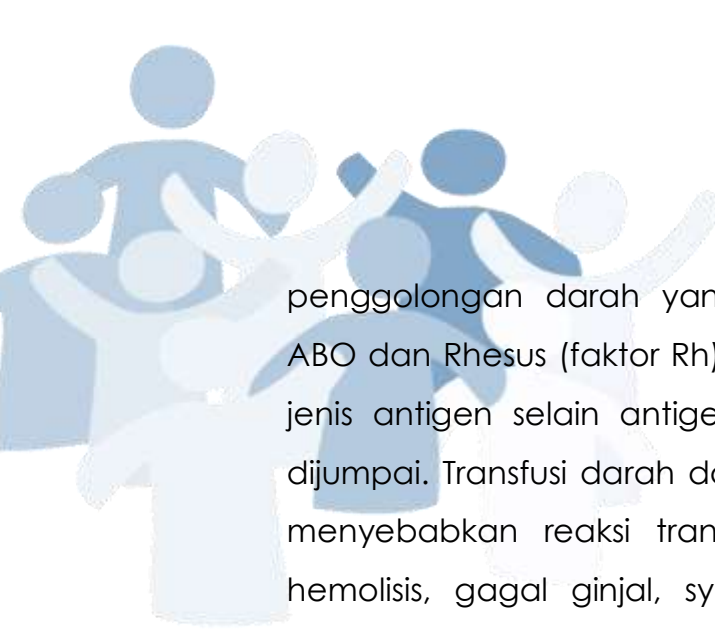
Grafikl 3.7: Jumlah Kepala Keluarga



Informasi tentang rata-rata jumlah anggota keluarga ini dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan program keluarga berencana di wilayah Kabupaten Bulungan dan dapat digunakan di Kecamatan dalam merencanakan kebutuhan perumahan, seperti untuk menentukan ukuran rumah dengan berbagai tipe agar dapat memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat yang keluarganya beranggotakan 4 orang.

5. Golongan Darah

Golongan darah adalah ilmu pengklasifikasian darah dari suatu kelompok berdasarkan ada atau tidak adanya zat antigen warisan pada permukaan membran sel darah merah. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan jenis karbohidrat dan protein pada permukaan membran sel darah merah tersebut. Dua jenis



penggolongan darah yang paling penting adalah penggolongan ABO dan Rhesus (faktor Rh). Di dunia ini sebenarnya dikenal sekitar 46 jenis antigen selain antigen ABO dan Rh, hanya saja lebih jarang dijumpai. Transfusi darah dari golongan yang tidak kompatibel dapat menyebabkan reaksi transfusi imunologis yang berakibat anemia hemolisis, gagal ginjal, syok, dan kematian. Ilmuwan Austria, Karl Landsteiner, memperoleh penghargaan Nobel dalam bidang Fisiologi dan Kedokteran pada tahun 1930 untuk jasanya menemukan cara penggolongan darah ABO. Jan Janskydi pada tahun 1907 mengklasifikasikan darah manusia ke dalam empat grup, yang hingga kini masih digunakan. Berikut tabel dan grafik jumlah penduduk berdasarkan golongan darah.

Tabel 3.20: Jumlah Penduduk Menurut Golongan Darah

NO	KECAMATAN	A	B	AB	O	A PLUS	A MIN	B PLUS	B MIN	AB PLUS	AB MIN	O PLUS	O MIN	TDK TAHU
1	TANJUNG PALAS	576	684	170	1508	19	3	21	0	15	4	17	14	15156
2	TANJUNG PALAS BARAT	213	164	34	416	4	1	8	0	3	0	7	5	6063
3	TANJUNG PALAS UTARA	346	393	163	753	34	1	47	0	7	1	19	14	9781
4	TANJUNG PALAS TIMUR	475	354	150	903	15	2	17	0	4	1	15	21	17247
5	TANJUNG SELOR	3148	3437	1028	6933	117	6	113	7	63	27	84	52	46188
6	TANJUNG PALAS TENGAH	420	408	148	828	89	0	105	1	33	1	89	16	10392
7	PESO	79	102	28	298	2	0	0	1	2	1	2	1	3771
8	PESO HILIR	110	103	25	312	5	0	1	0	0	0	12	2	3646
9	SEKATAK	166	129	48	402	17	3	13	0	4	4	8	7	10846
10	BUNYU	889	911	266	1812	18	1	6	2	9	6	11	6	7885



BAB IV KUALITAS PENDUDUK

Kualitas Penduduk merupakan kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak. Aspek-aspek tersebut merupakan Indikator Pembangunan Manusia (Human Development Index) dalam pemenuhan kesejahteraan. Kualitas Pendidikan penduduk dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang dihitung dari angka melek aksara/huruf dan jenjang pendidikan yang telah ditempuh, aspek kesehatan dihitung dari angka kematian bayi dan angka harapan hidup waktu lahir; dan aspek kesejahteraan dihitung dari penghasilan per kapita.

Permasalahan kualitas kependudukan di Indonesia masih berkulat pada soal sumber daya manusianya, karena rendahnya tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, hingga berakibat pada rendahnya kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya. BKKBN menyebutkan beberapa masalah kependudukan di Indonesia, yaitu:

1. Jumlah penduduk besar tetapi kualitas relatif rendah;
2. Laju pertumbuhan penduduk tinggi;
3. Fertilitas relatif tinggi dengan penyebaran yang tidak merata;
4. Angka kematian ibu dan anak tinggi, sedangkan angka harapan hidup relatif rendah;
5. Persebaran penduduk yang tidak merata.



A. Kesehatan

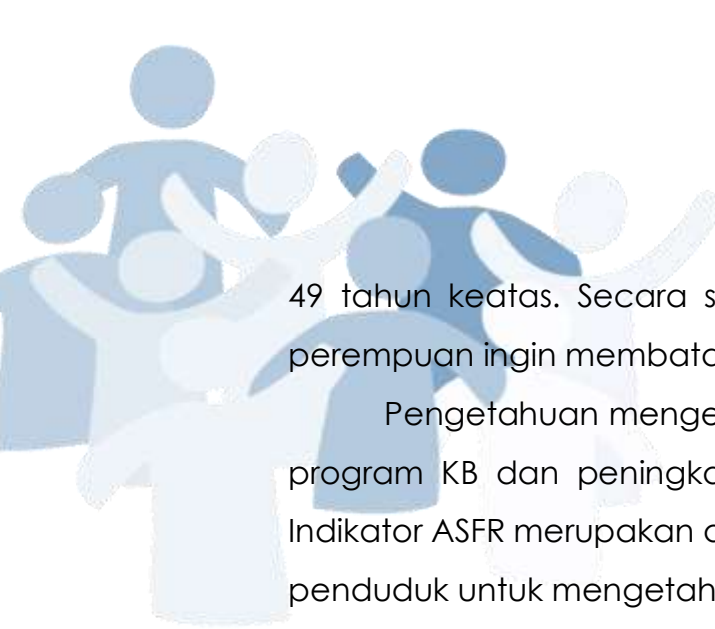
Kesehatan merupakan faktor terpenting yang dapat mempengaruhi kinerja dan produktivitas seseorang. Tinggi rendahnya tingkat kesehatan penduduk suatu daerah salah satunya dapat dilihat dari besarnya angka kematian bayi dan ibu saat melahirkan. Semakin rendah angka kematian bayi dan ibu saat melahirkan, berarti semakin baik tingkat kesehatan penduduk.

Rendahnya tingkat kesehatan suatu daerah, antara lain disebabkan oleh banyaknya lingkungan yang kotor dan sanitasi yang buruk, dan terbatasnya akses layanan kesehatan. Untuk meningkatkan tingkat kesehatan penduduk, pemerintah melakukan berbagai upaya di antaranya melaksanakan program perbaikan gizi khususnya untuk anak-anak balita, peningkatan kesadaran penduduk untuk berperilaku hidup sehat, penambahan sarana dan prasarana kesehatan juga diperlukan untuk meratakan pelayanan kesehatan di seluruh lapisan masyarakat, program penyediaan air bersih dan perbaikan sanitasi lingkungan, berupa pembangunan jamban keluarga, pembuatan sumur, penyediaan tempat pembuangan sampah, dan lain sebagainya.

Berikut ini adalah beberapa indikator untuk melihat kualitas penduduk :

1. **ASFR (Age Specific Fertility Rate)**

Age Specific Fertility Rate atau angka kelahiran menurut umur adalah banyaknya kelahiran selama setahun per 1000 wanita pada kelompok umur 15-49 tahun. Angka ini dapat digunakan untuk membedakan fertilitas menurut umur. ASFR merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari perempuan yang terpapar untuk melahirkan yaitu perempuan usia subur dengan memperhatikan karakteristik kelompok umurnya. Secara alamiah potensi fekunditas perempuan untuk melahirkan berbeda menurut umur dan relatif menjadi steril/tidak subur setelah menopause atau usia



49 tahun keatas. Secara sosial ada kecenderungan bahwa saat ini perempuan ingin membatasi jumlah anak setelah umur 35 tahun.

Pengetahuan mengenai ASFR akan berguna untuk pelaksanaan program KB dan peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Indikator ASFR merupakan data dasar untuk mengembangkan proyeksi penduduk untuk mengetahui jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin dimasa yang akan datang. Hasil proyeksi penduduk merupakan basis data untuk perencanaan pembangunan manusia di tahun-tahun mendatang.

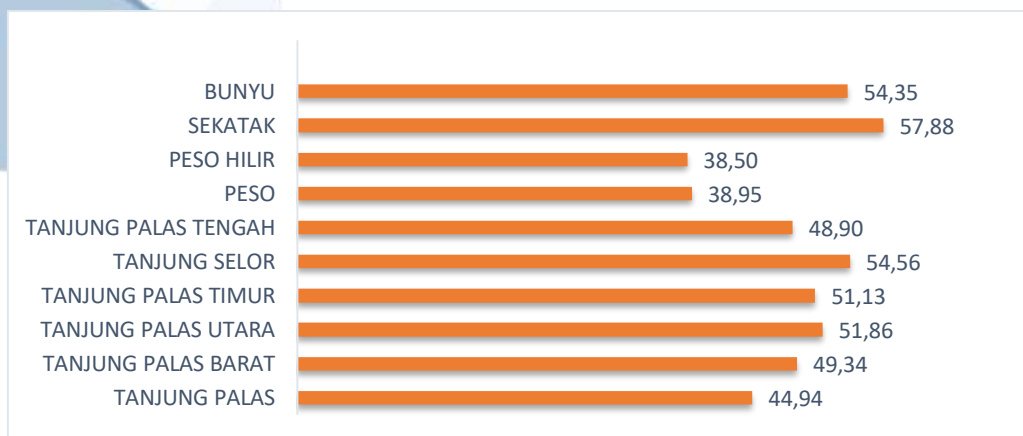
Tabel 4.1: Angka Kelahiran Menurut Usia

KECAMATAN	PEREMPUAN USIA (15-49)	ANGKA KELAHIRAN	ASFR
TANJUNG PALAS	4.473	201	44,94
TANJUNG PALAS BARAT	1.581	78	49,34
TANJUNG PALAS UTARA	2.738	142	51,86
TANJUNG PALAS TIMUR	4.557	233	51,13
TANJUNG SELOR	15.799	862	54,56
TANJUNG PALAS TENGAH	3.006	147	48,90
PESO	1.027	40	38,95
PESO HILIR	961	37	38,50
SEKATAK	2.799	162	57,88
BUNYU	2.668	145	54,35
JUMLAH	39.609	2.047	51,68

Dari Tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa ASFR di Kabupaten Bulungan sebesar 50 artinya dari 1.000 penduduk perempuan usia 15-49 tahun terjadi kelahiran 51 jiwa. Dari data ini dapat dilihat bahwa angka ASFR di Kabupaten Bulungan mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 50,12. Jika dilihat per Kecamatan nilai ASFR tertinggi adalah Kecamatan Sekatak sebesar 57,88 dan terendah adalah Kecamatan Peso Hilir sebesar 38,5 Namun seluruh Kecamatan mengalami kenaikan pada angka ASFR dibandingkan tahun sebelumnya.



Grafik 4.1: Angka Kelahiran Menurut Usia




2. Rasio Anak dan Perempuan (Child Women Ratio/CWR)

Rasio anak dan perempuan adalah perbandingan antara anak di bawah usia lima tahun dengan jumlah penduduk perempuan usia produktif (15-49 tahun) di suatu wilayah dan waktu tertentu. Rasio anak dan perempuan bisa digunakan untuk melihat jumlah kelahiran yang terjadi. Tabel data rasio anak dan perempuan di Kecamatan se-Kabupaten Bulungan yaitu:

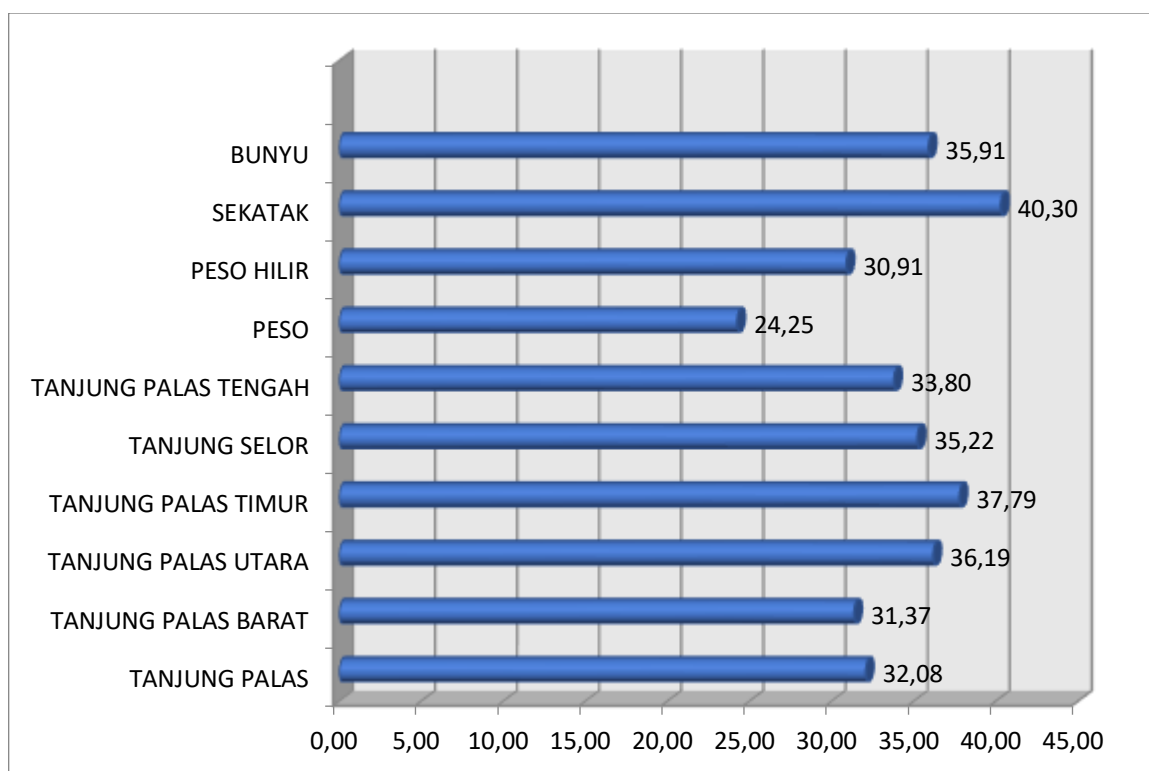
Tabel 4.2: Rasio Anak dan Perempuan

KECAMATAN	Jumlah Perempuan 15-49 (Jiwa)	Jumlah Penduduk 0-4 (Jiwa)	Rasio Anak dan Perempuan (CWR)
TANJUNG PALAS	4.473	1.435	32,08
TANJUNG PALAS BARAT	1.581	496	31,37
TANJUNG PALAS UTARA	2.738	991	36,19
TANJUNG PALAS TIMUR	4.557	1.722	37,79
TANJUNG SELOR	15.799	5.565	35,22
TANJUNG PALAS TENGAH	3.006	1.016	33,80
PESOO	1.027	249	24,25
PESO HILIR	961	297	30,91
SEKATAK	2.799	1.128	40,30
BUNYU	2.668	958	35,91
JUMLAH	39.609	13.857	34,98



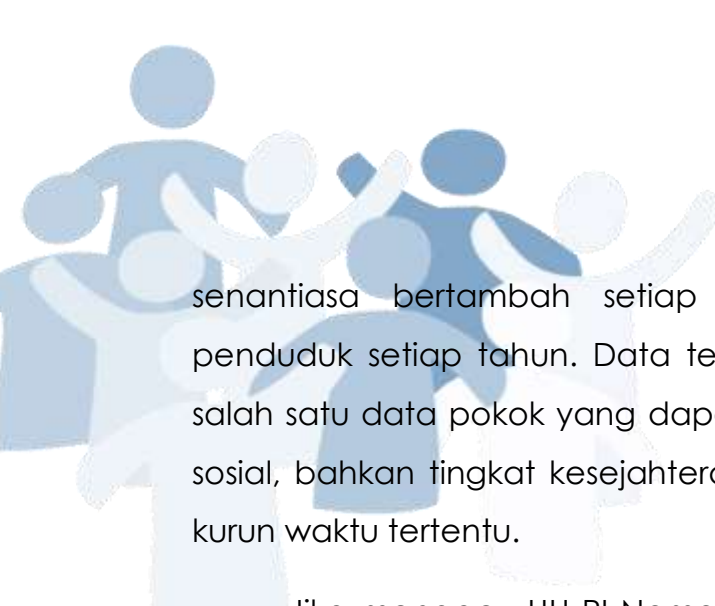
Pada tahun 2022, besarnya rasio anak dan perempuan di Kabupaten Bulungan sebesar 34,98 hal ini berarti bahwa diantara 100 perempuan usia produktif terdapat 30-35 balita. Tahun 2022 CWR tertinggi di Kecamatan Sekatak yaitu 40,3 disusul Kecamatan Tanjung Palas Timur sebesar 37,79; kemudian Kecamatan Tanjung Palas Utara 36,19. Angka CWR di Kabupaten Bulungan mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Grafik4.2: Rasio Anak dan Perempuan



B. Perekonomian

Dari sisi ekonomi salah satu faktor yang disajikan adalah informasi ketenagakerjaan. Pertumbuhan ekonomi seiring dengan penyerapan tenaga kerja atau dengan kata lain jika ada pertumbuhan ekonomi maka otomatis penyerapan pertumbuhan tenaga kerja juga ada. Ketersediaan lapangan kerja yang relatif terbatas, tidak mampu menyerap para pencari kerja yang



senantiasa bertambah setiap tahun seiring bertambahnya dinamika penduduk setiap tahun. Data tentang situasi ketenagakerjaan merupakan salah satu data pokok yang dapat menggambarkan kondisi perekonomian, sosial, bahkan tingkat kesejahteraan penduduk disuatu wilayah dan dalam kurun waktu tertentu.

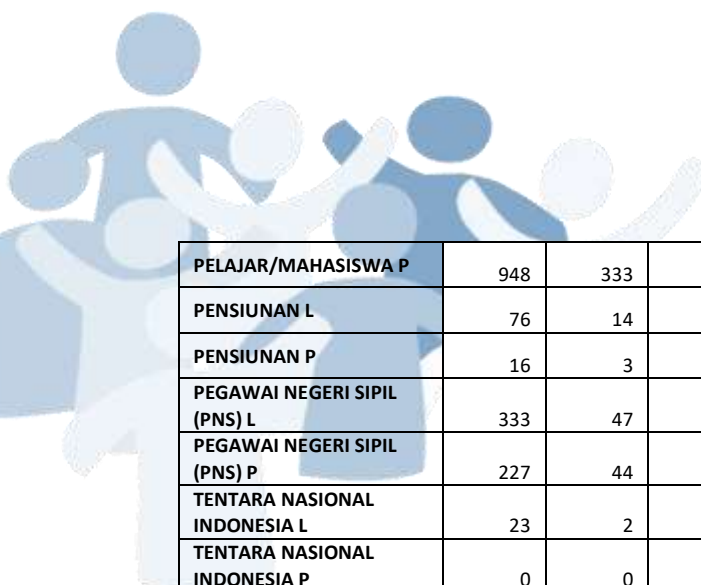
Jika mengacu UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, BAB I pasal 1 ayat 2 menyatakan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang / jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan definisi tenaga kerja menurut International Labour Organization (ILO) adalah penduduk usia kerja (penduduk berumur 15 tahun keatas) yang melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud untuk memperoleh uang / pendapatan atau membantu melakukan kegiatan ekonomi. Batasan ini sejalan dengan ketentuan perundangan, khususnya bidang ketenagakerjaan yang membatasi usia minimum pekerja adalah 15 tahun.

1. Proporsi Jenis Pekerjaan

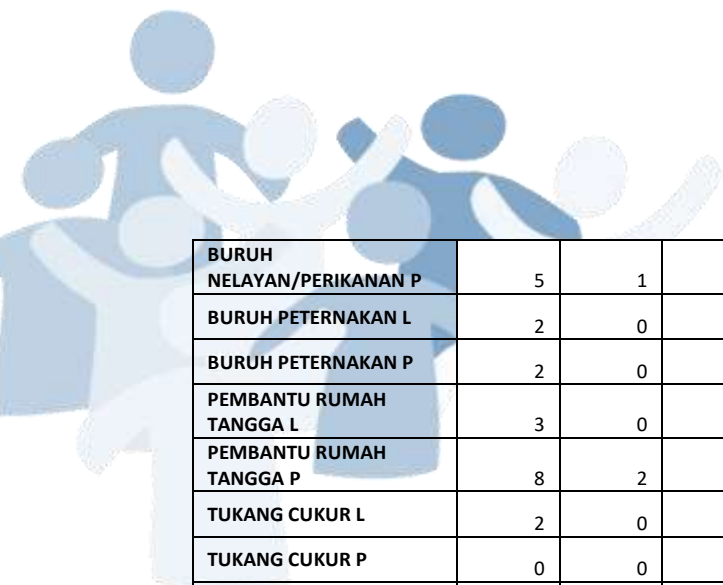
Data penduduk di Kabupaten Bulungan yang mempunyai jenis pekerjaan sesuai dengan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Tahun 20120 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.3: Jenis Pekerjaan Penduduk

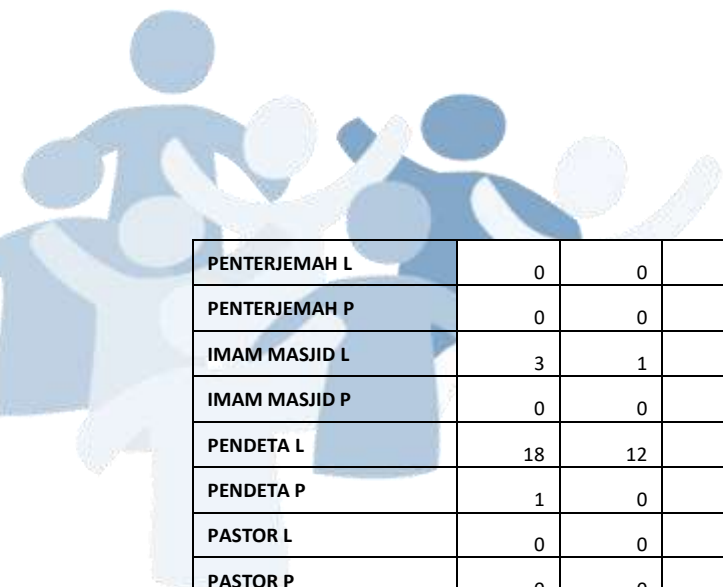
WILAYAH	TANJUNG PALAS	TANJUNG PALAS BARAT	TANJUNG PALAS UTARA	TANJUNG PALAS TIMUR	TANJUNG SELOR	TANJUNG PALAS TENGAH	PESO	PESO HILIR	SEKATAK	BUNYU
BELUM/TIDAK BEKERJA L	3.351	1.519	2.132	4.081	11.553	2.206	847	853	2.700	2.404
BELUM/TIDAK BEKERJA P	3.024	1.142	1.876	3.383	10.284	2.063	696	646	2.444	1.989
MENGURUS RUMAH TANGGA L	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
MENGURUS RUMAH TANGGA P	3.506	1.220	2.240	3.548	10.314	2.523	617	597	2.373	2.596
PELAJAR/MAHASISWA L	1.149	405	748	1.272	4.118	802	309	290	538	853



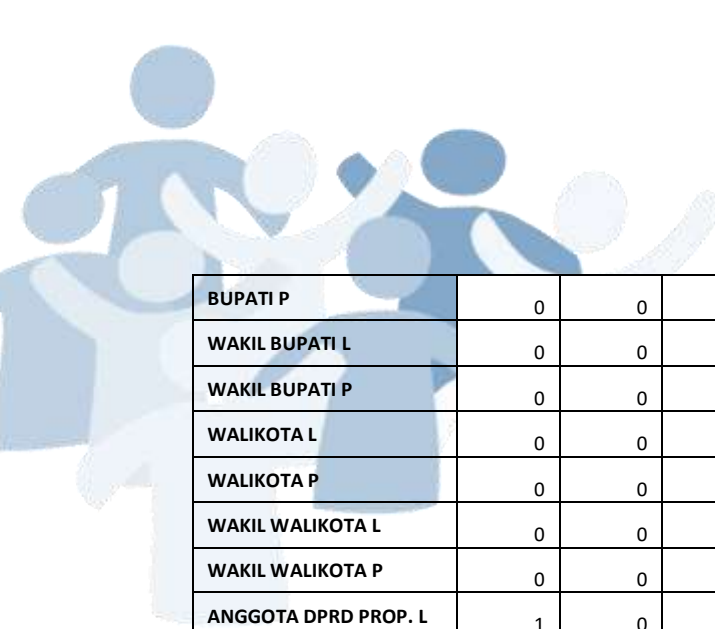
PELAJAR/MAHASISWA P	948	333	531	958	3.428	616	232	248	400	608
PENSIUNAN L	76	14	12	19	337	9	18	8	5	38
PENSIUNAN P	16	3	1	0	84	1	7	2	0	2
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) L	333	47	107	87	1.923	52	45	31	72	67
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) P	227	44	75	70	1.596	29	41	11	36	110
TENTARA NASIONAL INDONESIA L	23	2	6	3	602	0	3	0	2	3
TENTARA NASIONAL INDONESIA P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KEPOLISIAN RI (POLRI) L	52	7	9	10	619	9	3	4	8	21
KEPOLISIAN RI (POLRI) P	4	0	2	0	38	1	0	0	0	0
PERDAGANGAN L	46	6	17	11	197	3	4	4	10	10
PERDAGANGAN P	27	0	14	10	89	6	2	3	1	6
PETANI/PEKEBUN L	1.068	963	1.266	2.017	1.940	1.248	600	692	985	140
PETANI/PEKEBUN P	384	281	445	359	475	365	286	320	69	10
PETERNAK L	4	2	3	4	11	0	0	0	3	0
PETERNAK P	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0
NELAYAN/PERIKANAN L	879	34	100	812	1.419	1.295	4	3	506	311
NELAYAN/PERIKANAN P	0	0	0	2	4	2	0	0	3	0
INDUSTRI L	0	0	0	1	3	3	0	0	0	3
INDUSTRI P	0	0	0	0	3	1	0	1	1	2
KONSTRUKSI L	3	0	2	0	20	1	0	1	1	0
KONSTRUKSI P	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTASI L	45	1	16	18	39	4	2	1	16	2
TRANSPORTASI P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
KARYAWAN SWASTA L	744	269	608	710	2.884	313	178	181	385	1.709
KARYAWAN SWASTA P	146	24	80	143	791	62	29	27	60	100
KARYAWAN BUMN L	11	1	7	2	91	0	0	0	2	13
KARYAWAN BUMN P	4	0	0	0	50	0	0	0	0	0
KARYAWAN BUMD L	12	1	0	1	39	2	0	0	0	1
KARYAWAN BUMD P	4	1	1	1	33	0	0	0	0	0
KARYAWAN HONORER L	191	38	45	34	622	31	18	13	20	29
KARYAWAN HONORER P	107	26	48	61	518	44	6	18	18	29
BURUH HARIAN LEPAS L	268	56	159	138	757	72	51	29	110	227
BURUH HARIAN LEPAS P	12	3	14	7	35	7	2	6	12	8
BURUH TANI/PERKEBUNAN L	186	176	135	387	344	66	67	49	108	17
BURUH TANI/PERKEBUNAN P	34	44	55	64	60	26	23	29	10	1
BURUH NELAYAN/PERIKANAN L	153	5	22	54	91	75	0	0	27	25



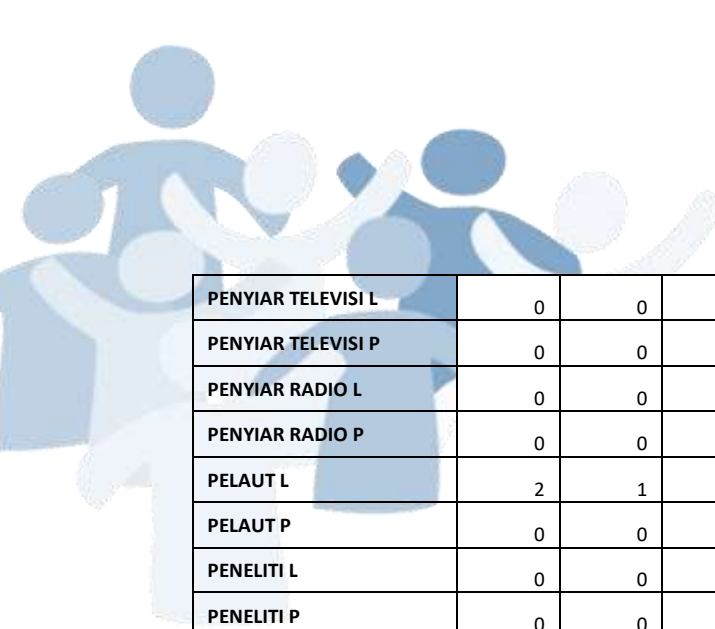
BURUH NELAYAN/PERIKANAN P	5	1	1	0	2	0	0	0	2	0
BURUH PETERNAKAN L	2	0	0	0	7	1	0	0	0	0
BURUH PETERNAKAN P	2	0	2	0	0	1	2	0	1	0
PEMBANTU RUMAH TANGGA L	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0
PEMBANTU RUMAH TANGGA P	8	2	7	3	17	1	0	2	6	5
TUKANG CUKUR L	2	0	0	1	5	0	0	0	0	0
TUKANG CUKUR P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUKANG LISTRIK L	0	1	0	0	9	0	1	0	1	1
TUKANG LISTRIK P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUKANG BATU L	25	0	10	6	55	4	0	2	4	1
TUKANG BATU P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUKANG KAYU L	39	6	18	16	95	8	7	2	20	9
TUKANG KAYU P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUKANG SOL SEPATU L	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
TUKANG SOL SEPATU P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUKANG LAS/PANDAI BESI L	6	1	2	2	10	1	1	1	1	4
TUKANG LAS/PANDAI BESI P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUKANG JAHIT L	4	1	1	3	17	2	0	0	1	1
TUKANG JAHIT P	2	0	2	3	15	1	1	0	0	1
TUKANG GIGI L	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
TUKANG GIGI P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PENATA RIAS L	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
PENATA RIAS P	2	1	0	0	3	0	0	0	0	1
PENATA BUSANA L	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
PENATA BUSANA P	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
PENATA RAMBUT L	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0
PENATA RAMBUT P	2	0	1	0	5	0	0	0	0	0
MEKANIK L	17	1	10	13	77	1	1	2	7	1
MEKANIK P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SENIMAN L	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0
SENIMAN P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TABIB L	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
TABIB P	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
PARAJI L	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
PARAJI P	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
PERANCANG BUSANA L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERANCANG BUSANA P	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0



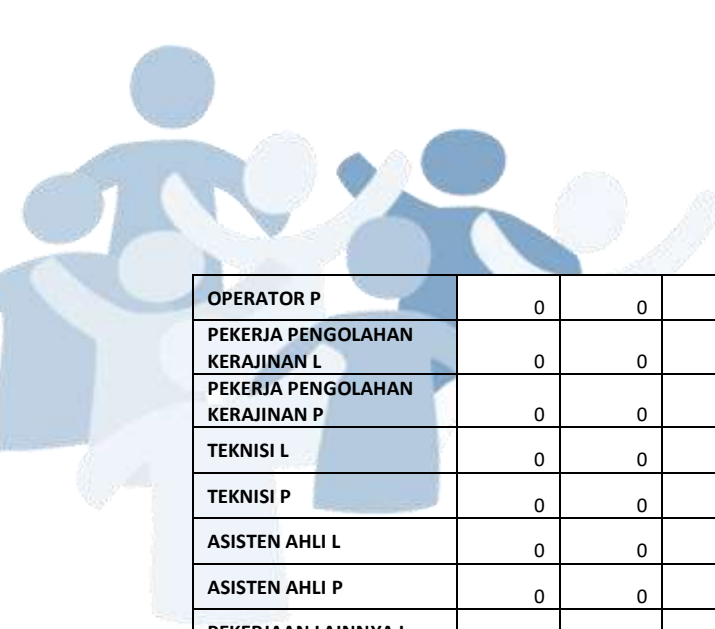
PENTERJEMAH L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PENTERJEMAH P	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
IMAM MASJID L	3	1	0	1	2	2	0	0	1	3
IMAM MASJID P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PENDETA L	18	12	10	22	53	5	14	8	6	4
PENDETA P	1	0	0	1	4	1	1	0	0	0
PASTOR L	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
PASTOR P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WARTAWAN L	1	0	0	1	9	1	0	0	0	0
WARTAWAN P	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
USTADZ/MUBALIGH L	5	0	1	4	7	0	0	0	2	2
USTADZ/MUBALIGH P	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1
JURU MASAK L	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
JURU MASAK P	1	0	0	0	12	0	0	0	0	0
PROMOTOR ACARA L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOTOR ACARA P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANGGOTA DPR RI L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANGGOTA DPR RI P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANGGOTA DPD RI L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANGGOTA DPD RI P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANGGOTA BPK L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANGGOTA BPK P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESIDEN L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESIDEN P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WAKIL PRESIDEN L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WAKIL PRESIDEN P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DUTA BESAR L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DUTA BESAR P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GUBERNUR L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GUBERNUR P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WAKIL GUBERNUR L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WAKIL GUBERNUR P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BUPATI L	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0



BUPATI P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WAKIL BUPATI L	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
WAKIL BUPATI P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WALIKOTA L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WALIKOTA P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WAKIL WALIKOTA L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WAKIL WALIKOTA P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANGGOTA DPRD PROP. L	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
ANGGOTA DPRD PROP. P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANGGOTA DPRD KAB./KOTA L	2	0	0	1	3	0	1	0	1	1
ANGGOTA DPRD KAB./KOTA P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSEN L	2	0	1	0	32	0	0	0	0	1
DOSEN P	0	0	0	0	22	0	0	0	0	1
GURU L	35	10	19	34	125	17	8	10	25	22
GURU P	56	15	32	37	254	28	17	8	36	57
PILOT L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PILOT P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PENGACARA L	0	0	0	1	5	1	0	0	0	0
PENGACARA P	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
NOTARIS L	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0
NOTARIS P	0	0	0	0	6	0	0	0	1	0
ARSITEK L	2	0	0	0	4	0	0	0	0	0
ARSITEK P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AKUNTAN L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AKUNTAN P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KONSULTAN L	2	0	1	0	24	1	0	0	1	0
KONSULTAN P	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
DOKTER L	1	0	0	2	26	0	0	0	0	0
DOKTER P	0	0	1	2	33	0	0	0	0	2
BIDAN L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIDAN P	11	1	7	5	73	7	4	4	4	5
PERAWAT L	11	3	4	7	40	3	5	2	6	2
PERAWAT P	15	5	10	7	101	1	3	2	5	11
APOTEKER L	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0
APOTEKER P	2	0	0	0	16	0	0	0	0	0
PSIKIATER/PSIKOLOG L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PSIKIATER/PSIKOLOG P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



PENYIAR TELEVISI L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PENYIAR TELEVISI P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PENYIAR RADIO L	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
PENYIAR RADIO P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PELAUT L	2	1	1	4	22	3	0	0	0	3
PELAUT P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PENELITI L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PENELITI P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOPIR L	30	2	39	50	237	10	1	5	17	9
SOPIR P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PIALANG L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PIALANG P	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
PARANORMAL L	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
PARANORMAL P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PEDAGANG L	28	3	29	7	198	8	1	1	10	8
PEDAGANG P	26	0	18	3	79	8	0	0	3	7
PERANGKAT DESA L	7	12	3	16	11	3	14	12	87	5
PERANGKAT DESA P	4	3	1	7	6	0	3	0	15	4
KEPALA DESA L	1	1	1	2	1	2	2	0	11	1
KEPALA DESA P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIARAWAN/BIARAWATI L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIARAWAN/BIARAWATI P	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0
WIRASWASTA L	604	143	475	586	3.232	344	88	76	404	253
WIRASWASTA P	148	22	74	89	770	120	22	12	44	60
ANGGOTA LEMB. TINGGI LAINNYA L	1	0	0	0	2	3	0	0	0	0
ANGGOTA LEMB. TINGGI LAINNYA P	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ARTIS L	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
ARTIS P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATLIT L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATLIT P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHEFF L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHEFF P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANAJER L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANAJER P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TENAGA TATA USAHA L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TENAGA TATA USAHA P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPERATOR L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



OPERATOR P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEKNISI L	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
TEKNISI P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASISTEN AHLI L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASISTEN AHLI P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PEKERJAAN LAINNYA L	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0
PEKERJAAN LAINNYA P	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

Tabel. 4.3 di atas menunjukkan penduduk yang bekerja berdasarkan jenis pekerjaan yang dilakukan dan tercatat di administrasi kependudukannya. Dari tabel tersebut terlihat 5 besar pekerjaan yang ada di Kabupaten Bulungan adalah petani/pekebun sebanyak 12.809 jiwa (9,51%), karyawan swasta sebanyak 9.368 jiwa (6,02%), wiraswasta sebanyak 7.576 jiwa (4,76%), Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 4.987 jiwa (3,28%) dan Nelayan/Perikanan sebanyak 5.374 jiwa (2,07%).

Jika merujuk tabel di atas juga terlihat bahwa sektor swasta banyak memberikan lapangan kerja dan sektor wiraswasta merupakan salah satu pilihan utama bagi penduduk untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi. Begitu pula sektor pertanian dan perikanan masih memberikan peluang pekerjaan yang banyak dan kedepan dapat lebih dimaksimalkan dengan melihat masih besarnya potensi ekonomi yang dapat dijadikan sumber penghasilan bagi penduduk Kabupaten Bulungan. Selain itu angka Pelajar / Mahasiswa sebanyak 18.786 jiwa (13%) merupakan peluang dan tantangan bagi pemerintah untuk mengembangkan menjadi sumber daya manusia yang dinamis, terampil, dan menguasai ilmu pengetahuan serta teknologi sehingga kelak akan membantu meningkatkan perekonomian di Kabupaten Bulungan. Perencanaan pembangunan khususnya di sektor ketenagakerjaan sangat penting untuk wilayah Kabupaten Bulungan khususnya



di ibukota Kabupaten untuk menciptakan kualitas pembangunan masyarakat.

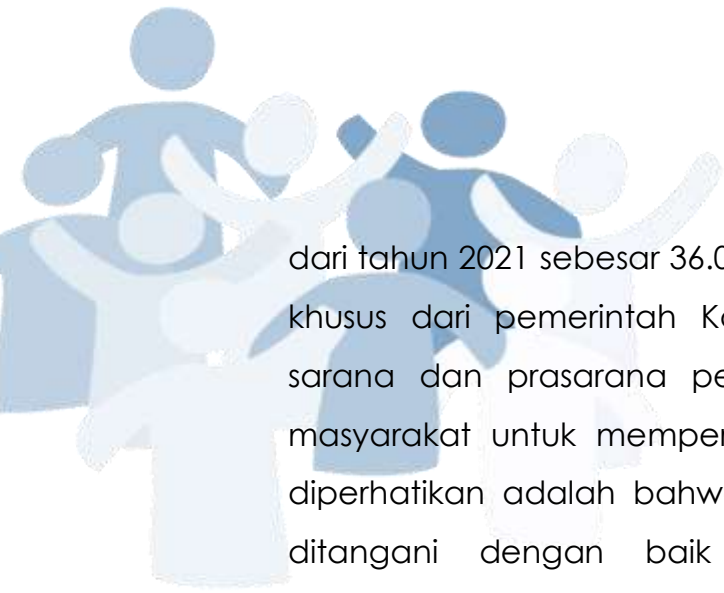
2. Angka Pengangguran (Tingkat Pengangguran)

Pengangguran merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik yang belum pernah bekerja maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan atau mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan atau mereka yang putus asa untuk memperoleh pekerjaan. Berikut ini disajikan data perkiraan pengangguran berdasarkan hitungan selisih penduduk Belum / Tidak Bekerja dengan penduduk prasekolah 0-6 tahun, penduduk usia 7 tahun keatas dianggap memiliki pekerjaan atau berstatus sebagai Pelajar / Mahasiswa. Hasil estimasi angka pengangguran adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4: Jumlah Angka Pengangguran

NO	JENIS PEKERJAAN	TANJUNG PALAS	TANJUNG PALAS BARAT	TANJUNG PALAS UTARA	TANJUNG PALAS TIMUR	TANJUNG SELOR	TANJUNG PALAS TENGAH	PESO	PESO HILIR	SEKAT AK	BUNYU
1	Belum/Tidak Bekerja	6.375	2.661	4.008	7.464	21.837	4.269	1.543	1.499	5.144	4.393
2	Usia Pra Sekolah < 6 tahun	2.120	719	1.424	2.550	7.901	1.502	394	423	1.674	1.404
3	Selisih (Angka Pengangguran)	4.255	1.942	2.584	4.914	13.936	2.767	1.149	1.076	3.470	2.989

Tabel 4.4 menunjukkan angka Belum / Pekerjaan di Kabupaten Bulungan sebesar 59.193 jiwa atau sebesar 36,63%. Dari tabel tersebut angka pengangguran tertinggi berada di Kecamatan Tanjung Selor sebesar 21.873 jiwa, Tanjung Palas Timur sebesar 7,464 jiwa diikuti Tanjung Palas yakni 6.375 jiwa. Jika angka-angka tersebut dikurangi dengan jumlah usia pra sekolah < 6 tahun maka jumlah angka perkiraan pengangguran di Kabupaten Bulungan sebesar 39.082 jiwa atau 24.19%



dari tahun 2021 sebesar 36.022 jiwa atau 23.34%. Hal ini perlu perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Bulungan untuk menyediakan sarana dan prasarana pelatihan kerja serta meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh keterampilan kerja. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa angka pengangguran penduduk harus ditangani dengan baik seperti misalnya memberikan bekal keterampilan kerja khusus sesuai permintaan pasar melalui Balai Latihan Kerja (BLK), dan lembaga pelatihan lainnya baik pemerintah maupun swasta, sehingga mereka dapat terserap di dunia kerja ataupun menciptakan sendiri lapangan kerja sehingga masyarakat yang belum / tidak bekerja dapat mendapat pekerjaan dan penghasilan. Jika angka pengangguran ini tidak ditangani dengan baik dikhawatirkan akan mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan seperti : kriminalitas, angka kemiskinan bertambah dan meningkatnya biaya bantuan sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Indikator ini sangat penting sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan.

C. Sosial

1. Angka Penyandang Cacat (Disabilitas)

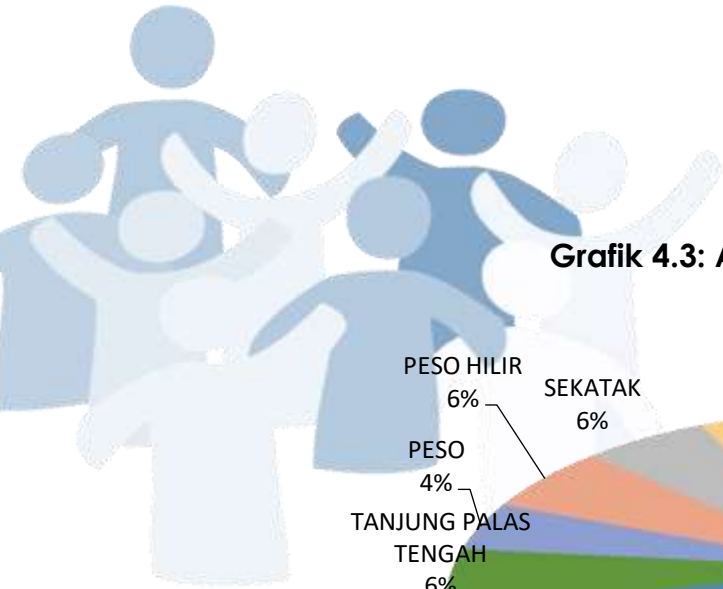
Isu sosial berikutnya adalah disabilitas. Informasi tentang banyaknya penduduk penyandang cacat dan jenis kecacatannya sangat diperlukan pemerintah daerah dalam memberikan program atau infrastruktur pelayanan publik yang ramah penyandang disabilitas / penyandang cacat, data penyandang cacat Kabupaten Bulungan disajikan pada halaman berikut :

Tabel 4.5: Angka Penyandang Cacat (Disabilitas)

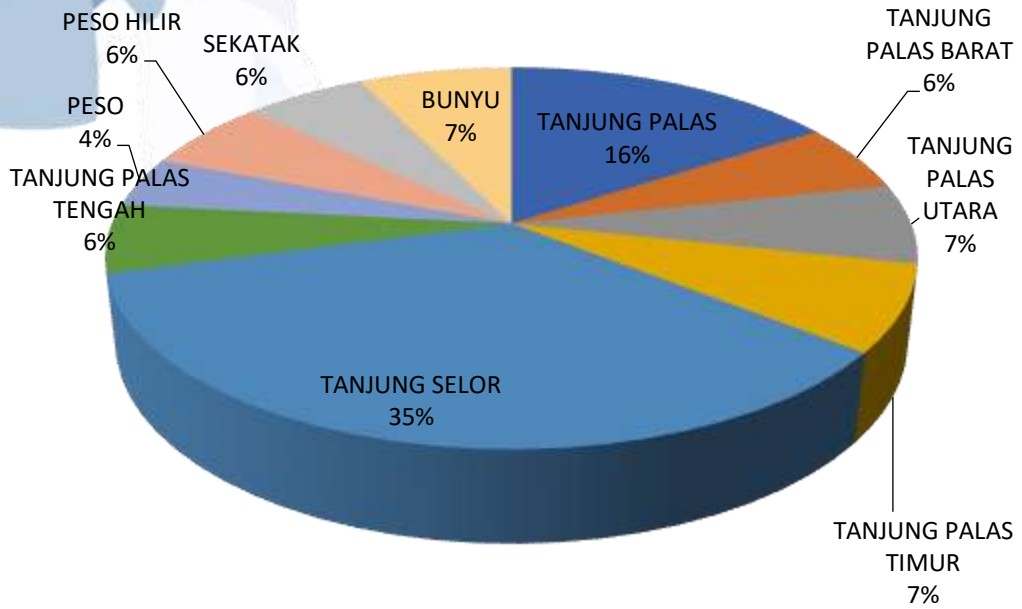
NO	KECAMATAN	CACAT FISIK	CACAT TUNA NETRA	CACAT TUNA RUNGGU	CACAT MENTAL/JIWA	CACAT FISIK & MENTAL	CACAT LAINNYA	JUMLAH
1	TANJUNG PALAS	12	6	9	25	5	6	63
2	TANJUNG PALAS BARAT	1	3	5	4	2	8	23
3	TANJUNG PALAS UTARA	9	3	7	4	1	3	27
4	TANJUNG PALAS TIMUR	10	3	8	3	1	4	29
5	TANJUNG SELOR	23	17	31	46	8	15	140
6	TANJUNG PALAS TENGAH	6	3	7	5	0	2	23
7	PESO	4	5	2	3	1	2	17
8	PESO HILIR	10	2	5	3	2	2	24
9	SEKATAK	8	3	1	2	0	9	23
10	BUNYU	3	2	9	12	1	2	29

Jumlah penyandang cacat di Kabupaten Bulungan penduduk tahun 2022 tercatat 398 jiwa atau 0,24% naik 0,23 % dari tahun 2021. Angka ini tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Bulungan Meskipun jumlahnya kecil, penduduk penyandang cacat tetap harus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Bulungan untuk tetap diberikan pelayanan sosial bagi mereka seperti pendidikan, kesehatan dan fasilitas layanan umum lainnya serta perlunya kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bulungan dengan pemerintah Kecamatan dan desa untuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan bagi para penyandang disabilitas.

Jika dilihat dari penyebarannya maka Kecamatan Tanjung Selor memiliki penduduk disabilitas tertinggi yaitu sebanyak 140 jiwa, Tanjung Palas sebanyak 63 jiwa serta Tanjung Palas Timur 29 jiwa. Grafik penyandang cacat Kabupaten Bulungan disajikan sebagai berikut :



Grafik 4.3: Angka Penyandang Cacat





BAB V

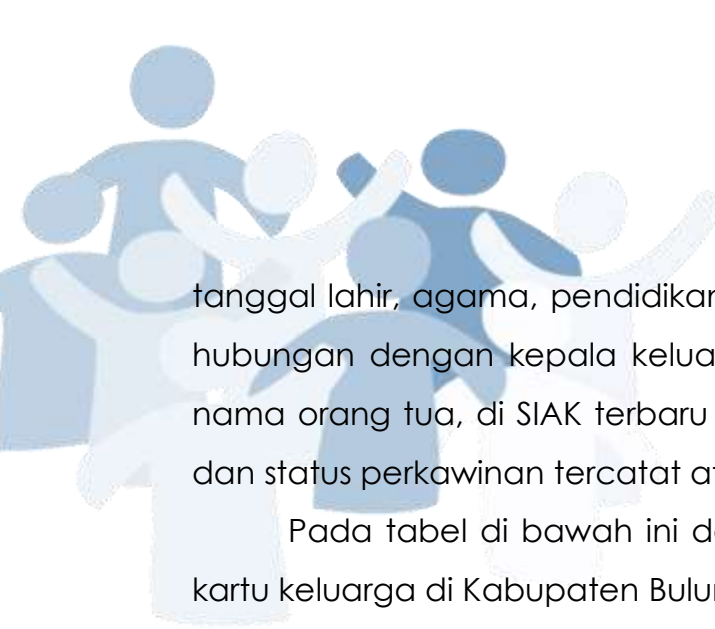
KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Dokumen kependudukan adalah kunci akses terhadap pelayanan publik yang disediakan pemerintah bagi seluruh warga negara. Sebagai warga negara kita wajib memiliki dokumen kependudukan seperti KTP Elektronik, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, dan Akta Perceraian. Dokumen kependudukan ini berkekuatan hukum mengikat secara perdata bagi pemiliknya. Misalnya akta kelahiran, menunjukkan hubungan perdata dari pemilik akta dengan orang tuanya, akta kematian juga menunjukkan hubungan perdata dengan ahli waris, demikian pula akta-akta yang lain. Bagi pemerintah, kepemilikan dokumen kependudukan bermanfaat dalam melakukan kegiatan pengadministrasian penduduk berdasarkan hak legalnya serta memperkuat database kependudukan bagi peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

A. Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga merupakan salah satu dari beberapa dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh keluarga. Kartu keluarga menunjukkan hubungan kekerabatan antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya. Untuk menghindari kepala keluarga ganda, maka perempuan bisa menjadi kepala keluarga karena status perkawinannya janda maupun karena menjadi istri kedua, ketiga maupun keempat dari seorang laki-laki, sedangkan suaminya menjadi kepala keluarga hanya di salah satu istri, sesuai kesepakatan di dalam keluarga tersebut.

Seorang kepala keluarga bertanggung jawab terhadap anggota keluarga. Kartu Keluarga (KK) merupakan kartu identitas yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga seperti nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat lahir,



tanggal lahir, agama, pendidikan, jenis pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dengan kepala keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua, di SIAK terbaru versi 8 ada penambahan golongan darah dan status perkawinan tercatat atau belum tercatat.

Pada tabel di bawah ini dapat dilihat jumlah persentase kepemilikan kartu keluarga di Kabupaten Bulungan :

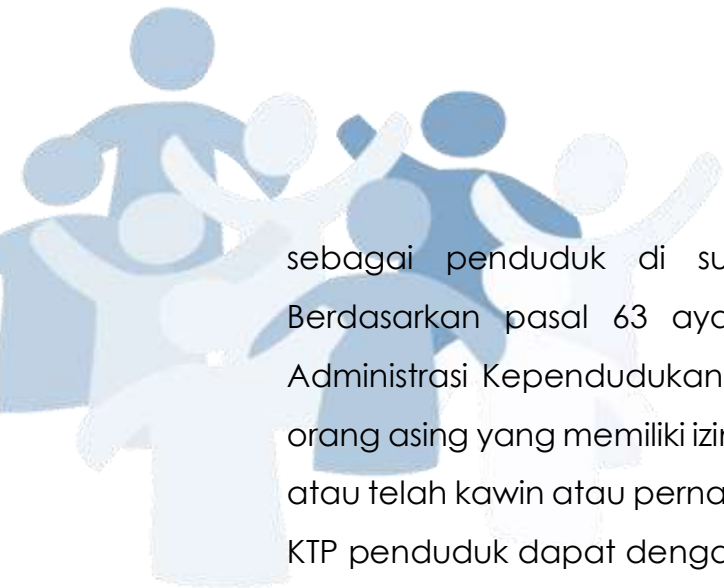
Tabel 5.1: Presentase Kepemilikan Kartu Keluarga Kabupaten Bulungan Tahun 2022

N O	KECAMATAN	JUMLAH KELUAR GA	SUDAH MEMILIKI KK		BELUM MEMILIKI KK	
			N	%	N	%
1	TANJUNG PALAS	5.552	5.546	99,81	6	0,19
2	TANJUNG PALAS BARAT	2.092	2.088	99,84	4	0,16
3	TANJUNG PALAS UTARA	3.642	3.636	99,83	6	0,17
4	TANJUNG PALAS TIMUR	5.926	5.916	99,84	10	0,16
5	TANJUNG SELOR	19.011	18.981	99,77	30	0,23
6	TANJUNG PALAS TENGAH	3.843	3.834	99,92	9	0,08
7	PESO	1.229	1.228	99,92	1	0,08
8	PESO HILIR	1.272	1.271	99,8	1	0,2
9	SEKATAK	3.540	3.533	99,87	7	0,13
10	BUNYU	3.781	3.776	99,81	5	0,19
JUMLAH		49.888	49.809	99,89	79	0,11

Tabel 5.1 menunjukkan jumlah keluarga dan jumlah keluarga yang memiliki Kartu Keluarga di Kabupaten Bulungan. Dari 49.888 jumlah keluarga yang memiliki KK adalah 49.809 atau sebesar 98,89%. Sedangkan jumlah keluarga yang belum memiliki kartu keluarga sebanyak 79.

B. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui

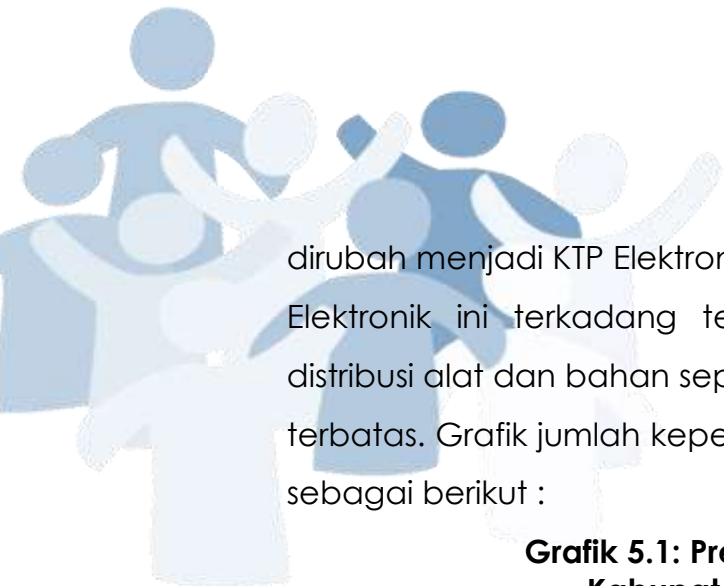


sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. Berdasarkan pasal 63 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP. Dengan memiliki KTP penduduk dapat dengan mudah mengurus semua yang berkaitan dengan legalitas serta memperoleh pelayanan sosial dan ekonomi dasar lainnya, misalnya urusan perbankan, sertifikat tanah, perkawinan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Jumlah dan proporsi penduduk menurut kepemilikan KTP pada seluruh kabupaten/kota yang ada di Kabupaten Bulungan disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 5.2: Presentase Kepemilikan KTP-EI
Kabupaten Bulungan Tahun 2022**

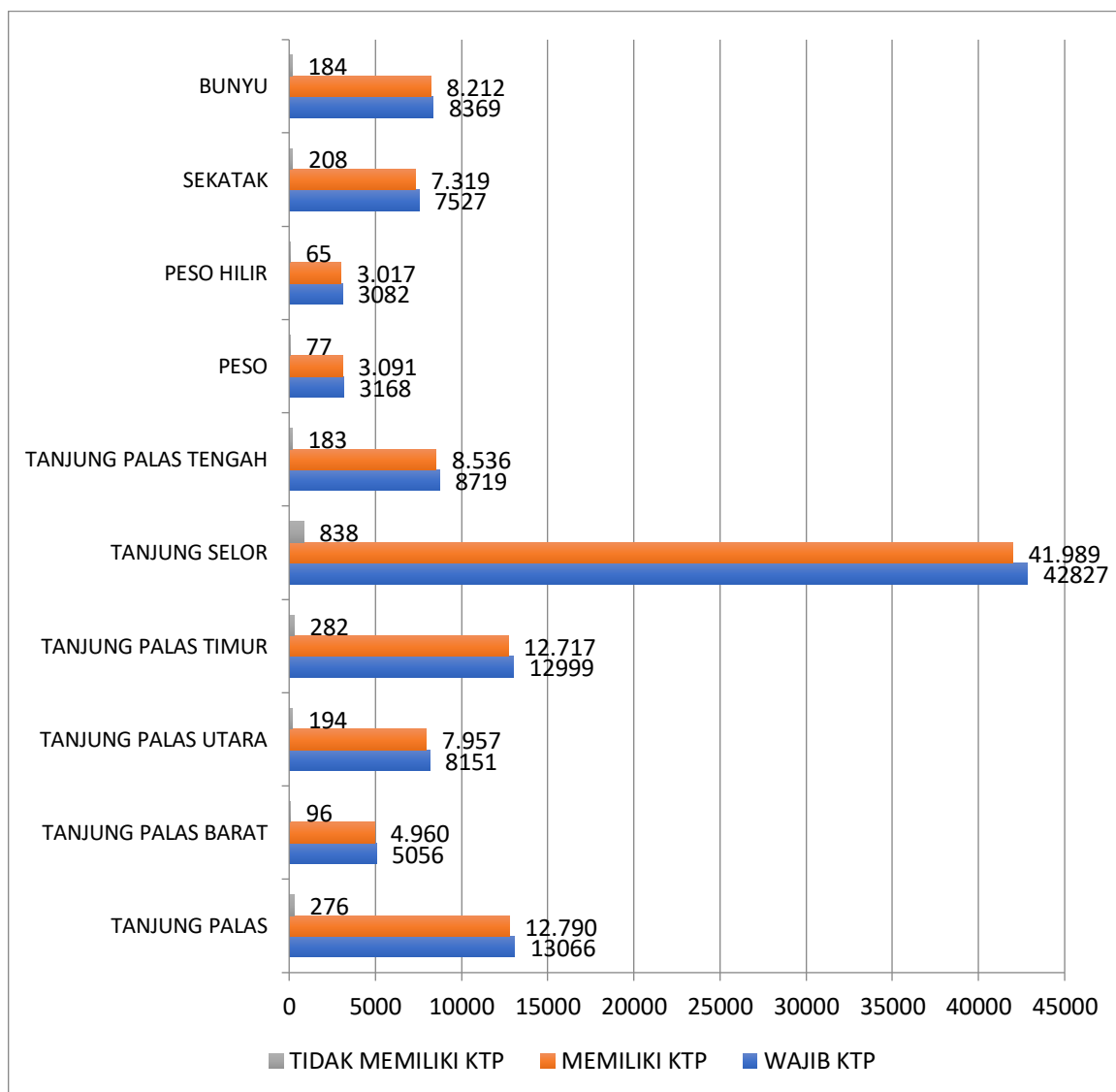
no	kecamatan	JUMLAH PENDUDUK	WAJIB KTP	MEMILIKI KTP	BELUM MEILIKI KTP	%
1	TANJUNG PALAS	18,187	13,066	12,790	276	97.89
2	TANJUNG PALAS BARAT	6,918	5,056	4,960	96	98.10
3	TANJUNG PALAS UTARA	11,559	8,151	7,957	194	97.62
4	TANJUNG PALAS TIMUR	19,204	12,999	12,717	282	97.83
5	TANJUNG SELOR	61,203	42,827	41,989	838	98.04
6	TANJUNG PALAS TENGAH	12,53	8,719	8,536	183	97.90
7	PESO	4,287	3,168	3,091	77	97.57
8	PESO HILIR	4,216	3,082	3,017	65	97.89
9	SEKATAK	11,647	7,527	7,319	208	97.24
10	BUNYU	11,822	8,396	8,212	184	97.81
	JUMLAH	161,573	112,991	110,558	2,403	97,87

Tabel di atas menampilkan penduduk wajib KTP Kabupaten Bulungan yang telah melaksanakan perekaman KTP-EI. Terlihat bahwa dari 112.991 jiwa wajib KTP, sebanyak 110.558 jiwa telah melakukan perekaman atau 97,87%. Sejalan dengan pelaksanaan program pemerintah, penduduk yang masih mempunyai KTP non Elektronik



dirubah menjadi KTP Elektronik. Proses perekaman dan pencetakan KTP Elektronik ini terkadang terkendala oleh gangguan jaringan dan distribusi alat dan bahan seperti blangko, ribbon, film dan lain lain yang terbatas. Grafik jumlah kepemilikan Kartu Tanda Penduduk ditampilkan sebagai berikut :

Grafik 5.1: Presentase Kepemilikan KTP-EI Kabupaten Bulungan Tahun 2022





C. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

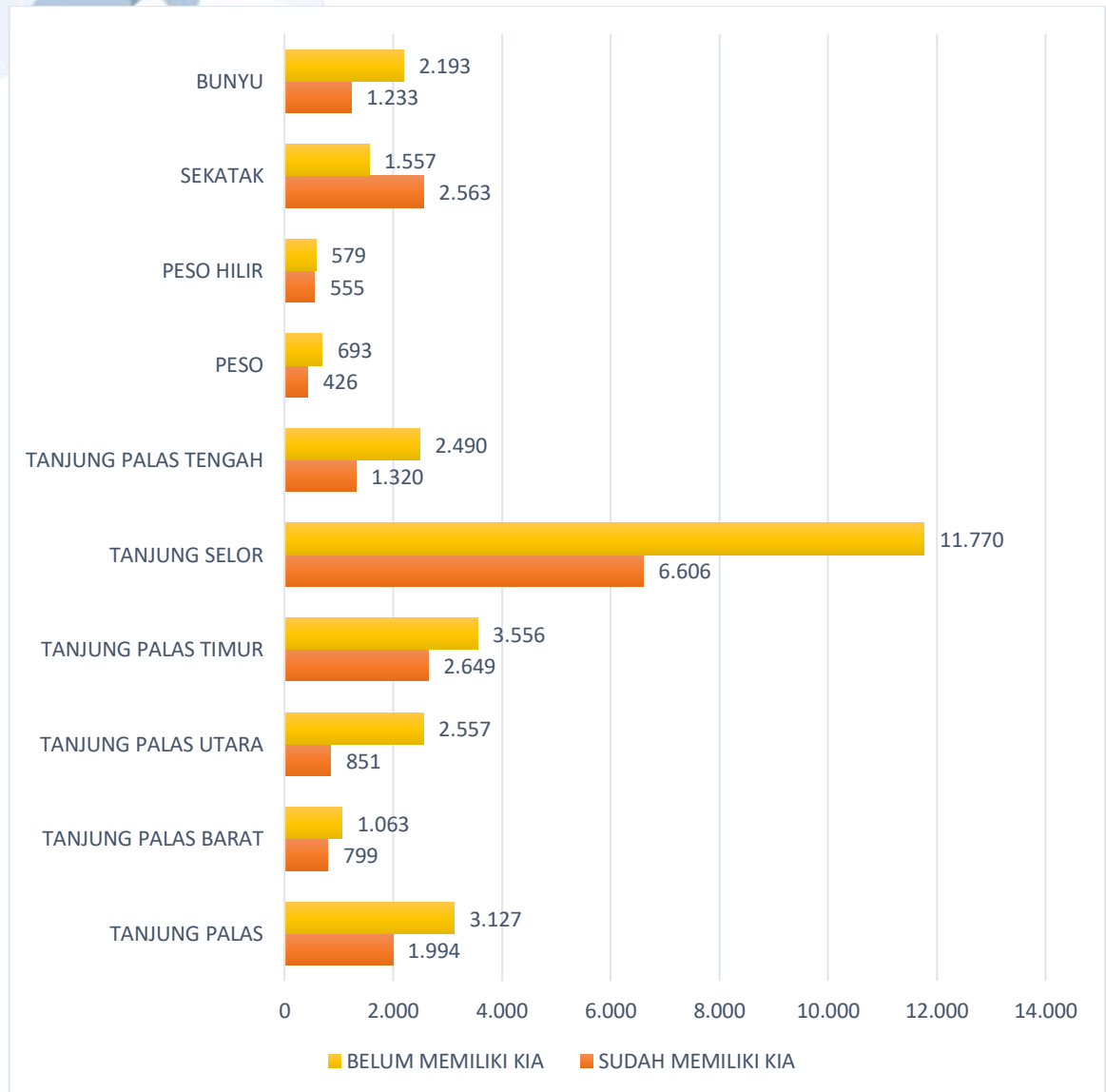
Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk anak-anak berusia 0-16 tahun atau belum menikah sebagai bukti perhatian pemerintah untuk memberikan dokumen kependudukan bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa mengenal usia. Tabel berikut adalah data kepemilikan KIA se-Kabupaten Bulungan:

Tabel 5.3: Presentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupaten Bulungan Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH (0-17) TAHUN	SUDAH MEMILIKI KIA	BELUM MEMILIKI KIA	PRESENTASE KEPEMILIKAN KIA
1	TANJUNG PALAS	5.121	1.994	3.127	61,06
2	TANJUNG PALAS BARAT	1.862	799	1.063	57,09
3	TANJUNG PALAS UTARA	3.408	851	2.557	75,03
4	TANJUNG PALAS TIMUR	6.205	2.649	3.556	57,31
5	TANJUNG SELOR	18.376	6.606	11.770	64,05
6	TANJUNG PALAS TENGAH	3.810	1.320	2.490	65,35
7	PESO	1.119	426	693	61,93
8	PESO HILIR	1.134	555	579	51,06
9	SEKATAK	4.120	2.563	1.557	37,79
10	BUNYU	3.426	1.233	2.193	64,01
	TOTAL	48.581	18.996	29.585	60,90

Dari tabel kepemilikan KIA diatas Kecamatan Tanjung Palas Utara memiliki persentase terbesar 75,03%, Kecamatan Tanjung Palas Tengah 65,35 %, Kemudian Kecamatan yang lainnya yang Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

**Grafik 5.2: Presentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
Kabupaten Bulungan Tahun 2022**



D. Kepemilikan Akta

Akta merupakan dokumen kependudukan yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia. Akta merupakan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam hubungannya dengan pelayanan legal.



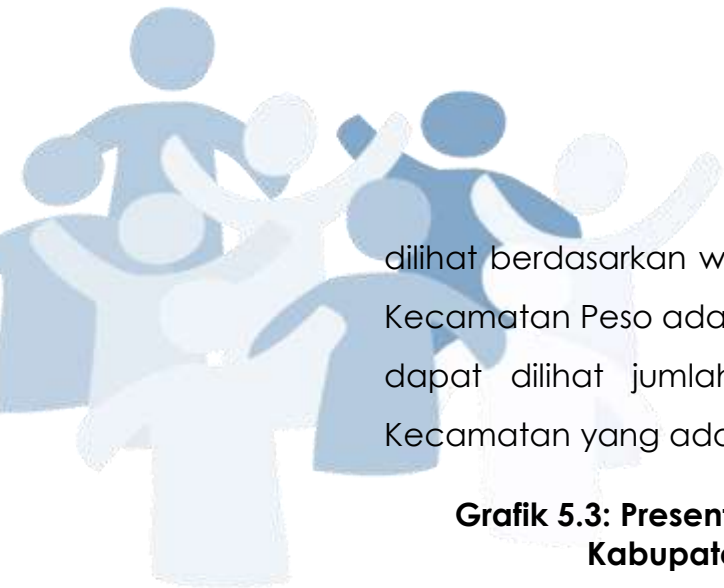
1. Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan bukti legal hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Dalam akta tersebut dijelaskan tentang siapa nama orang tua baik ayah maupun ibunya. Saat ini untuk mempermudah masyarakat memiliki atau membuat Akta Kelahiran jika masyarakat tidak memiliki dokumen pendukung (surat kelahiran, dll) dapat mengisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk mendapatkannya. Akta kelahiran penting untuk dimiliki oleh seorang anak karena digunakan pada saat mengurus pendidikan atau mengurus dokumen lainnya, data kepemilikan akta kelahiran disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.4: Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran Kabupaten Bulungan Tahun 2022

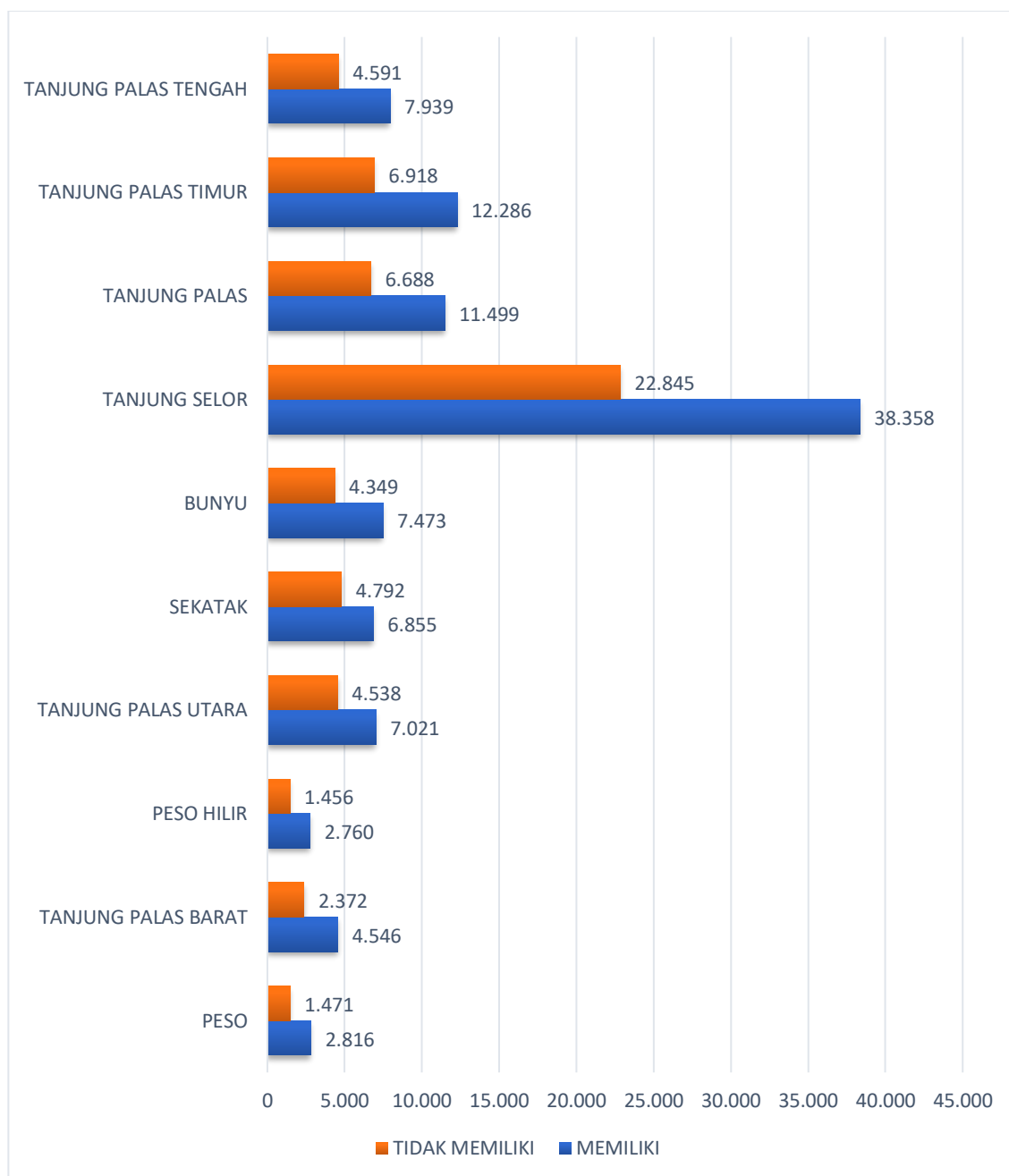
NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	BELUM MEMILIKI	MEMILIKI	PERSENT ASE (%)
1	PESO	4.287	1.471	2.816	65,69
2	TANJUNG PALAS BARAT	6.918	2.372	4.546	65,71
3	PESO HILIR	4.216	1.456	2.760	65,46
4	TANJUNG PALAS UTARA	11.559	4.538	7.021	60,74
5	SEKATAK	11.647	4.792	6.855	58,86
6	BUNYU	11.822	4.349	7.473	63,21
7	TANJUNG SELOR	61.203	22.845	38.358	62,67
8	TANJUNG PALAS	18.187	6.688	11.499	63,23
9	TANJUNG PALAS TIMUR	19.204	6.918	12.286	63,98
10	TANJUNG PALAS TENGAH	12.530	4.591	7.939	63,36
	JUMLAH	161.573	60.020	101.553	62,85


Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk Kabupaten Bulungan yang memiliki akta kelahiran sebesar 62,85 persen sebesar 101.553 jiwa, sedangkan sebesar 60.020 jiwa atau 37,15 persen penduduk belum mempunyai akta kelahiran. Bila



dilihat berdasarkan wilayah maka kepemilikan akta kelahiran di Kecamatan Peso adalah yang tertinggi. Pada grafik di bawah ini dapat dilihat jumlah kepemilikan akta kelahiran di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan:

Grafik 5.3: Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran Kabupaten Bulungan Tahun 2022





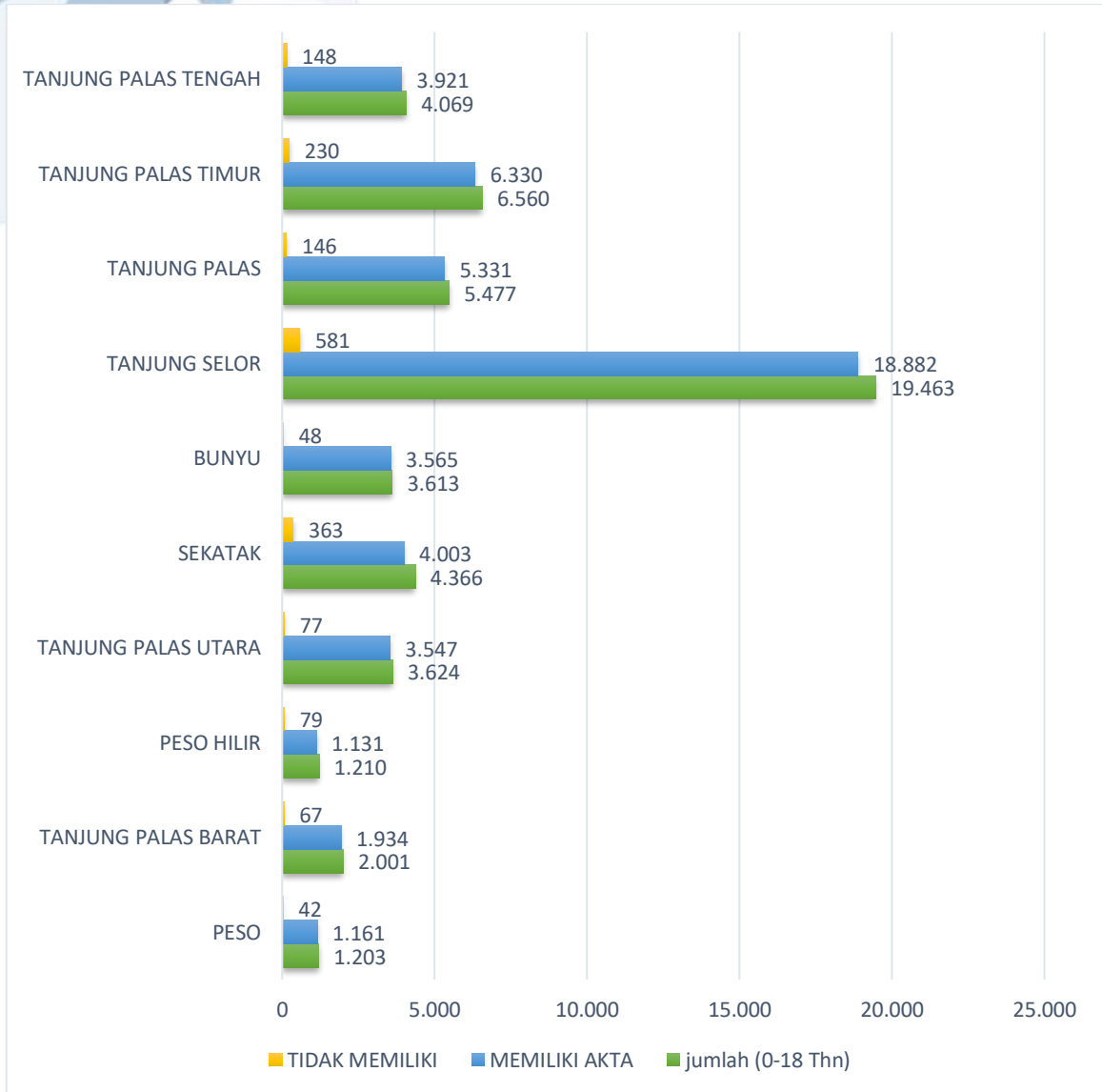
Data kepemilikan akta kelahiran anak umur 0 – 18 tahun yang menjadi salah satu prioritas kepemilikan dokumen kependudukan seperti disajikan tabel berikut :

Tabel 5.5: Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18) Tahun Kabupaten Bulungan Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH USIA 0-18 THN	BELUM MEMILIKI	MEMILIKI	PERSENTASE (%)
1	PESO	1.203	42	1.161	96,51
2	TANJUNG PALAS BARAT	2.001	67	1.934	96,65
3	PESO HILIR	1.210	79	1.131	93,47
4	TANJUNG PALAS UTARA	3.624	77	3.547	97,88
5	SEKATAK	4.366	363	4.003	91,69
6	BUNYU	3.613	48	3.565	98,67
7	TANJUNG SELOR	19.463	581	18.882	97,01
8	TANJUNG PALAS	5.477	146	5.331	97,33
9	TANJUNG PALAS TIMUR	6.560	230	6.330	96,49
10	TANJUNG PALAS TENGAH	4.069	148	3.921	96,36
	TOTAL	51.586	1.781	49.805	96,55

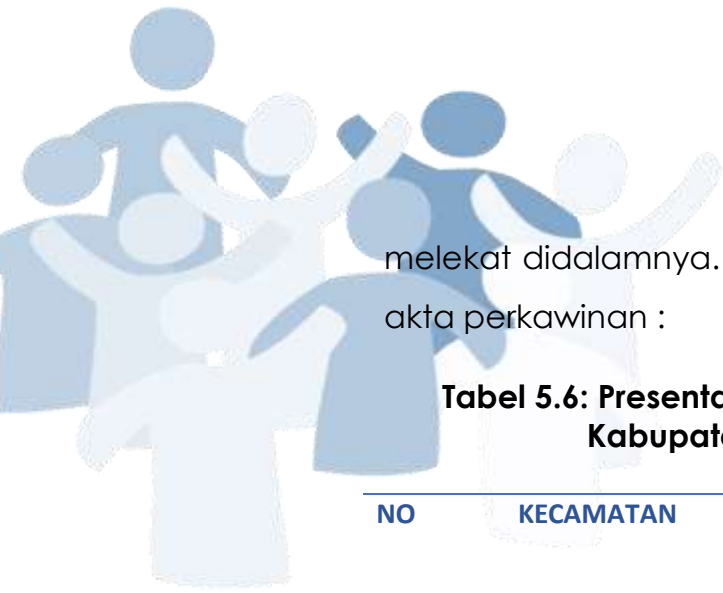
Berdasarkan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 bahwa Target tahun 2024 Indikator Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-17 tahun adalah 100% maka dari tabel di atas untuk Kabupaten Bulungan masih mencapai 96,55%. Perlu upaya-upaya atau terobosan untuk meningkatkan pencapaian ini dengan pemutakhiran atau peginputan data akta kelahiran bagi penduduk yang sudah memiliki tapi belum terinput dalam database serta kemudahan-kemudahan bagi penduduk yang akan mengurus akta kelahiran. Grafik jumlah kepemilikan akta kelahiran anak umur 0-18 disampaikan sebagai berikut :

Grafik 5.4: Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18) Tahun Kabupaten Bulungan Tahun 2022



2. Akta Perkawinan

Akta perkawinan / nikah merupakan identitas atas penduduk yang berstatus kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta perkawinan memberikan kekuatan hukum atas ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga dengan seluruh hak dan kewajiban yang



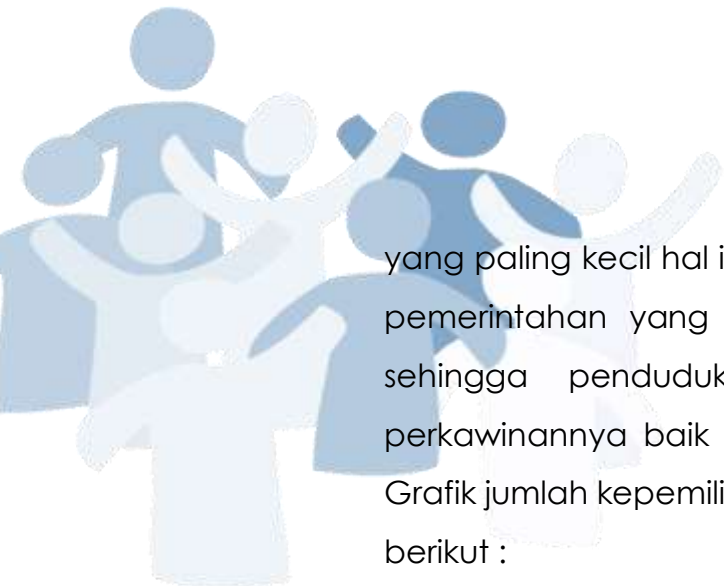
melekat didalamnya. Tabel dibawah ini menyajikan kepemilikan akta perkawinan :

Tabel 5.6: Presentase Kepemilikan Akta Perkawinan Kabupaten Bulungan Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH	MEMILIKI AKTA	BELUM MEMILIKI AKTA	PERSENTASE (%)
1	TANJUNG PALAS	8.185	6.525	1.660	79,72
2	TANJUNG PALAS BARAT	2.908	2.237	671	76,93
3	TANJUNG PALAS UTARA	5.545	4.399	1.146	79,33
4	TANJUNG PALAS TIMUR	8.306	5.624	2.682	67,71
5	TANJUNG SELOR	27.032	21.066	5.966	77,93
6	TANJUNG PALAS TENGAH	6.064	4.549	1.515	75,02
7	PESO	1.873	1.472	401	78,59
8	PESO HILIR	1.769	1.304	465	73,71
9	SEKATAK	5.089	3.089	2.000	60,70
10	BUNYU	5.215	4.430	785	84,95
	TOTAL	71.986	54.695	17.291	75,98

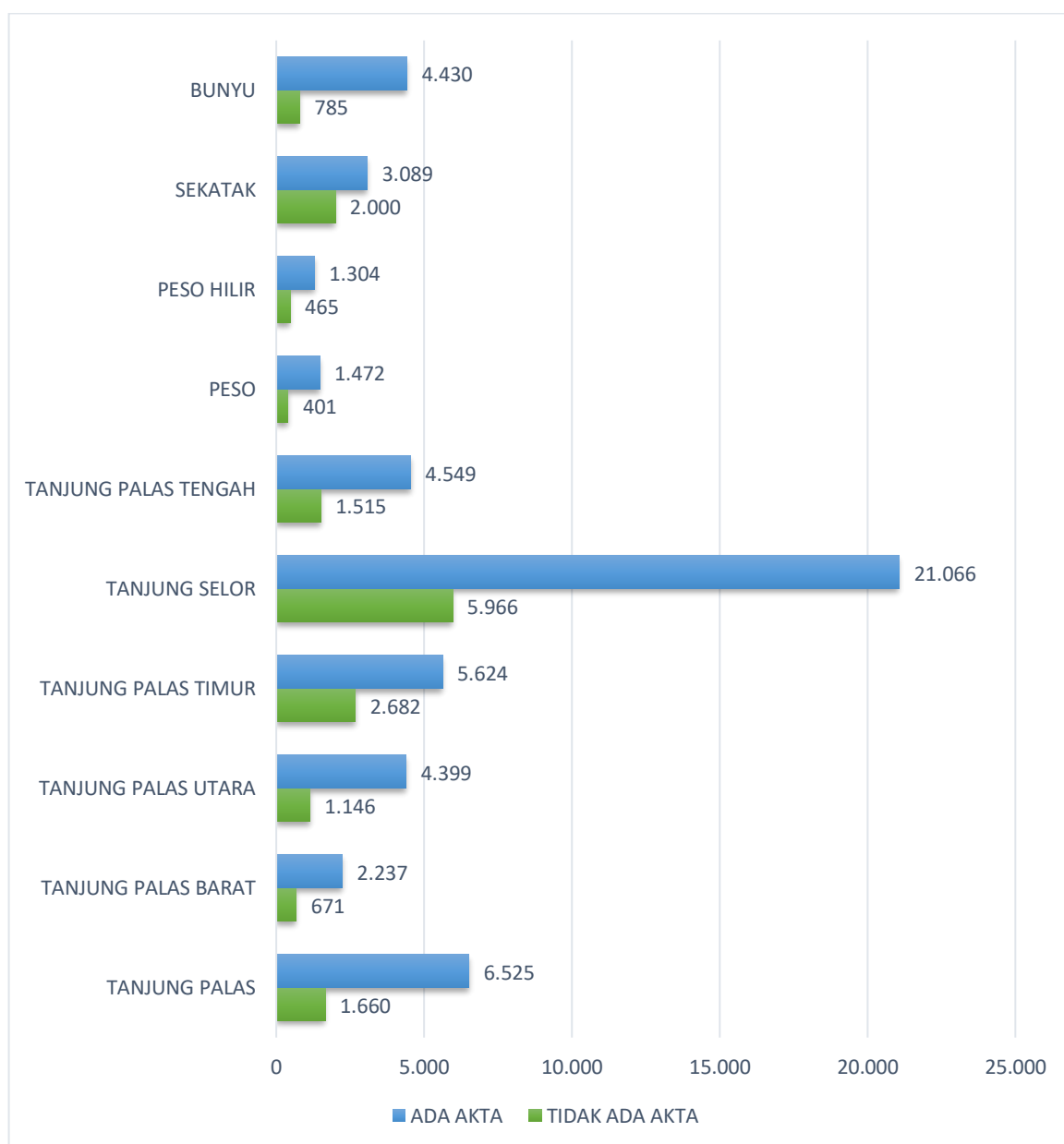
Tabel 5.5 menyajikan perbandingan penduduk berstatus kawin terhadap kepemilikan akta perkawinan. Jumlah penduduk Kabupaten Bulungan yang berstatus kawin sebanyak 71.986 jiwa, terdapat 54.695 Jiwa (75,98%) yang memiliki akta perkawinan dan 17.291 (23,02%) jiwa yang tidak memiliki akta perkawinan. Masih banyaknya pasangan yang belum memiliki akta pernikahan terjadi karena banyak penduduk yang melakukan perkawinan secara agama atau adat saja tetapi tidak tercatat secara administrasi kependudukan, sehingga perkawinan ini belum diakui secara hukum negara.

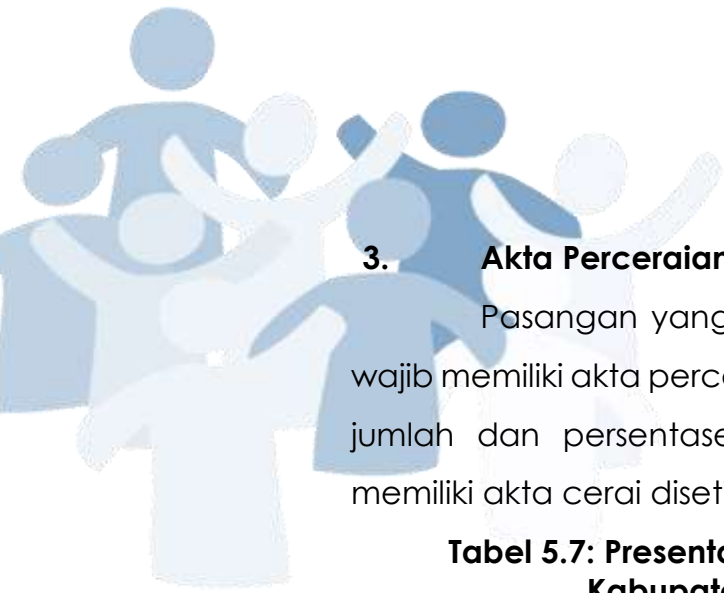
Jika dilihat per Kecamatan, dan dibandingkan dengan data pada periode sebelumnya, Bunyu menjadi Kecamatan yang tingkat kepemilikan akta perkawinannya tertinggi 84,95%, Kecamatan sekatak dengan 60,70 %, merupakan Kecamatan



yang paling kecil hal ini dapat disebabkan karena wilayah pusat pemerintahan yang sulit dijangkau dan jauh di pedalaman sehingga penduduk lebih banyak belum mencatatkan perkawinannya baik yang secara agama atau adat. Adapun Grafik jumlah kepemilikan akta perkawinan disampaikan sebagai berikut :

Grafik 5.5: Presentase Kepemilikan Akta Perkawinan Kabupaten Bulungan Tahun 2022





3. Akta Perceraian

Pasangan yang telah berpisah dan berstatus cerai hidup wajib memiliki akta perceraian. Tabel di bawah ini menggambarkan jumlah dan persentase penduduk berstatus cerai hidup yang memiliki akta cerai di setiap Kecamatan se Kabupaten Bulungan:

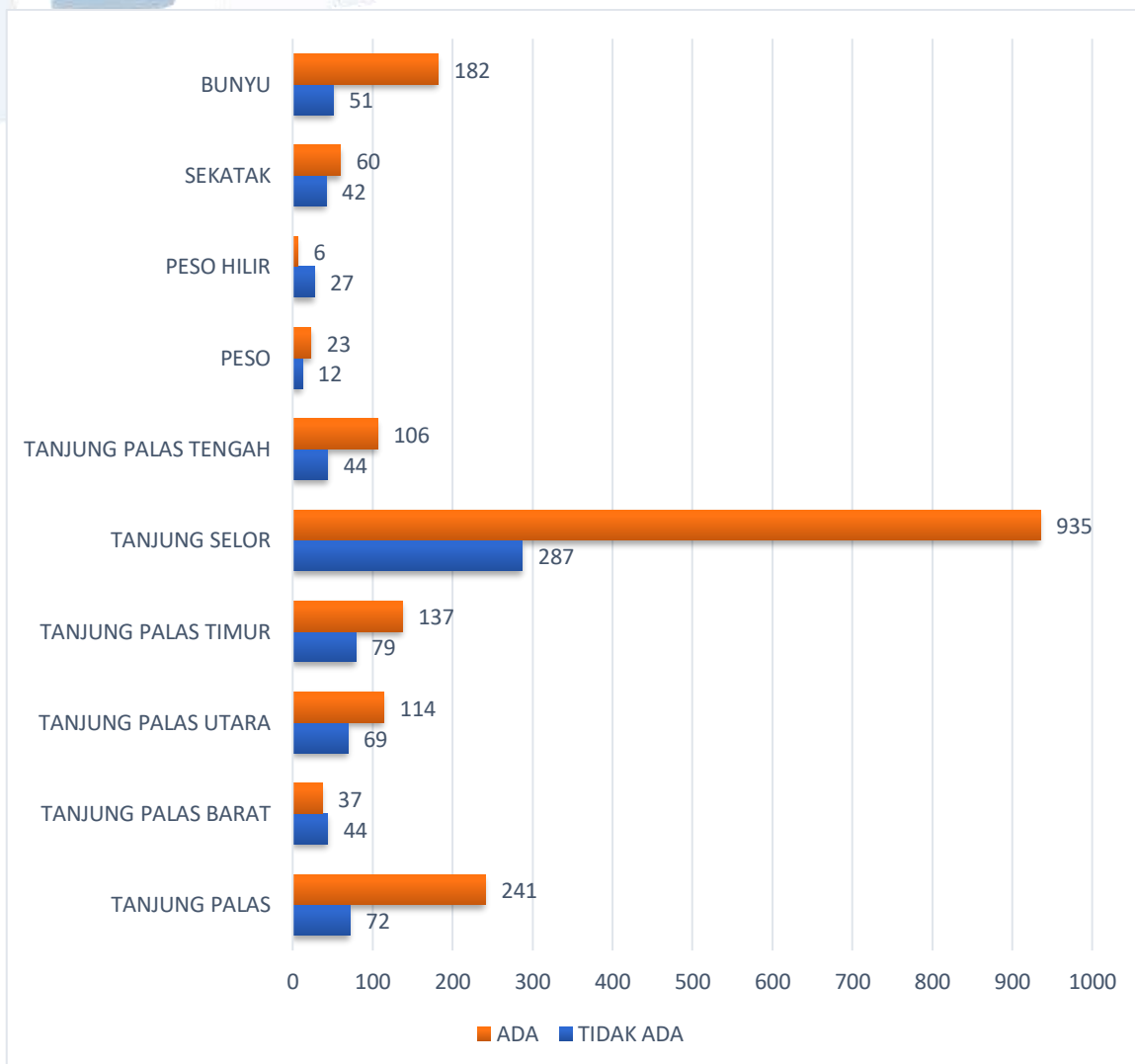
Tabel 5.7: Presentase Kepemilikan Akta Perceraian Kabupaten Bulungan Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH MEMILIKI CERAI	BLM MEMILIKI	PERSENTASE (%)
1	TANJUNG PALAS	313	241	77,00
2	TANJUNG PALAS BARAT	81	37	45,68
3	TANJUNG PALAS UTARA	183	114	62,30
4	TANJUNG PALAS TIMUR	216	137	63,43
5	TANJUNG SELOR	1.222	935	76,51
6	TANJUNG PALAS TENGAH	150	106	70,67
7	PESO	35	23	65,71
8	PESO HILIR	33	6	18,18
9	SEKATAK	102	60	58,82
10	BUNYU	233	182	78,11
	TOTAL	2.568	1841	71,69

Tabel 5.6 menunjukkan bahwa penduduk berstatus cerai hidup yang memiliki akta perceraian sebesar 2.568 jiwa atau 71,69% dari penduduk yang berstatus cerai hidup dan yang belum memiliki akta perceraian sebanyak 727 jiwa atau 28,31%. Persentase penduduk cerai hidup yang tidak memiliki akta perceraian masih sangat tinggi. Hal ini dapat disebabkan oleh masyarakat yang belum melaporkan perceraian. Ini perlu menjadi perhatian pemerintah kabupaten/kota dalam merencanakan suatu program kegiatan untuk sosialisasi dan penyuluhan akan pentingnya akta perceraian maupun dokumen kependudukan lainnya. Akta perceraian dengan presentase kepemilikan paling tinggi yaitu di Kecamatan Tanjung Selor.

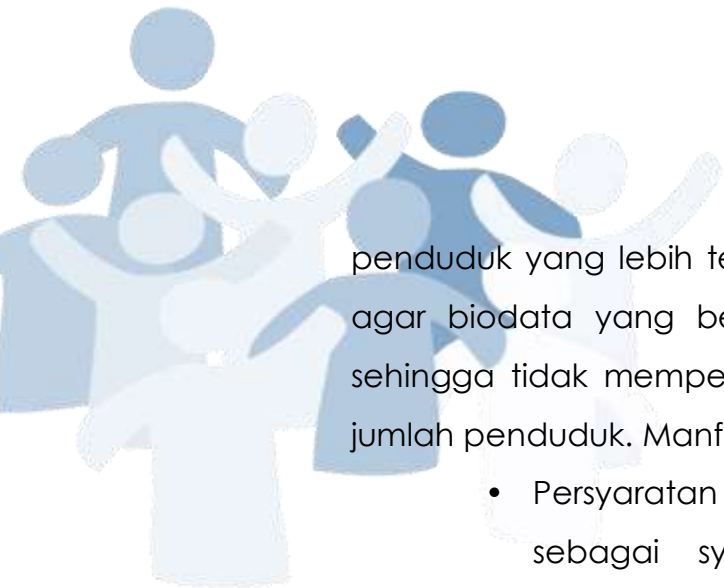
Apabila data di atas disajikan dalam bentuk grafik, maka akan nampak seperti di bawah ini :

Grafik 5.6: Presentase Kepemilikan Akta Perceraian Kabupaten Bulungan Tahun 2022



4. Akta Kematian

Akta Kematian merupakan dokumen yang diterbitkan bagi warga negara yang telah meninggal atas laporan dari ahli waris atau pihak lainnya. Hal ini terkait dengan status hukum seseorang, baik itu hukum privat maupun hukum publik. Jika pelaporan akta kematian ini berjalan baik maka akan mendukung pendataan



penduduk yang lebih tepat dan akurat dari sisi jumlah penduduk agar biodata yang bersangkutan bisa dihapus dari database sehingga tidak mempengaruhi atau muncul masalah dalam hal jumlah penduduk. Manfaat akta kematian adalah :

- Persyaratan pengurusan Status Janda atau Duda, sebagai syarat untuk melaksanakan pernikahan kembali
- Persyaratan pengurusan pembagian waris
- Persyaratan pengurusan pensiun
- Persyaratan pengurusan uang duka, tunjangan kecelakaan, TASPEN, asuransi, perbankan
- Tertib administrasi kependudukan

Berikut ini data jumlah kepemilikan akta kematian di Kecamatan di Kabupaten Bulungan :

Tabel 5.8: Presentase Kepemilikan Akta Kematian Kabupaten Bulungan Tahun 2022

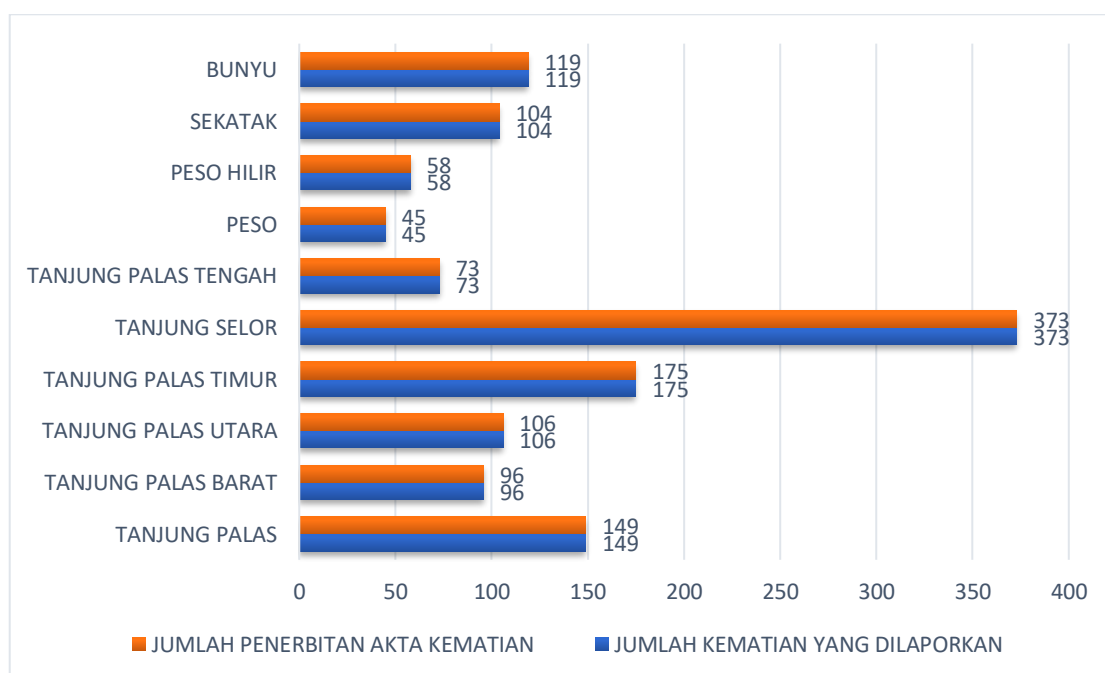
NO	KECAMATAN	JUMLAH KEMATIAN YANG DILAPORKAN	JUMLAH PENERBITAN AKTA KEMATIAN
1	TANJUNG PALAS	149	149
2	TANJUNG PALAS BARAT	96	96
3	TANJUNG PALAS UTARA	106	106
4	TANJUNG PALAS TIMUR	175	175
5	TANJUNG SELOR	373	373
6	TANJUNG PALAS TENGAH	73	73
7	PESO	45	45
8	PESO HILIR	58	58
9	SEKATAK	104	104
10	BUNYU	119	119
	JUMLAH	1.298	1.298

Dilihat dari tabel di atas, terdapat 1.298 kematian yang dilaporkan dan 1.298 penerbitan akta kematian. Kecamatan



Tanjung Selor jumlah akta kematiannya yang paling besar dikarenakan jumlah kematian yang dilaporkan juga besar, sedangkan jumlah akta kematian adalah akta kematian yang dicetak sampai dengan tahun 2022, sehingga penerbitan akta kematian lebih sedikit daripada jumlah kematian penduduk yang dilaporkan. Jadi, jumlah akta kematian ini bisa berasal dari laporan kematian sebelum tahun 2022 dan baru diterbitkan akta kematiannya pada tahun 2022. Penerbitan akta kematian di Kecamatan Tanjung Selor merupakan yang tertinggi di Kabupaten Bulungan hal ini dapat dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan pembuatan akta kematian sudah tumbuh dan adanya kerjasama dengan instansi terkait lainnya baik di kelurahan maupun kecamatan dan / atau instansi yang mengurus pemakaman. Grafik jumlah kepemilikan akta kematian disampaikan sebagai berikut :

Grafik 5.7: Presentase Kepemilikan Akta Kematian Kabupaten Bulungan Tahun 2022





BAB VI

P E N U T U P

Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Bulungan Tahun 2023 ini memuat data kependudukan Kabupaten Bulungan Tahun 2022 yang bersumber dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Buku ini kami harapkan dapat digunakan oleh instansi pemerintah dan / atau swasta maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan serta bermanfaat sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Bulungan.

Untuk mendukung penyusunan dan penyajian Profil Perkembangan Kependudukan tahun berikutnya, diperlukan usaha dan dukungan stake holder yang terkait khususnya perbaikan data atau pemutakhiran data kependudukan setiap periode sehingga penyajian tahun yang akan datang lebih baik dan akurat.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna sehingga kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan mendatang sangat dibutuhkan, baik dari pengguna data maupun pemerhati masalah kependudukan. Demikian dan Terimakasih.